

POTRET KEPENDUDUKAN INDONESIA

MOMENTUM BONUS DEMOGRAFI
MENUJU 2045

BERDASARKAN LAPORAN KEPENDUDUKAN INDONESIA 2025





Natural (Indo)

MALAYSIA

Kuching

SARAWAK

105°

Ketapang Balikpapan

BANGKA

BORNEO

Banjarm

BelitON

INDONE

Jakarta

Sema-rang

JAVA

Surakarta
Yogyakarta



Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN



Title: Potret Kependudukan Indonesia
Momentum Bonus Demografi Menuju 2045
Pengarah: Bonivasius Prasetya Ichtarto
Penanggung Jawab: Nyigit Wudi Amini
Penyelas Data: Narwawi Pramudhiarta, Ria Rahayu
Foto Cover: Yamtono Sardi / Getty Images

Editor: Andre Syahreza
Penulis: Tim Proxy Media
Design/visual: Proxy Media
Penerbit: PT Rekacipta Proxy Media
Anggota IKAPI No. 449/JBA/2022
www.proxymedia.id

Seluruh isi dalam buku ini merupakan interpretasi populer dari Laporan Kependudukan Indonesia (LKI) Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2025. Penyajian data, analisis, dan narasi disusun ulang dengan pendekatan komunikasi publik, sehingga gaya bahasa dan struktur penjelasannya dapat berbeda dari penyajian dalam laporan aslinya.



Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip, memperbanyak, menyimpan dalam bentuk apa pun, atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN

POTRET KEPENDUDUKAN INDONESIA

MOMENTUM BONUS DEMOGRAFI MENUJU 2045

BERDASARKAN LAPORAN KEPENDUDUKAN INDONESIA 2025



DAFTAR ISI

BAGIAN I – PETA BESAR DEMOGRAFI INDONESIA	
Memasuki Demografi Baru — <i>Indonesia Menghadapi Tikungan Demografi Terbesar</i>	<i>h. 15</i>
Di Balik 284 Juta Jiwa — <i>Saat Bentuk Piramida Penduduk Mulai Berubah</i>	<i>h. 19</i>
Bonus atau Beban? — <i>Mengurai Peluang di Balik Ledakan Penduduk Produktif</i>	<i>h. 23</i>
Kita dan Cuaca — <i>Di Tengah Iklim yang Berubah, Indonesia Melangkah Maju</i>	<i>h. 27</i>
Masalah Orang Tua — <i>Peluang Baru dalam Lajur Panjang Menuju 2045</i>	<i>h. 31</i>
 LAPORAN KHUSUS:	
NEGARA DAN LANSIA: PELUANG DAN TANTANGAN BONUS DEMOGRAFI KEDUA	<i>h. 34-47</i>
 BAGIAN II – MASA DEPAN INDONESIA: KOTA, MOBILITAS, DAN PEMERATAAN	
Ketika Indonesia Bergerak — <i>Angka di Balik Migrasi, Urbanisasi, dan Ketimpangan Baru</i>	<i>h. 51</i>
Mobilitas Penduduk — <i>Mengapa Mobilitas Penduduk Menentukan Arah Indonesia</i>	<i>h. 55</i>
Migrasi Permanen — <i>Denyut yang Membentuk Masa Depan Indonesia</i>	<i>h. 59</i>
Era Baru Mobilitas — <i>Indonesia Bergerak Tanpa Harus Berpindah</i>	<i>h. 63</i>
Pergerakan Non Permanen — <i>Arah Baru Kehidupan Urban Indonesia</i>	<i>h. 67</i>
 BAGIAN III – ARAH KEBIJAKAN: MENATA STRATEGI MENUJU INDONESIA 2045	
Menata Masa Depan — <i>Jalan Emas Indonesia Menuju 2045</i>	<i>h. 73</i>
Keluarga Berencana — <i>Fakta di Balik Turunnya Kelahiran di Indonesia</i>	<i>h. 77</i>
Angkatan Kerja — <i>Tenaga Kerja Menguat, Ketimpangan Menyempit</i>	<i>h. 81</i>
Dari Desa ke Kota — <i>Membaca Masa Depan Urbanisasi Indonesia</i>	<i>h. 85</i>
Di Sempang Demografi — <i>Strategi Indonesia Menuju 2025–2045</i>	<i>h. 89</i>
 BAGIAN IV – STRUKTUR SOSIAL, KERENTANAN, DAN IDENTITAS WARGA	
Pembangunan Manusia — <i>Kualitas Manusia Indonesia Sedang Bergerak Naik</i>	<i>h. 95</i>
Yang Tak Terlihat — <i>Disabilitas, Kekerasan, dan Tantangan Inklusivitas dalam Keluarga</i>	<i>h. 99</i>
Di Balik Setiap Nama — <i>Lika-Liku Negara Membangun Identitas Warga</i>	<i>h. 103</i>
Membaca IPBK 2024 — <i>Keberlanjutan Melesat, Inklusivitas Tertinggal</i>	<i>h. 107</i>
Kesadaran Kependudukan — <i>Antara Harapan Baru dan Kesenjangan Lama</i>	<i>h. 111</i>
 BAGIAN V – KELUARGA: INTI DARI SEGALA PEMBANGUNAN INDONESIA	
Keluarga Indonesia — <i>Mengukur Lompatan Baru Pembangunan Keluarga</i>	<i>h. 117</i>
Menuju Generasi Emas — <i>Lomba Besar Indonesia yang Mulai Membuahkan Hasil</i>	<i>h. 121</i>
Usia Kawin Pertama — <i>Apa Artinya bagi Bonus Demografi Indonesia?</i>	<i>h. 125</i>
Pernikahan Dini — <i>Mengurai Akar Masalah dan Jalan Keluar</i>	<i>h. 129</i>
Rumah Masa Depan — <i>Menuju Rumah Indonesia yang Lebih Sehat dan Aman</i>	<i>h. 133</i>





Prolog

Di Ambang Gerbang Masa Depan.

Indonesia sedang berdiri di sebuah persimpangan sejarah. Dengan lebih dari 280 juta jiwa yang tersebar dari kota padat hingga desa terpencil, dari pesisir hingga dataran tinggi, bangsa ini tengah mengalami perubahan demografi yang bersemangat. Struktur penduduk bergeser cepat: kelompok usia muda menyusut, usia produktif mencapai puncaknya, sementara populasi lanjut usia tumbuh lebih pesat dari prediksi awal. Perubahan ini bukan sekadar statistik, ia merambat ke dapur rumah tangga, lorong pabrik, ruang kelas sekolah, hingga jalur urbanisasi.

Di tengah derasnya arus mobilitas, digitalisasi, dan perubahan nilai sosial, Indonesia harus menjawab pertanyaan mendasar: apa makna menjadi bangsa besar ketika struktur penduduk ikut berubah? Bonus demografi, peluang yang hanya datang sekali dalam sejarah sebuah negara, sedang berada di ambang pintu. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Indonesia juga memasuki era populasi menua, yang menuntut sistem kesehatan lebih kuat, perlindungan sosial lebih kokoh, dan keluarga yang jauh lebih resilien. Semua dinamika

ini berkaitan dengan kesenjangan layanan dasar, kualitas hunian, akses pendidikan, serta identitas hukum yang belum sepenuhnya merata. Mereka memengaruhi cara keluarga merawat anak, mengasuh orang tua, mengambil keputusan ekonomi, hingga merencanakan masa depan yang lebih baik.

Indonesia bukan hanya sebagai angka dalam tabel demografi, tetapi sebagai kisah tentang manusia, tentang jutaan keluarga yang hidup dalam pusaran perubahan. Buku ini berupaya menelusuri lanskap demografi yang baru, membaca peluang sekaligus tantangan, dan merangkai satu pertanyaan besar: siapakah Indonesia memasuki masa depan emas?



Dr. H. Winaji, S.Ag., M.Pd, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /Kepala BKKBN.





Prolog

Menuju Indonesia yang Berdaya dan Setara.

UNFPA dengan senang hati menyambut terbitnya buku ini, sebuah tinjauan yang komprehensif mengenai dinamika demografi Indonesia pada momen penting dalam lintasan pembangunannya. Pada 2025, Indonesia berada di persimpangan antara bonus demografi yang berkepanjangan dan transisi menuju penduduk menua, sebuah pergeseran yang menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan kebijakan yang memerlukan pengelolaan yang cermat dan berorientasi ke depan.

Perkembangan ini menegaskan perlunya kebijakan yang adaptif dan berbasis bukti agar setiap individu pada seluruh tahapan kehidupan dapat berkembang. Memperkuat modal manusia, memajukan kesetaraan gender, mendukung ketahanan keluarga, dan membangun sistem perlindungan sosial yang inklusif merupakan komponen penting dalam menavigasi transisi demografi ini.

Prioritas-prioritas tersebut selaras dengan mandat UNFPA untuk mempromosikan kesehatan dan hak-hak seksual dan reproduksi, kesetaraan gender,

serta pembangunan yang berpusat pada manusia. UNFPA memandang lanskap demografi Indonesia sebagai peluang untuk memperkuat ketahanan demografis, sehingga bangsa dapat merespons perubahan struktur penduduk secara efektif sambil memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal.

Kami berharap buku ini dapat menjadi rujukan strategis bagi para pembuat kebijakan nasional dan daerah dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap realitas demografi saat ini dan tren masa depan, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan visi Indonesia Emas 2045.

Hassan Mohtashami

Representatif UNFPA Indonesia





By reallygreatsite



Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN



Bagian 1

PETA BESAR DEMOGRAFI INDONESIA

Indonesia sedang berada di fase penting: populasi besar dan usia produktif yang melimpah memberi keuntungan, meski penuaan penduduk mulai mendekat. Untuk memahami masa depan bangsa, kita harus membaca ulang lanskap demografi dari ketinggian—melihat struktur usia, arus perubahan, dampak iklim, hingga peluang bonus demografi yang mulai menyempit. Inilah fondasi yang menentukan apakah Indonesia mampu melompat maju di tengah perubahan dunia.



Memasuki Demografi Baru

Indonesia Menghadapi Tikungan Demografi Terbesar.

Di banyak negara dunia, perubahan demografi bergerak pelan seperti musim yang datang berganti. Namun, Indonesia sedang mengalami sesuatu yang berbeda. Dalam beberapa dekade terakhir, struktur penduduk negeri ini berubah jauh lebih cepat daripada yang dialami negara-negara maju pada masa transisi mereka. Tahun 2025 menjadi penanda penting: jumlah penduduk mencapai estimasi 284 juta jiwa, dan angka sebesar itu bukan hanya kumpulan individu, melainkan fondasi dari semua agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Di balik angka ini terdapat kekuatan, peluang, sekaligus tantangan besar yang harus direspons dengan kebijakan tepat waktu.

Salah satu kisah paling signifikan dalam sejarah pembangunan Indonesia adalah keberhasilan menurunkan angka kelahiran. Perubahan ini bukan terjadi dalam hitungan bulan, tetapi merupakan akumulasi panjang dari program keluarga berencana, perbaikan akses kesehatan, dan meningkatnya pendidikan

perempuan. Dari perspektif data, Indonesia dapat bernafas lega karena *Total Fertility Rate* (TFR) telah menurun menjadi 2,11 kelahiran per perempuan (2024), mendekati angka penggantian penduduk sebesar 2,1. Capaian ini mencerminkan masyarakat yang semakin mampu mengatur jumlah anak sesuai sumber daya dan kondisi keluarga.

Namun, di balik angka nasional yang tampak meyakinkan itu, terdapat variasi yang sangat lebar antardaerah. DKI Jakarta, misalnya, memiliki TFR paling rendah, yakni 1,82. Bandingkan dengan Nusa Tenggara Timur yang masih mencapai 2,71. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak bergerak serempak. Ada wilayah yang sudah memasuki era keluarga kecil dan modern, sementara sebagian lainnya masih berada dalam pola lama. Perbedaan ini bukan sekadar statistik, tetapi cerminan ketidaksetaraan akses layanan, pendidikan, dan peluang ekonomi. Kesenjangan ini harus segera dijembatani demi kemajuan yang terukur.

Tren positif juga tampak pada penurunan angka kematian bayi dan ibu. Dalam sepuluh tahun terakhir, Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) turun secara signifikan (2010–2020), sebuah pencapaian penting bagi kesehatan masyarakat. Secara nasional, Angka Kematian Bayi menurun dari 26 menjadi 16,85 per 1000 kelahiran hidup. Tetapi cerita kembali tidak seragam. Jakarta memiliki angka kematian bayi sebesar 10,38, sementara Papua mencapai 38,17. Jurang serupa juga terlihat pada Angka Kematian Ibu. Secara nasional, Angka Kematian Ibu menurun dari 346 menjadi 189 per 100.000 kelahiran hidup. Di Jakarta, angkanya hanya 48, tetapi di Papua angkanya melonjak hingga 565. Perbedaan hampir sepuluh kali lipat ini mengingatkan bahwa sebagian wilayah masih berjuang keras dengan infrastruktur kesehatan dan akses pelayanan dasar.

Kemajuan-kemajuan tadi membentuk wajah baru struktur penduduk Indonesia. Dulu, Indonesia dikenal sebagai negara muda dengan proporsi besar anak-anak. Kini gambaran itu berubah. Penurunan fertilitas dan meningkatnya harapan hidup membuat jumlah penduduk usia anak semakin kecil, sementara populasi lanjut usia meningkat dengan cepat. Indonesia memasuki tahap transisi demografi lanjutan, sebuah fase di mana format populasi lebih menyerupai negara-negara maju yang mengalami penuaan penduduk.

Perubahan ini membawa dua sisi. Di satu sisi, penurunan jumlah anak dan meningkatnya produktivitas usia kerja dapat memperkuat daya saing ekonomi. Di sisi lain, peningkatan jumlah penduduk lansia berarti sistem kesehatan, jaminan sosial, dan struktur pasar kerja harus beradaptasi dengan cepat.

Tantangannya bukan hanya menyediakan fasilitas yang memadai, tetapi juga memastikan bahwa struktur ekonomi mampu menyerap tenaga kerja dengan efisien, tanpa meninggalkan kelompok yang rentan.

Masalah besar lain yang tidak dapat diabaikan adalah ketimpangan kualitas sumber daya manusia antardaerah. Beberapa provinsi menikmati akses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga yang relatif baik. Sementara itu, provinsi lain masih terhambat oleh geografi, kemiskinan, serta kurangnya tenaga kesehatan dan infrastruktur sosial. Persebaran penduduk yang tidak merata juga menambah kompleksitas. Konsentrasi penduduk di Jawa, misalnya, menciptakan tekanan besar terhadap ruang kota, perumahan, air bersih, dan layanan publik. Sementara daerah luar Jawa menghadapi tantangan sebaliknya: wilayah luas

Dulu, Indonesia dikenal sebagai negara muda dengan proporsi besar anak-anak. Kini gambaran itu berubah. Penurunan fertilitas dan meningkatnya harapan hidup membuat jumlah penduduk usia anak semakin kecil.

dengan penduduk relatif sedikit, sehingga layanan menjadi mahal dan sulit dijangkau.

Di tengah perubahan besar ini, ketersediaan data yang akurat menjadi salah satu penentu apakah kebijakan dapat berjalan efektif. Indonesia memiliki banyak sumber data, dari sensus hingga survei rutin, tetapi integrasi antarsumber masih belum optimal. Ketika data tidak terhubung secara baik, kebijakan cenderung terlambat atau tidak tepat sasaran. Padahal, dinamika demografi berubah begitu cepat sehingga negara tidak punya ruang untuk kesalahan arah.

Untuk menjawab tantangan itu, Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) hadir sebagai peta jalan nasional. GDPK membantu merumuskan kebijakan lintas sektor melalui lima pilar: pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran, serta penataan administrasi kependudukan. Dokumen besar ini bukan hanya pedoman teknis, tetapi juga landasan untuk memastikan bahwa setiap perubahan demografi ditangani secara terstruktur, terukur, dan konsisten dari pusat hingga daerah.

Laporan Kependudukan Indonesia (LKI) kemudian menjadi instrumen pemantau yang memastikan arah kebijakan tetap sejalan dengan dinamika terbaru. Laporan ini mencatat tren penduduk, struktur umur, migrasi, kualitas keluarga, hingga ketimpangan wilayah. Semua informasi itu penting agar pemerintah dapat merumuskan intervensi yang lebih akurat dalam menjalankan RPJMN 2025–2029.

Perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 bergantung pada kemampuan negara membaca dan mengelola perubahan demografi. Bonus demografi

Sorotan Angka Kunci Demografi Indonesia 2025



Populasi
284,4 juta

Proporsi
Lansia
11,93%



Angka Kematian Ibu
189/100.000



Angka Kematian Bayi
16,85/1000

**Perjalanan menuju
Indonesia Emas 2045
bergantung pada
kemampuan negara
membaca dan mengelola
perubahan demografi.**

bukanlah hadiah otomatis; ia adalah peluang yang hanya dapat dimanfaatkan jika dikelola dengan cermat. Di tengah tantangan yang besar, dari ketimpangan wilayah hingga penuaan penduduk, satu hal tetap pasti: keberhasilan Indonesia terletak pada kemampuannya memandang penduduk bukan sebagai beban statistik, melainkan sebagai kekuatan utama pembangunan. Jika transformasi ini terus diarahkan dengan kebijakan berbasis data, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan masa depan sebagai ruang tumbuh bagi semua generasi. ✨



Di Balik 284 Juta Jiwa

Saat Bentuk Piramida Penduduk Mulai Berubah.

Perubahan struktur umur memberikan gambaran penting tentang kebutuhan pembangunan di masa depan. Selama beberapa dekade, piramida penduduk Indonesia dikenal lebar di dasar dan mengerucut di puncaknya, gambaran klasik negara berkembang dengan angka kelahiran tinggi. Namun bentuk itu perlahan berubah. Dasarnya mulai mengecil, sementara bagian tengahnya membesar. Negara ini sedang memasuki fase ketika struktur umur penduduk menjadi jauh lebih seimbang dibandingkan masa lalu.

Transisi demografi ini membawa dua sisi mata uang: peluang besar sekaligus tantangan yang tidak ringan. Bagi banyak negara, fase ini adalah titik krusial yang menentukan apakah bonus demografi dapat dimanfaatkan atau justru berlalu tanpa jejak. Bagi Indonesia, momentum ini sedang berada di titik kritis. Perubahan besar dapat dilihat dari perjalanan panjang pertumbuhan penduduk Indonesia. Pada awal 1960-an, jumlah penduduk belum mencapai seratus juta. Kini, proyeksi menunjukkan bahwa

pada pertengahan abad ini, angka tersebut dapat melampaui tiga ratus juta. Meski jumlahnya terus bertambah, laju pertumbuhan penduduk terus melambat dari waktu ke waktu. Dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan populasi bergerak menuju stabilitas, sebuah tanda bahwa keluarga Indonesia semakin teratur dalam merencanakan jumlah anak dan masa depan mereka.

Transformasi ini juga tampak dari bentuk piramida penduduk yang tak lagi ekspansif. Proporsi penduduk muda menurun, sementara kelompok usia produktif berada pada porsi yang paling besar dalam sejarah. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berada pada puncak periode bonus demografi: saat di mana jumlah warga usia kerja lebih besar dibandingkan kelompok usia bergantung.

Dalam konteks global, situasi ini bukan fenomena lokal. Laporan *State of World Population* menegaskan bahwa perlambatan pertumbuhan penduduk dunia merupakan cerminan keberhasilan pembangunan manusia, meningkatnya pendidikan, membaiknya

kesehatan reproduksi, serta makin terbukanya peluang ekonomi bagi perempuan. Indonesia bergerak dalam arus yang sama, memetik hasil dari investasi selama puluhan tahun dalam pendidikan dan kesehatan.

Salah satu pendorong utama perubahan bentuk piramida penduduk adalah penurunan angka kelahiran. Sejak awal pelaksanaan program Keluarga Berencana pada 1970-an, jumlah anak yang dilahirkan perempuan Indonesia terus menurun secara konsisten. Dari rata-rata lima hingga enam anak per perempuan pada dekade 1970-an, jumlah itu kini hanya sekitar dua. Penurunan besar ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia terjadi bersamaan dengan meningkatnya pendidikan, terbukanya partisipasi perempuan di dunia kerja, hingga perubahan nilai keluarga modern yang lebih rasional dalam merencanakan masa depan.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Korea Selatan, Jepang, dan China berada pada fase penurunan kelahiran yang jauh lebih ekstrem, bahkan mencapai titik di mana upaya pemerintah untuk menaikannya kembali tidak membuahkan hasil. Namun Indonesia berada pada titik yang unik: penurunan kelahiran berjalan stabil dan tetap memungkinkan struktur penduduk yang sehat untuk beberapa dekade ke depan.

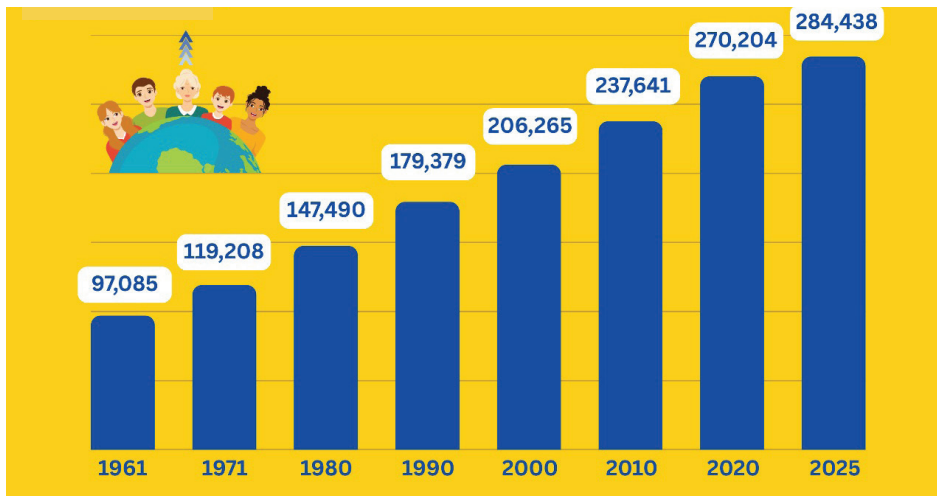
Efek dari penurunan kelahiran juga terlihat jelas pada alokasi sumber daya negara. Dengan jumlah anak yang tidak lagi setinggi dulu, tekanan terhadap sistem pendidikan dan kesehatan anak berkurang. Pemerintah dapat menggeser fokus ke peningkatan kualitas, bukan hanya kuantitas, melalui investasi

di bidang teknologi, inovasi, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Namun keberhasilan ini bukan tanpa tantangan. Penurunan kelahiran yang berlangsung konsisten, ditambah meningkatnya usia harapan hidup, mem-perbesar proporsi penduduk lanjut usia dari waktu ke waktu. Inilah awal dari fenomena penuaan penduduk, sesuatu yang kini mulai terasa di banyak kota besar. Dalam beberapa dekade ke depan, Indonesia harus dihadapkan pada realitas bahwa kelompok usia tua akan tumbuh lebih cepat dibandingkan kelompok usia muda.

Penuaan penduduk memiliki implikasi besar terhadap sektor ketenagakerjaan, sistem kesehatan, dan jaminan sosial. Negara harus bersiap memastikan keseimbangan antara produktivitas penduduk usia kerja dan kesejahteraan kelompok usia lanjut. Perencanaan sejak dini dapat membantu mengurangi tekanan fiskal dan memastikan kesejahteraan seluruh kelompok usia.

Kondisi kesehatan ibu dan bayi juga menjadi bagian penting dalam kisah demografi Indonesia. Dalam satu dekade terakhir, Angka Kematian Bayi menurun dari 26 menjadi 16,85 per 1.000 kelahiran hidup (2010-2020). Angka Kematian Ibu juga turun dari 346 menjadi 189 per 100.000 kelahiran hidup (2010- 2020). Meski begitu, target pembangunan global menginginkan angka yang jauh lebih rendah lagi pada 2030, sehingga kerja keras pada aspek layanan kesehatan ibu-anak masih menjadi agenda besar. Tantangan kesenjangan wilayah pun masih nyata. Beberapa provinsi mencatat Angka Kematian Bayi jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi maju,



Sumber: BPS, Hasil LongForm SP 2020 dan Proyeksi Penduduk 2025.

menunjukkan betapa tidak meratanya akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Sebagai contoh, Di Papua, Angka Kematian Bayi masih mencapai 38 per 1.000 kelahiran hidup, jauh lebih tinggi dibanding DKI Jakarta yang hanya 10 per 1.000. Ini berarti bahwa upaya penurunan kematian ibu dan bayi tidak bisa lagi bersifat nasional semata, tetapi harus diarahkan secara lebih spesifik pada daerah-daerah tertinggal.

Dengan dominasi penduduk usia kerja yang masih berlangsung hingga pertengahan 2030-an, Indonesia berada pada masa keemasan untuk meningkatkan produktivitas nasional. Lebih sedikit anak dalam keluarga memungkinkan lebih banyak anggota keluarga memasuki pasar kerja, memulai usaha, atau meningkatkan keterampilan. Konsumsi rumah tangga meningkat dan menggerakkan ekonomi. Namun semua potensi itu hanya akan menjadi kenyataan jika kualitas sumber daya manusia benar-benar diprioritaskan.

Indonesia berada dalam periode bonus demografi sejak 2012 dan diperkirakan mencapai puncaknya sekitar tahun 2035. Transisi demografi Indonesia adalah cermin dari perubahan sosial besar yang telah terjadi dalam 50 tahun terakhir. Ini adalah tanda kedewasaan masyarakat dalam menentukan arah hidup mereka, berapa anak yang ingin dimiliki, bagaimana menata kesejahteraan keluarga, dan bagaimana merencanakan masa depan. Tantangannya kini adalah memastikan bahwa setiap penduduk, berapa pun usianya, dapat tumbuh sehat, berpendidikan, dan berdaya. Karena pada akhirnya, kekuatan sebuah bangsa bukan hanya ditentukan oleh jumlah penduduknya, tetapi oleh kualitas manusianya. Dan di tengah transisi demografi yang berlangsung cepat, kualitas itulah yang akan menentukan masa depan Indonesia. ☸



Bonus atau Beban?

Mengurai Peluang di Balik Ledakan Penduduk Produktif.

Di tengah perubahan ekonomi, teknologi, dan pola hidup masyarakat, dinamika penduduk Indonesia menjadi cermin yang paling jujur tentang arah bangsa. Setiap kelahiran baru, setiap perpindahan penduduk, hingga perubahan struktur umur menyusun lanskap sosial yang menentukan kebutuhan layanan publik, daya saing ekonomi, dan ketahanan keluarga. Karena itu, memahami pola pertumbuhan dan pergeseran demografi bukan sekadar membaca angka, tetapi membaca masa depan Indonesia.

Indonesia tumbuh, bergeser, dan terkadang mengejutkan, bukan hanya karena besarnya jumlah warganya, tapi juga karena kecepatan perubahan yang terjadi dalam hitungan dekade. Data sensus menggambarkan loncatan demografis yang nyata: pada tahun 2000 populasi tercatat sekitar 206 juta, sementara dua dekade kemudian angka itu melambung menjadi 270 juta. Artinya dalam 20

tahun terjadi penambahan sekitar 63 juta jiwa, rata-rata sekitar 3,2 juta orang setiap tahun, sebuah laju yang menegaskan bahwa dinamika penduduk Indonesia masih bergerak cepat.

Lonjakan itu berlanjut. Perkiraan untuk 2025 mencatat populasi mencapai sekitar 284,4 juta orang, bertambah lebih dari 14 juta jiwa sejak 2020. Jika dilihat dari laju penambahan, periode 2020–2025 menunjukkan penurunan laju pertumbuhan penduduk, yang disebabkan faktor kelahiran, kematian serta migrasi. Adapun utamanya karena keberhasilan program Keluarga Berencana.

Keberlanjutan pertumbuhan ini tidak terjadi seragam di seluruh negeri. Pulau Jawa masih menampung sebagian besar warga negara, sementara Papua menjadi contoh kontrastif, hanya menyumbang sebagian kecil dari total penduduk. Di level provinsi, tiga provinsi terpadat masing-masing melebihi angka 10 juta jiwa: Jawa Barat, Jawa Timur,

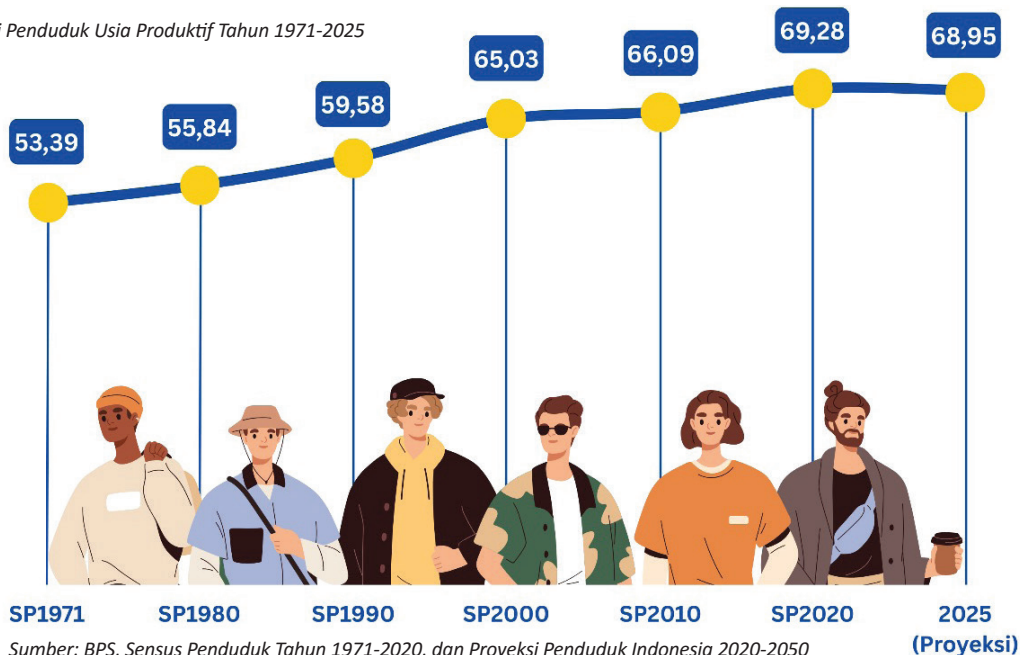
dan Jawa Tengah. Di sisi lain ada provinsi-provinsi dengan jumlah penduduk sangat kecil, seperti Kalimantan Utara, Papua Raya, dan Gorontalo, yang menuntut pendekatan berbeda dalam kebijakan pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi.

Komposisi demografi juga mengandung pesan penting. Rasio jenis kelamin nasional menunjukkan sedikit keunggulan jumlah laki-laki, sekitar 102 laki-laki untuk setiap 100 perempuan, tetapi variasi provinsi cukup luas. Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur justru mencatat rasio di bawah 100, sementara beberapa provinsi di kawasan timur, termasuk wilayah Pegunungan Papua dan Kalimantan Utara, mencatat rasio yang jauh lebih tinggi. Migrasi dan pola pekerjaan antardaerah menempel pada angka-angka ini; provinsi yang menjadi pengirim

migran cenderung menampilkan komposisi gender yang berbeda akibat keluarnya banyak pekerja laki-laki untuk mencari nafkah di luar daerah.

Bentuk piramida penduduk Indonesia pada umumnya masih merefleksikan negara dengan basis muda: proporsi usia anak-anak besar, sementara kelompok usia produktif menonjol di bagian tengah. Pada 2020, kelompok usia 15–64 tahun menyumbang sekitar 69,3 persen dari total, dan estimasi 2025 sebesar 68,95, sedikit menurun tetapi masih berada pada kisaran yang mendekati level itu, tanda bahwa Indonesia sedang menikmati kuantitas usia kerja yang besar. Inilah modal yang disebut bonus demografi: peluang ekonomi bila tenaga kerja produktif dibekali keterampilan yang tepat dan tersedia lapangan kerja berkualitas.

Proporsi Penduduk Usia Produktif Tahun 1971-2025



Namun indikator yang menyertai kesempatan itu, *dependency ratio*, mengingatkan tentang beban yang harus dikelola. Diperkirakan pada 2024 rasio ketergantungan berada di kisaran 44,8 persen, turun signifikan dari lebih dari 51 persen pada 2010. Secara sederhana, setiap 100 orang usia produktif kini “menopang” sekitar 44–45 orang yang belum atau sudah tidak produktif. Penurunan rasio ini memberi ruang fiskal dan sosial untuk investasi lebih besar pada pendidikan, kesehatan, dan produktivitas, selama kebijakan memanfaatkan momentum tersebut.

Perbedaan antarprovinsi juga nyata pada tingkat rasio ketergantungan: beberapa provinsi menikmati angka rendah, membuka peluang percepatan ekonomi lokal, sedangkan provinsi lain masih berada di atas ambang 50 persen. Nusa Tenggara Timur, misalnya, mencatat rasio yang relatif tinggi, bagian dari gambaran lebih luas bahwa kebijakan lokal perlu disesuaikan untuk mempercepat perubahan struktur umur melalui layanan keluarga berencana, pendidikan, dan peningkatan akses ekonomi.

Dalam praktiknya, memetik manfaat demografi memerlukan tiga hal yang saling terkait. Pertama, kesempatan kerja harus tersedia dan berkualitas, bukan sekadar lapangan kerja, tetapi pekerjaan yang produktif, aman, dan bernilai tambah. Kedua, pendidikan dan pelatihan harus relevan: keterampilan vokasi dan pelatihan berbasis kebutuhan industri menjadi jembatan agar angkatan kerja tidak hanya banyak, tetapi juga kompetitif. Ketiga, distribusi pembangunan harus diatur agar pulau dan provinsi yang selama ini tertinggal dapat mempercepat kapasitasnya menampung dan mengoptimalkan

tenaga kerja lokal sehingga arus migrasi menjadi pilihan strategis, bukan pelarian semata.

Perencanaan wilayah menjadi kunci: kota-kota besar, yang menyerap banyak migran, perlu infrastruktur dan layanan publik yang *resilient*; kota menengah dan kawasan perdesaan memerlukan dorongan investasi yang menumbuhkan industri lokal dan meningkatkan kualitas hidup. Di sini, data sensus dan analitik terkini berperan penting untuk menargetkan intervensi, dari pendidikan dasar hingga program vokasi dan penempatan tenaga kerja.

Indonesia sedang berada di persimpangan peluang demografis: angka-angka besar menyiratkan potensi ekonomi yang nyata, tetapi juga menuntut kebijakan yang terukur dan responsif. Dengan menyinergikan upaya peningkatan kualitas SDM, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan layanan, lonjakan penduduk bukan hanya tantangan administrasi. Ia adalah modal kolektif yang, bila dikelola dengan cermat, dapat menjadi mesin penggerak kemajuan ekonomi dan sosial bangsa, menuju masa depan yang lebih sejahtera bagi seluruh wilayah Nusantara.

Arah perjalanan demografi Indonesia akan sangat ditentukan oleh ketepatan langkah hari ini: bagaimana pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat memandang pertumbuhan penduduk bukan sebagai angka statis, melainkan sebagai dinamika hidup yang memerlukan strategi jangka panjang. Jika momentum bonus demografi mampu dijaga secara konsisten, Indonesia tidak hanya akan menempuh jalur pertumbuhan yang lebih inklusif, tetapi juga memperkuat fondasi ketahanan sosial dan ekonomi untuk menghadapi ketidakpastian global. ✨



Kita dan Cuaca

Di Tengah Iklim yang Berubah, Indonesia Melangkah Maju.

Perubahan iklim kini menjadi bagian dari realitas sehari-hari penduduk Indonesia. Cuaca yang semakin panas, musim yang bergeser, dan pesisir yang perlahan tergerus air laut bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga dinamika manusia. Perubahan ini memengaruhi di mana masyarakat memilih tinggal, di sektor apa mereka bekerja, serta bagaimana kota dan desa berkembang. Di tengah perubahan global yang cepat, penduduk Indonesia menunjukkan kemampuan beradaptasi yang semakin kuat.

Observasi kependudukan menunjukkan bahwa mobilitas penduduk tidak lagi digerakkan oleh motif ekonomi saja. Perubahan iklim menambah lapisan baru dalam keputusan migrasi. Kenaikan muka air laut di pesisir utara Jawa, misalnya, mendorong sebagian keluarga untuk pindah ke wilayah yang lebih aman. Begitu pula di daerah pertanian kering, produktivitas yang menurun membuat banyak warga beralih ke sektor jasa dan manufaktur di kota. Perpindahan ini memperlihatkan bagaimana perubahan iklim mempercepat arus urbanisasi.

Migrasi ekologis memperkaya warna dinamika kependudukan Indonesia. Orang bergerak membawa ide, keterampilan, dan energi baru ke kota-kota penerima migrasi. Tantangannya terletak pada bagaimana kota-kota besar menyiapkan ruang hidup yang memadai. Kepadatan penduduk, kebutuhan air bersih, hingga meningkatnya aktivitas ekonomi menuntut perencanaan yang lebih adaptif. Dengan data migrasi dari Long Form Sensus Penduduk 2020, kota-kota kini memiliki dasar yang lebih kuat untuk memetakan kebutuhan pelayanan publik dan tata ruang masa depan.

Di daerah asal, perubahan pola migrasi ini juga membuka peluang transformasi. Daerah pesisir dan pertanian mulai merancang strategi pembangunan berbasis ketahanan iklim, dari diversifikasi mata pencaharian hingga peningkatan infrastruktur adaptif. Desa dan kota menengah, bila dikembangkan secara tepat, berpotensi menjadi pusat pertumbuhan baru yang memperkuat pemerataan pembangunan di tengah tekanan iklim.

Dalam jangka panjang, perubahan iklim tidak hanya mendorong mobilitas, tetapi juga mempengaruhi struktur ketenagakerjaan. Sektor pertanian yang rentan terhadap perubahan cuaca mendorong tenaga kerja muda beralih ke industri dan jasa. Pergeseran ini membuka ruang bagi peningkatan produktivitas nasional, terutama bila disertai pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan. Sementara itu, kota-kota tujuan migrasi dapat tumbuh sebagai pusat ekonomi baru yang dinamis apabila dilengkapi layanan dasar yang kuat.

Melalui penyelarasan kebijakan, perubahan iklim dan dinamika penduduk dapat dikelola secara seimbang. Pemerintah mulai mengintegrasikan data migrasi dengan perencanaan tata ruang, memperkuat pembangunan kota menengah, dan mendorong ketahanan wilayah rentan melalui program pemberdayaan. Langkah-langkah ini memberi fondasi kuat bagi pengelolaan penduduk yang adaptif di tengah perubahan iklim global.

Di luar tantangan ekologis, pembangunan manusia Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 75,02 pada tahun 2024, menandai posisi Indonesia dalam kategori “tinggi”. Seluruh komponen IPM mengalami peningkatan. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada 2024 memiliki harapan hidup 74,15 tahun, meningkat 0,22 tahun dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan penguatan layanan dasar, perluasan akses kesehatan, dan kampanye gizi yang semakin efektif.

Pada dimensi pendidikan, penduduk usia 7 tahun kini memiliki Harapan Lama Sekolah 13,21

Di luar tantangan ekologis, pembangunan manusia Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 75,02 pada tahun 2024.

tahun, naik 0,06 tahun dibandingkan 2023. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas juga meningkat dari 8,77 menjadi 8,85 tahun, sebuah capaian yang mencerminkan makin luasnya akses pendidikan menengah dan peluang pendidikan tinggi. Dengan bertambahnya rata-rata lama sekolah secara konsisten, kesempatan generasi muda untuk memperoleh pekerjaan berkualitas semakin terbuka.

Kenaikan standar hidup layak juga terlihat jelas. Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan meningkat Rp 422 ribu atau 3,71 persen selama 2024. Dalam rentang 2020–2024, peningkatan ini bahkan mencapai hampir Rp 1,33 juta, dari Rp 11,013 juta menjadi Rp 12,341 juta. Angka-angka ini menunjukkan daya beli masyarakat yang semakin kuat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Kemajuan IPM juga terjadi secara geografis. Sulawesi Barat naik ke kategori “tinggi” dengan nilai 70,46, sementara Papua Tengah naik ke kategori “sedang”. Kini terdapat 30 provinsi dengan status “tinggi”, 5 provinsi berstatus “sedang”, dan hanya 1 provinsi yang berstatus “rendah”. DKI Jakarta dan

DI Yogyakarta tetap berada pada kategori “sangat tinggi”. Peta ini memperlihatkan peningkatan kualitas hidup yang semakin merata di berbagai wilayah.

Meskipun disparitas masih ada, tren peningkatan IPM perempuan dan anak menunjukkan kemajuan yang menjanjikan. Penguatan perlindungan sosial, akses pendidikan perempuan, serta perluasan lapangan kerja ramah perempuan berpotensi mempercepat kesetaraan dalam beberapa tahun ke depan.

Percepatan digitalisasi menjadi salah satu faktor pendorong utama perubahan positif dalam pembangunan manusia. Transformasi digital berjalan melalui tiga jalur: pelayanan publik, ekonomi digital, dan literasi masyarakat. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) membuat layanan administrasi semakin cepat dan transparan. Di bidang ekonomi, pertumbuhan *e-commerce*, *fintech*, dan UMKM berbasis digital menciptakan peluang baru bagi jutaan warga. Sementara itu, literasi digital yang terus dikembangkan membantu masyarakat memasuki dunia kerja modern yang semakin berbasis teknologi.

Digitalisasi membuka jalan bagi pemerataan. Program seperti pembangunan satelit Satria mem-

perluas akses internet ke daerah terpencil, sementara Gerakan Literasi Digital membekali masyarakat dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk tetap relevan dalam ekonomi digital. Dengan fondasi digital yang semakin kuat, peluang usaha, pekerjaan fleksibel, dan inovasi lokal tumbuh lebih cepat.

Di tengah seluruh dinamika ini, pembangunan berkelanjutan menjadi benang merah yang menyatukan upaya nasional. Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dalam RPJMN memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan selaras dengan perlindungan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia memperluas pembangunan tanpa mengorbankan alam maupun kesejahteraan generasi mendatang.

Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil semakin memainkan peran penting. Penguatan kapasitas daerah, pemanfaatan data yang lebih baik, dan inovasi kebijakan di berbagai sektor membuka ruang bagi pembangunan yang lebih adil dan merata.

Indonesia sedang berada pada fase transisi yang unik: menghadapi perubahan iklim global, mempercepat digitalisasi, sekaligus meningkatkan kualitas manusia. Tantangannya besar, tetapi peluang yang terbuka jauh lebih besar. Dengan kemampuan beradaptasi yang terus meningkat dan pembangunan manusia yang bergerak positif, Indonesia memiliki modal kuat untuk menapaki masa depan sebagai negara yang tangguh secara ekologis, unggul secara ekonomi, dan inklusif secara sosial. ✨

Penguatan perlindungan sosial, akses pendidikan perempuan, serta perluasan lapangan kerja ramah perempuan berpotensi mempercepat kesetaraan dalam beberapa tahun ke depan.



Masalah Orang Tua

Peluang Baru dalam Lajur Panjang Menuju 2045

Di berbagai daerah Indonesia, semakin mudah ditemukan lansia yang tetap aktif mengisi ruang kehidupan: duduk di kios kecil yang mereka kelola sejak muda, merapikan hasil kebun yang baru dipetik, menyapu halaman sambil menyapa tetangga, atau berjalan kaki ke balai desa untuk ikut rapat rutin. Mereka hadir bukan sebagai figur pasif yang menunggu hari, melainkan sebagai bagian hidup dari komunitas, mengajar mengaji, menjaga cucu, membantu hajatan, atau sekadar menjadi rujukan bijak ketika ada persoalan warga.

Pemandangan ini memberi isyarat bahwa Indonesia sedang berubah: bukan lagi negara yang sepenuhnya ditopang penduduk muda, melainkan bangsa yang sedang memasuki fase demografi baru, di mana kelompok lanjut usia tumbuh pesat, lebih sehat, dan tetap berkontribusi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Fenomena ini menuntut

cara pandang baru terhadap penuaan: bukan sebagai beban, tetapi sebagai transformasi besar yang akan membentuk wajah masa depan Indonesia.

Indonesia secara resmi telah memasuki fase *aging population*, sebuah kondisi ketika jumlah penduduk lanjut usia tumbuh semakin besar dibanding kelompok usia muda. Sesuai data LKI 2025, populasi berusia 60 tahun ke atas kini hampir mencapai 12 persen, proporsi yang membawa Indonesia mendekati struktur penduduk negara-negara berpendapatan menengah atas. Perubahan ini belum sampai pada puncaknya. Menurut proyeksi Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk lansia akan meningkat menjadi 65,82 juta jiwa pada 2045, atau sekitar 20,31 persen dari total penduduk. Dalam dua dekade ke depan, satu dari lima orang Indonesia akan berada pada kelompok usia lanjut. Penuaan penduduk merupakan hasil dari

kombinasi dua keberhasilan: meningkatnya angka harapan hidup dan menurunnya angka kelahiran. Namun, keberhasilan itu membawa konsekuensi. Semakin besar populasi lansia, semakin besar pula tuntutan terhadap layanan kesehatan, jaminan sosial, dan sistem perlindungan keluarga. Jika tidak dikelola dengan baik, penuaan penduduk dapat menimbulkan tekanan besar pada ekonomi. Namun jika dirancang secara strategis, kondisi ini dapat menjadi peluang, sering disebut sebagai bonus demografi kedua, yaitu fase ketika penduduk usia tua meningkat, tetapi tetap produktif secara ekonomi melalui tabungan, investasi, kesehatan yang baik, dan partisipasi kerja yang lebih panjang.

Tantangan utama terletak pada kualitas hidup lansia saat ini. Data terbaru LKI 2025 menunjukkan bahwa 20,71 persen penduduk lansia mengalami kesakitan dalam sebulan terakhir, dan 42,81 persen mengeluhkan masalah kesehatan. Banyak lansia menghadapi penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, dan gangguan sendi, yang memerlukan layanan kesehatan berkelanjutan. Tanpa intervensi yang tepat, bertambahnya populasi lansia dapat meningkatkan beban biaya kesehatan nasional dan memperbesar kerentanan keluarga berpenghasilan rendah.

Di sisi lain, lansia Indonesia tetap menunjukkan tingkat partisipasi ekonomi yang tinggi. Sekitar 55,32 persen penduduk lansia masih bekerja, dan menariknya, 84,75 persen dari mereka berada di sektor informal. Artinya, sebagian besar bekerja tanpa perlindungan seperti jaminan pensiun, asuransi kerja, atau cuti sakit. Lansia yang bekerja di sektor

informal sekaligus memperlihatkan ketangguhan dan kerentanan: mereka mampu tetap produktif, tetapi rentan terhadap fluktuasi pendapatan dan risiko kesehatan. Melihat kondisi tersebut, peran negara dalam menciptakan sistem pendukung menjadi krusial.

Beberapa tahun terakhir, pemerintah memperkuat program pemberdayaan lansia melalui inisiatif seperti SIDAYA (Lanjut Usia Berdaya). Program ini menekankan kesehatan lansia, partisipasi sosial, dan pendampingan jangka panjang. Kegiatan pemeriksaan kesehatan rutin, fasilitasi pembelajaran di Sekolah Lansia, dan dukungan perawatan membuat kelompok lanjut usia tidak sekadar menjadi penerima layanan, tetapi tetap menjadi bagian aktif dalam masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk menjamin kehidupan sehat dan sejahtera di semua usia.

Tantangan utama terletak pada kualitas hidup lansia saat ini. Data terbaru LKI 2025 menunjukkan bahwa 20,71 persen penduduk lansia mengalami kesakitan dalam sebulan terakhir, dan 42,81 persen mengeluhkan masalah kesehatan.

Namun, pemberdayaan membutuhkan fondasi kebijakan yang terintegrasi. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) menyediakan kerangka untuk memastikan bahwa isu lansia tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan pembangunan kualitas penduduk, penguatan keluarga, dan penataan layanan publik. GDPK menempatkan masa lanjut usia sebagai bagian dari siklus kehidupan yang utuh, sehingga strategi peningkatan kualitas penduduk tidak berhenti pada usia produktif, tetapi berlanjut hingga fase tua.

Selain kerangka besar, dibutuhkan pula pemahaman mendalam melalui data. Laporan Kependudukan Indonesia menjadi alat penting dalam menganalisis tren penuaan, kondisi sosial-ekonomi lansia, ketimpangan wilayah, hingga implikasi kebijakan untuk masa depan. Informasi ini sangat relevan dalam penyusunan RPJMN 2025–2029, terutama dalam menghadapi tantangan urbanisasi, mobilitas penduduk, perubahan nilai keluarga, dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan serta dunia kerja. Perubahan-perubahan ini memengaruhi struktur perawatan keluarga, aturan kerja, dan pola hidup masyarakat.

Isu penuaan penduduk juga tidak terlepas dari konteks kesetaraan gender. Di banyak rumah tangga, perempuan masih memikul peran utama sebagai pengasuh orang tua. Ketika jumlah lansia meningkat, tanggung jawab perawatan yang umumnya dipikul perempuan perlu mendapat dukungan sistemik. Karena itu, strategi pemberdayaan lansia perlu berjalan beriringan dengan upaya memperkuat peran perempuan agar tanggung jawab tersebut tidak ber-

lebih dan tetap proporsional. Penuaan penduduk bukanlah ancaman yang harus ditakuti, melainkan fase baru yang perlu dikelola. Lansia memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam banyak aspek: ekonomi kreatif, kewirausahaan skala kecil, pembinaan komunitas, pendidikan keluarga, hingga pelestarian budaya. Dengan kebijakan yang tepat, kelompok lanjut usia dapat menjadi kekuatan sosial yang memperkaya struktur masyarakat.

Indonesia sedang bergerak menuju masa depan yang berbeda dari masa lalu. Penuaan penduduk menuntut adaptasi, inovasi, dan keberanian untuk menata ulang sistem yang sudah ada. Jika kesehatan, pemberdayaan, dan dukungan sosial dapat diperkuat, Indonesia tidak hanya menjadi negara yang menua, tetapi negara yang matang, tempat di mana setiap usia memiliki ruang untuk tumbuh, berpartisipasi, dan dihargai. ✨

Isu penuaan penduduk juga tidak terlepas dari konteks kesetaraan gender. Di banyak rumah tangga, perempuan masih memikul peran utama sebagai pengasuh orang tua.



LAPORAN KHUSUS

NEGARA DAN LANSIA: PELUANG DAN TANTANGAN BONUS DEMOGRAFI KEDUA

Indonesia sedang berubah jauh lebih cepat dari yang kita kira. Jumlah lansia melonjak, keluarga mengecil, dan usia hidup makin panjang—membawa negeri ini memasuki babak baru yang akan mengubah cara kita bekerja, merawat, dan merancang masa depan. Apakah penuaan penduduk akan menjadi beban, atau justru peluang besar yang belum kita siapkan?







Masa Depan Lansia

Saat Indonesia Tak Lagi Muda, Potensi Baru Muncul.

Ada banyak orangtua yang tinggal sendiri di rumah-rumah yang dulu ramai oleh suara anak-anaknya. Di banyak sudut permukiman, mereka menjalani hari dengan ritme baru setelah keluarga tumbuh dan berpencar mengikuti pekerjaan atau kehidupan masing-masing. Gambaran semacam ini kini semakin sering terlihat di berbagai daerah di Indonesia. Negeri ini perlahan namun pasti bergerak menuju masyarakat menua

Data LKI menunjukkan bahwa sekitar 12 persen penduduk Indonesia kini adalah lansia. Angka ini akan melonjak tajam: pada tahun 2045, ketika negara merayakan seratus tahun kemerdekaan, satu dari lima orang Indonesia akan berusia 60 tahun ke atas. Yang mengejutkan, Indonesia menua jauh lebih cepat dibanding Jepang ketika memasuki fase serupa, bedanya, Jepang sudah menjadi negara kaya pada

saat itu, sementara Indonesia masih berada dalam proses membangun sistem perlindungan sosial dan kesehatan yang matang. Indonesia memasuki fase penuaan penduduk pada saat sistem perlindungan sosial masih dalam proses penguatan.

Proses penuaan ini digerakkan oleh tiga perubahan besar. Pertama, keluarga Indonesia makin kecil. Generasi muda menunda pernikahan dan kelahiran, dan sebagian memilih tidak punya anak. Perubahan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga mulai terlihat di daerah. Kedua, masyarakat hidup lebih lama berkat peningkatan layanan kesehatan dan menurunnya penyakit menular. Jika dulu angka harapan hidup masih di kisaran 50-an, kini banyak orang dengan mudah mencapai usia 70-an. Ketiga, perubahan ini merupakan bagian dari fenomena global. Asia Tenggara termasuk kawasan dengan



proses penuaan tercepat, dan Indonesia bergerak menuju struktur umur yang mirip Korea Selatan atau Thailand, tetapi tanpa kesiapan yang setara.

Ketika struktur usia berubah, cara hidup suatu bangsa ikut bergeser. Di bidang kesehatan, peningkatan jumlah lansia membuat penyakit kronis melonjak. Survei menunjukkan lebih dari separuh lansia hidup dengan hipertensi, diabetes, atau gangguan jantung. Banyak yang merasa sehat, tetapi penggunaan layanan kesehatan tetap meningkat. Sistem kesehatan yang kita miliki selama ini lebih fokus pada layanan kuratif, bukan perawatan jangka panjang atau pelayanan geriatri yang terintegrasi. Sementara itu, biaya kesehatan akan terus naik seiring bertambahnya usia penduduk.

Di kota-kota besar, tantangan lain muncul. Banyak ruang publik Indonesia tidak ramah lansia. Trotoar

tidak rata, halte tidak memiliki ramp, dan moda transportasi jarang memikirkan kebutuhan orang dengan mobilitas terbatas. Perumahan pun sering kali tidak dirancang untuk penghuni usia lanjut. Ketika populasi menua, semua ini akan menjadi masalah sehari-hari: bagaimana lansia berjalan aman, bepergian nyaman, dan tetap terhubung dengan kehidupan sosial di sekitar mereka.

Penuaan juga mengguncang struktur keluarga. Urbanisasi membuat anak-anak merantau jauh dari orang tua. Walaupun sebagian besar lansia masih tinggal bersama pasangan atau keluarga besar, tidak semua mendapatkan perawatan yang memadai. Waktu anak yang semakin terbatas, perempuan yang semakin memasuki pasar kerja, dan meningkatnya biaya hidup membuat perawatan lansia tidak lagi bisa mengandalkan keluarga sepenuhnya. Model

“orang tua dirawat di rumah” yang dulu dianggap norma mulai runtuh perlahan.

Secara ekonomi, perubahan ini juga menimbulkan tekanan baru. Indonesia selama puluhan tahun mengandalkan populasi muda yang melimpah sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Namun ketika jumlah penduduk usia produktif menurun, negara harus menghadapi realitas baru: siapa yang akan menopang beban fiskal? Siapa yang akan bekerja? Bagaimana dana pensiun dan layanan kesehatan dibiayai? Jika tidak diantisipasi, penuaan dapat menjadi “bom waktu ekonomi”.

Namun tidak semua kabar buruk. Justru di balik proses ini tersimpan peluang besar yang jarang dibicarakan. Dunia mengenal istilah “silver economy”, yakni pasar barang dan jasa yang ditujukan bagi lansia. Di Jepang dan Eropa, ekonomi perak menjadi penggerak pertumbuhan baru, dari kesehatan, wisata lansia, teknologi asistif, hingga produk gaya hidup. Bayangkan jika Indonesia dengan puluhan juta lansianya mampu mengembangkan pasar serupa. Potensinya luar biasa besar.

Selain itu, banyak lansia Indonesia sebenarnya masih sangat produktif. Survei menunjukkan bahwa lebih dari 75 persen lansia berminat mengikuti pelatihan baru, meski hanya sekitar 40 persen yang ingin kembali bekerja. Keinginan belajar seumur hidup ini membuka peluang untuk mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis komunitas, UMKM kecil, relawan kesehatan, dan berbagai aktivitas sosial lainnya. Di banyak RW, sudah terlihat lansia yang membuka usaha kecil-kecilan, mengajar, menjadi kader kesehatan, hingga memimpin kelompok hobi.

Mereka bukan beban; mereka adalah aset sosial.

Lebih jauh lagi, konsep “bonus demografi kedua” muncul ketika lansia yang sehat dan mandiri dapat berkontribusi ekonomi melalui tabungan, konsumsi, keterampilan, dan pengalaman kerja mereka. Dengan kata lain, usia tua tidak otomatis berarti ketergantungan. Jika kelompok usia lanjut tetap aktif, mereka justru bisa memperpanjang masa pertumbuhan ekonomi nasional.

Kisah-kisah tentang orang tua kita hanyalah permukaan dari perubahan besar yang sedang terjadi. Indonesia sedang menua, dan ini bukan isu yang bisa ditunda pembahasannya. Ia menyangkut masa depan kota kita, sistem kesehatan kita, kemampuan keluarga merawat anggotanya, hingga kemampuan negara menjaga stabilitas ekonomi.

Maka pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia menua, tetapi apakah kita siap menghadapinya. Kita perlu mengubah cara pandang: lansia bukan sekadar penerima bantuan, melainkan sumber daya yang kaya pengalaman. Kota-kota harus mulai dirancang untuk semua usia. Layanan kesehatan harus bergeser dari sekadar mengobati menjadi menjaga fungsi sepanjang hayat. Pelatihan dan pembelajaran harus tersedia sejak muda hingga tua. Dan keluarga, unit sosial paling dasar, harus diberi dukungan agar bisa terus merawat, bukan kewalahan.

Jika penuaan ini dikelola dengan cerdas, Indonesia bukan hanya menua, tetapi juga dewasa, matang, dan siap memasuki masa depan dengan lebih percaya diri. Yang tersisa hanyalah satu pertanyaan: apakah kita siap memanfaatkan peluang itu sebelum jendelanya tertutup? 🌸



Bonus Demografi Kedua

Ketika Usia Emas Bisa Menghasilkan Emas.

Ketika Indonesia memasuki era bonus demografi pertama dua dekade lalu, kita disuguhi cerita optimis tentang negara muda dengan tenaga kerja melimpah. Jalan-jalan penuh anak muda produktif, industri tumbuh, dan ekonomi diproyeksikan berlari kencang. Namun waktu tidak berhenti. Generasi yang dulunya memenuhi pabrik, kantor, dan ruang kelas itu kini menjadi orang tua dan bahkan lansia. Bonus pertama perlahan mendekati garis akhir; para demograf memperkirakan jendelanya bisa tertutup sekitar tahun 2039. Tapi yang jarang dibahas adalah satu kenyataan penting: Indonesia masih punya peluang kedua, peluang yang justru muncul ketika masyarakatnya menua.

Inilah konsep yang disebut bonus demografi kedua. Jika bonus pertama hadir karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, bonus kedua lahir dari sesuatu

yang berbeda: lansia yang tetap sehat, mandiri, punya keterampilan, dan memiliki tabungan. Penuaan yang selama ini kita bayangkan sebagai beban justru dapat berubah menjadi mesin ekonomi baru.

Gambaran sederhananya begini: ketika seseorang mencapai usia 60 tahun dalam kondisi sehat, mereka masih bisa bekerja paruh waktu, berwirausaha kecil, menjadi mentor bagi UMKM, atau berperan sebagai relawan komunitas. Ketika mereka berinvestasi, menabung, atau mengelola dana pensiun dengan cerdas, efeknya mengalir ke ekonomi nasional. Jika mereka tetap aktif berkegiatan, konsumsi mereka bertahan atau bahkan naik, dan itu menciptakan pasar baru. Maka di banyak negara, lansia bukan hanya warga senior, tetapi aktor ekonomi.

Bonus kedua muncul ketika usia emas benar-benar bisa menghasilkan “emas”. Itu bukan metafora;

negara seperti Jepang, Jerman, dan Korea Selatan kini mengandalkan konsumsi dan investasi lansia sebagai sumber pertumbuhan. Indonesia, dengan hampir 6 juta lansia hanya di Jawa Barat saja, memiliki skala peluang yang jauh lebih besar.

Kisah Jawa Barat memberi gambaran menarik tentang potensi tersebut. Dalam survei yang dilakukan terhadap ratusan lansia di Bandung Raya, satu temuan mencolok: sekitar 75 persen lansia ingin mengikuti pelatihan. Antusiasme ini muncul bukan karena mereka ingin kembali ke dunia kerja penuh waktu, tetapi karena ingin tetap relevan, aktif, dan mampu berkontribusi. Sebagian besar juga menilai kondisi kesehatan mereka baik dan merasa mandiri beraktivitas setiap hari. Modal sosial mereka kuat, lebih dari 93 persen merasa dihargai lingkungan sekitar dan didukung keluarga. Semangat untuk terus berkembang ini adalah fondasi penting bonus demografi kedua.

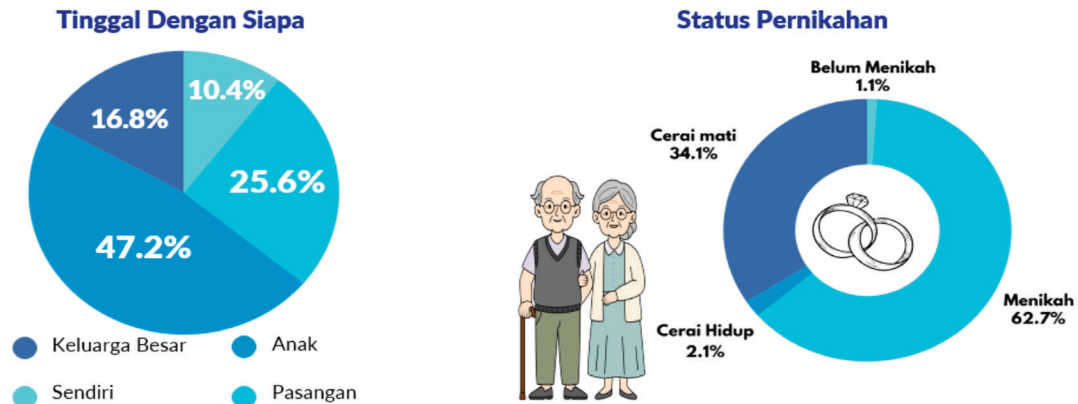
Ada tiga mesin besar yang bisa mengubah potensi itu menjadi kekuatan ekonomi nyata.

Mesin pertama adalah kesehatan yang dijaga sepanjang hayat. Banyak lansia akan tetap produktif jika kondisi fisiknya terpelihara. Di banyak puskesmas, program “Puskesmas Santun Lansia” sudah mulai berjalan. Posyandu Lansia hadir di berbagai RW, mengajak warga senior rutin memeriksa tekanan darah, gula darah, hingga kebugaran. Pemeriksaan dini seperti ini bukan hanya untuk mengobati, tetapi mencegah masalah yang bisa muncul di usia tua, dari yang tampak ringan seperti sakit lutut, hingga penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi. Lansia yang sehat lebih mudah bekerja, belajar,

bergerak, dan berpartisipasi dalam ekonomi pasar perak.

Mesin kedua adalah pembelajaran tanpa batas usia. Ini bukan konsep besar dari negara maju; ini sudah terjadi di depan mata. Sekolah Lansia tumbuh di banyak kota, diprakarsai organisasi masyarakat dan kini didukung pemerintah. Di desa dan kota, kelompok lansia berkumpul mengikuti kelas memasak, merajut, ecoprint, hingga kelas senam dan kesehatan mental. Bahkan ada kelas UMKM kecil dan kelas digital, di mana lansia belajar menggunakan gawai untuk berjualan atau bergabung dengan komunitas online. Banyak pra-lansia usia empat puluhan kini mulai mengikuti pelatihan berbasis teknologi seperti desain grafis, bakery modern, hingga pengenalan AI. Fenomena ini menunjukkan bahwa pembelajaran seumur hidup bukan slogan, melainkan realitas. Dan realitas ini sangat mendukung bonus ekonomi lansia.

Mesin ketiga adalah tabungan dan perilaku finansial yang sehat. Namun inilah bagian yang paling menantang. Banyak lansia memang memiliki dana pensiun, tetapi tidak sedikit yang langsung menghabiskannya untuk kebutuhan keluarga, cicilan, atau bahkan menjadi korban pinjaman online dan judi daring. Di berbagai FGD, para pemangku kepentingan menyoroti betapa rawannya lansia terhadap kejahatan finansial. Di sisi lain, ada juga banyak lansia yang justru mampu memanfaatkan dana pensiun sebagai modal usaha kecil — membuka warung, membuat kue, mengajar privat, atau memulai usaha rumahan lain. Jika literasi keuangan diperkuat, peluang ini bisa meluas.



Namun, potensi saja tidak cukup. Ada tantangan besar yang membuat bonus kedua tidak akan tercapai secara otomatis. Banyak lansia ingin bekerja atau berusaha, tetapi terkendala modal. Ada pula yang harus berhenti aktif karena penyakit kronis yang sebenarnya bisa dicegah sejak usia muda. Risiko digital juga menghantui; pinjol, judol, hingga penipuan berkedok investasi menyasar mereka yang belum fasih dengan dunia digital. Di sisi lain, hanya sebagian lansia yang memiliki keterampilan khusus, sehingga untuk kembali menggerakkan ekonomi, mereka membutuhkan pelatihan yang tepat dan mudah dijangkau.

Tetap saja, di balik semua tantangan itu, ada kisah-kisah penuh optimisme. Seorang pria 68 tahun di Cimahi membuka usaha rempeyek setelah mengikuti kelas UMKM di kelurahan. Seorang perempuan 63 tahun di Bandung kini menjadi relawan posyandu dan mentor memasak bagi ibu-ibu muda. Di Garut, kelompok lansia membuat ecoprint

dan memasarkan produknya melalui media sosial dibantu cucu-cucu mereka. Semua ini menunjukkan bahwa lansia memiliki kapasitas menjadi pusat aktivitas sosial sekaligus ekonomi.

Bonus demografi kedua pada akhirnya adalah kisah optimisme, kisah bahwa usia tua bukan titik akhir, tetapi babak baru. Bahwa pengalaman panjang dapat dipadukan dengan keterampilan baru. Bahwa dana pensiun bisa dikelola sebagai modal, bukan uang yang cepat habis. Bahwa lansia bisa menjadi investor masa depan, bukan penerima bantuan belaka.

Jika kesehatan, pelatihan, tabungan, literasi digital, dan kebijakan bergerak selaras, Indonesia bisa memasuki masa tua dengan kepala tegak. Bonus kedua bukan hanya tentang ekonomi; ia adalah tentang martabat, kesejahteraan, dan kesempatan bagi mereka yang telah menghabiskan hidup membangun bangsa. ✨





Lansia Berdaya

Bagaimana Komunitas Jadi Kunci Masa Depan Indonesia.

Di banyak kampung dan kota di Indonesia, pemandangan baru mulai muncul: kelompok-kelompok lansia berkumpul membuat kerajinan, belajar mengolah minyak jelantah menjadi sabun, mengikuti senam pagi, atau mencoba fitur dasar ponsel pintar ditemani kader setempat. Aktivitas-aktivitas kecil ini menandai perubahan besar: semakin banyak lansia yang tidak ingin hanya “menunggu”, tetapi ingin tetap aktif, belajar, dan terlibat. Namun kontrasnya juga terasa: di gang lain atau apartemen kecil di pinggir kota, ada lansia yang menghabiskan hari sendirian, jarang keluar, dan perlahan terputus dari kehidupan sosial. Ketimpangan pengalaman ini menjadi cermin bahwa masa depan penuaan Indonesia akan sangat ditentukan oleh kekuatan komunitas.

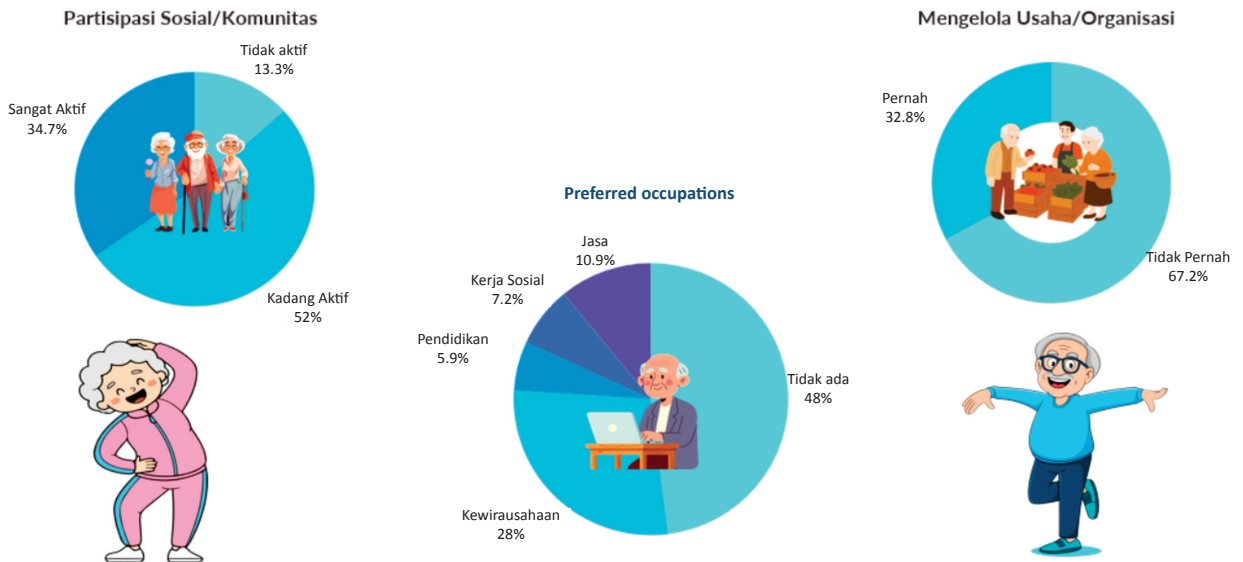
Indonesia kini berada pada fase penuaan yang tidak bisa diabaikan. Proporsi lansia nasional hampir menyentuh 12 persen pada 2025, dan di Jawa Barat, provinsi dengan populasi penduduk terbesar, jumlah lansia mencapai 5,8 juta orang, tertinggi secara absolut di Indonesia. Angka sebesar itu akan terus bertambah, dan struktur keluarga menjadi faktor pertama yang menentukan apakah kelompok lansia hidup dengan dukungan atau justru kerentanan. Survei menunjukkan bahwa 93,6 persen lansia merasa didukung oleh keluarga, sebuah modal sosial yang luar biasa kuat. Lebih dari 50 persen tinggal bersama pasangan, sekitar 22,7 persen dengan anak, dan 16,8 persen dengan keluarga besar, menunjukkan bahwa kelekatan keluarga Indonesia masih berlangsung.

Namun pola ini sedang berubah cepat. Urbanisasi membuat anak-anak merantau, keluarga mengecil, dan beban perawatan meningkat. Ketika anak bekerja penuh waktu, orang tua lanjut usia yang tinggal di rumah bisa semakin terisolasi. Di banyak kota, lansia yang tinggal sendirian mencapai 10,4 persen, jumlah yang mungkin terlihat kecil tetapi dalam skala Jawa Barat berarti ratusan ribu orang. Karena itu, dukungan keluarga saja tidak cukup; negara dan komunitas harus memperkuat peran caregiver agar keluarga tidak kewalahan.

Di tengah dinamika keluarga tersebut, komunitas hadir sebagai penyelamat. Posyandu Lansia menjadi ruang yang sangat bermakna. Di sana, mereka tidak hanya memeriksa tekanan darah atau gula darah, tetapi juga bertemu tetangga, bercengkerama, dan

merasa bagian dari masyarakat. Survei menunjukkan 61,6 persen lansia menilai kesehatannya baik atau sangat baik, meski 56 persen memiliki penyakit kronis seperti hipertensi (32,5 persen), diabetes (8,5 persen), atau penyakit jantung (7,5 persen). Keberadaan posyandu dan cek kesehatan rutin menjadi krusial untuk menjaga kemandirian fisik mereka, yang saat ini sangat tinggi, yaitu 93,6 persen lansia masih mandiri dalam aktivitas harian.

Tidak hanya posyandu, Sekolah Lansia juga berkembang sebagai ruang belajar dan pemberdayaan. Di berbagai desa dan kota, kelas-kelas sederhana disusun: memasak, merajut, ecoprint, hingga pelatihan UMKM. Tren belajar seumur hidup ini didorong oleh kenyataan bahwa 75,2 persen lansia masih ingin mengikuti pelatihan, meskipun hanya 41,9 persen



yang berminat bekerja atau berusaha. Semangat belajar ini menunjukkan bahwa kapasitas lansia untuk berkegiatan masih sangat besar jika difasilitasi komunitas.

Para kader dan relawan memainkan peran sentral. Mereka mengenal nama setiap lansia, mengetuk pintu ketika seseorang tidak hadir di posyandu, mendampingi urusan administrasi BPJS, bahkan mengantar ke fasilitas kesehatan. Ini penting karena meski 90,9 persen lansia memiliki jaminan kesehatan, akses layanan tidak otomatis mudah tanpa pendampingan.

Di sisi lain, pemerintah daerah mulai membangun ekosistem layanan yang lebih ramah usia. Di Jawa Barat, 96 persen puskesmas kini berstatus Puskesmas Santun Lansia, memastikan layanan lebih nyaman dan inklusif. Pemerintah provinsi juga memperluas implementasi SIDAYA, sebuah model integrasi layanan sosial, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan keluarga dalam satu pintu. Keberadaan Perda Lansia 2023 menjadi dasar hukum yang memungkinkan program-program ini berjalan lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Namun kemajuan ini menghadapi ancaman baru: digitalisasi yang tidak ramah lansia. Jawa Barat kini tercatat sebagai provinsi dengan kasus pinjaman online, judi daring, dan penipuan digital tertinggi di Indonesia menurut data OJK. Lansia, yang sebagian besar belum terbiasa membaca kontrak digital, sering menjadi sasaran empuk. Banyak yang akhirnya terjerat utang atau kehilangan tabungan. Inilah sebabnya literasi digital menjadi kebutuhan mendesak dalam program komunitas. Pelatihan

dasar menggunakan ponsel, mengenali modus penipuan, hingga penggunaan kanal layanan publik seperti Sapawarga dapat menjadi pelindung penting dari risiko ini.

Di luar kesehatan dan digital, lingkungan fisik tempat lansia tinggal juga sangat menentukan kualitas hidup mereka. Data menunjukkan bahwa 50,7 persen lansia di Jawa Barat tinggal di rumah tidak layak huni, tanpa pegangan tangan, dengan lantai licin atau ventilasi buruk. Kondisi ini meningkatkan risiko jatuh, penyebab cedera paling mematikan di usia lanjut. Ruang publik pun sering kali tidak mendukung: trotoar sulit dilalui, transportasi umum tidak ramah mobilitas rendah, dan taman minim fasilitas untuk duduk atau berkegiatan. Tanpa adaptasi ruang publik, penuaan sehat hanya menjadi wacana.

Meski demikian, banyak komunitas mulai menunjukkan arah harapan. Di beberapa wilayah, lansia saling membantu melalui kegiatan “relawan senior”. Ada lansia yang menjadi peer educator kesehatan, mengajari lansia lain tentang gaya hidup sehat. Ada kelompok lansia yang mengorganisasi kegiatan gotong royong kecil, menyiapkan sarana agar lingkungannya ramah usia. Gerakan-gerakan lokal semacam ini adalah inti dari pemberdayaan lansia: bukan sekadar menerima bantuan, tetapi berkontribusi bagi lingkungan. Di sinilah kunci terbesar bonus demografi kedua: bukan pada angka statistik atau proyeksi ekonomi, tetapi pada kekuatan komunitas. Lansia berdaya hanya lahir ketika keluarga didukung, komunitas hidup, kader bekerja dengan empati, dan pemerintah menyediakan ekosistem yang mudah dijangkau. 🌱





Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN



Bagian 2

MASA DEPAN INDONESIA: KOTA, MOBILITAS, DAN PEMERATAAN

Masa depan Indonesia bukan hanya ditentukan oleh berapa jumlah penduduk, tetapi juga di mana mereka tinggal, bagaimana mereka berpindah, dan peluang apa yang tersedia. Indonesia semakin urban, tetapi tidak semua kota siap. Mobilitas berubah cepat: dari migrasi permanen ke komuter harian, dari merantau ke bekerja jarak jauh. Di sinilah cerita tentang kesenjangan wilayah dan perubahan gaya hidup penduduk Indonesia bermula.



Ketika Indonesia Bergerak

Angka di Balik Migrasi, Urbanisasi, dan Ketimpangan Baru.

Mobilitas penduduk bukan sekadar fenomena statistik, tetapi denyut yang menentukan arah perubahan Indonesia hari ini. Setiap perpindahan orang, baik yang terlihat dalam arus besar urbanisasi maupun yang lebih sunyi dalam perpindahan antardaerah, membentuk ulang struktur ekonomi, ruang hidup, dan peluang antarwilayah. Di balik angka-angka yang tampak teknis, terdapat cerita tentang aspirasi, ketimpangan, dan dinamika pembangunan yang terus bergerak.

Perubahan terbesar dalam demografi Indonesia hari ini tidak hanya terjadi karena kelahiran yang menurun atau harapan hidup yang meningkat. Ada arus lain yang diam-diam mengubah peta sosial-ekonomi: perpindahan jutaan orang dari satu daerah ke daerah lain. Migrasi dan urbanisasi kini menjadi penentu utama arah pembangunan Indonesia, dan angka-angka mutakhir memperlihatkan cerita yang jauh lebih kompleks daripada sekadar orang desa

pindah ke kota. Dalam periode 2015–2020, data sensus menunjukkan mobilitas yang sangat intens.

Perpindahan lima tahunan ini, dikenal sebagai migrasi risen, mengungkap pola yang konsisten: provinsi-provinsi dengan aktivitas ekonomi terbesar tetap menjadi tujuan utama. DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur menarik migran dari banyak daerah, sementara provinsi seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatra Utara menjadi penyuplai penduduk terbesar. Pada saat yang sama, wilayah-wilayah di kawasan timur Indonesia seperti Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua justru didominasi arus keluar. Pola ini menjadi penanda betapa tidak seimbangnnya persebaran peluang di Indonesia.

Di antara para migran ini, satu kelompok usia mendominasi: usia produktif. Kelompok 20–39 tahun mencatat proporsi migrasi tertinggi, dengan konsentrasi terbesar pada usia 25–34 tahun. Mereka bukan perpindahan serampangan; sebagian besar



Kepadatan Penduduk Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2024

memiliki pendidikan SMA, diploma, atau sarjana. Fakta bahwa migrasi terbesar dilakukan oleh penduduk berpendidikan menengah dan tinggi menunjukkan betapa mobilitas ini digerakkan oleh motif ekonomi dan profesional. Yang berpendidikan rendah cenderung bermigrasi karena alasan keluarga, bukan peluang kerja. Perbedaan alasan migrasi juga terlihat jelas ketika dilihat berdasarkan jenis kelamin. Penduduk laki-laki lebih banyak bergerak untuk pekerjaan, terutama di sektor formal. Sebaliknya, perempuan lebih sering berpindah karena alasan keluarga, atau terjun ke sektor informal saat tiba di kota. Ketimpangan ini memberi kita gambaran bahwa mobilitas penduduk tidak hanya soal geografi, tetapi juga mencerminkan struktur kesempatan yang

berbeda antara laki-laki dan perempuan. Urbanisasi memperbesar efek dinamika migrasi ini.

Sejak 2015 hingga 2025, proporsi penduduk perkotaan terus meningkat secara tajam. Pada tahun 2015, penduduk kota baru mencapai 53,3 persen. Lima tahun kemudian, angkanya naik menjadi 56,7 persen. Pada 2025, Indonesia diproyeksikan menyentuh 60 persen populasi perkotaan. Dalam satu dekade saja, puluhan juta orang bergeser dari pola hidup pedesaan menuju sistem sosial-ekonomi perkotaan. Namun, hubungan urbanisasi dan kemajuan ekonomi tidak sekuat yang kita kira. Laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa di negara-negara seperti India, setiap kenaikan 1 persen urbanisasi mampu mendorong 13 persen kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

Di Indonesia, angka itu hanya 4 persen. Kesenjangan drastis ini menjadi peringatan bahwa urbanisasi kita belum bekerja seefisien negara-negara lain dalam mengangkat kesejahteraan penduduknya.

Sebagian alasannya terlihat di lapangan: banyak pendatang baru masuk ke pekerjaan informal dengan upah rendah dan kondisi kerja tidak stabil. Kenaikan harga tanah dan hunian mendorong keluarga berpenghasilan rendah tinggal di kawasan kumuh. Akses ke air bersih, sanitasi, dan transportasi cenderung timpang. Pada saat yang sama, kebutuhan layanan pendidikan dan kesehatan meningkat lebih cepat daripada kemampuan kota menyediakan infrastruktur yang layak.

Ketimpangan tidak hanya terlihat di dalam kota, tetapi juga antarwilayah. Pulau Jawa, dengan luas sekitar tujuh persen dari seluruh wilayah Indonesia, menjadi rumah bagi 56,1 persen seluruh penduduk nasional. Sementara ribuan pulau lain, terutama di timur Indonesia, memiliki kepadatan yang jauh lebih rendah dan kesempatan ekonomi yang terbatas.

Konsentrasi penduduk dan ekonomi ini membuat daerah-daerah di luar Jawa tumbuh jauh lebih lambat, menciptakan jurang kesejahteraan yang semakin lebar. Fenomena ini diperkuat oleh cara urbanisasi terjadi. UN Habitat mencatat bahwa 65 persen pertumbuhan penduduk kota di Indonesia bukan berasal dari kelahiran alami, tetapi dari migrasi dan reklasifikasi wilayah desa menjadi kota. Dengan kata lain, kota tumbuh lebih cepat daripada kemampuan mereka untuk menyediakan fasilitas dasar, sehingga muncul ketegangan sosial dan tekanan terhadap infrastruktur. Kota tanpa perencanaan inklusif juga

berpotensi menciptakan segregasi spasial. Keluarga berpendapatan rendah terpaksa hidup di tempat-tempat yang rawan banjir, padat, dan jauh dari akses layanan berkualitas. Ketika kondisi ini bertahan selama bertahun-tahun, lingkaran kemiskinan antar-generasi menjadi semakin sulit diputus. Pekerja migran yang seharusnya mendapatkan peluang justru mendapati bahwa kota tidak memberi ruang cukup untuk mobilitas sosial.

Di tengah dinamika ini, arah pembangunan ke depan harus berubah. Pemerataan pembangunan menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar pilihan kebijakan. Kota-kota menengah di luar Jawa perlu diperkuat agar mampu menjadi pusat pertumbuhan baru yang menarik investasi dan tenaga kerja. Infrastruktur transportasi, kesehatan, pendidikan, dan konektivitas digital di daerah-daerah yang selama ini tertinggal harus ditingkatkan agar penduduk tidak terpaksa pindah hanya untuk mencari layanan dasar.

Pergerakan penduduk adalah cermin harapan. Orang berpindah karena ingin hidup lebih baik. Namun harapan itu hanya bisa terwujud jika negara meratakan peluang, bukan membiarkan mereka terkonsentrasi di beberapa titik saja. Masa depan Indonesia tidak hanya dibentuk oleh angka kelahiran atau kematian, tetapi oleh arah gerakan puluhan juta orang yang sedang mencari masa depan. Jika migrasi dan urbanisasi dikelola dengan cerdas, keduanya akan menjadi mesin pemerataan. Jika tidak, Indonesia berisiko tumbuh tanpa kesetaraan. Jalan mana yang akan diambil, itu ditentukan oleh kebijakan hari ini. ✎



Mobilitas Penduduk

Mengapa Mobilitas Penduduk Menentukan Arah Indonesia?

Setiap hari, jutaan orang Indonesia bergerak. Ada yang menyeberangi batas desa untuk bekerja, ada yang pindah ke kota demi sekolah, ada yang meninggalkan kampung halaman untuk menetap di provinsi lain, dan sebagian lagi bahkan melangkah pergi ke negara asing. Perpindahan manusia yang seolah acak itu sebenarnya mengikuti pola yang sangat jelas: manusia bergerak mengikuti harapan. Harapan untuk hidup lebih layak, lebih aman, lebih sehat, atau sekadar lebih dekat dengan kesempatan.

Dalam ilmu kependudukan, semua pergerakan ini disebut mobilitas penduduk, perpindahan individu atau kelompok dari satu tempat ke tempat lain. Konsepnya sederhana, tetapi dampaknya sangat besar bagi arah pembangunan sebuah negara. Para ahli menyebut mobilitas sebagai “denyut nadi” pembangunan: ia muncul karena pembangunan, tetapi sekaligus membentuk ulang pembangunan itu sendiri.

Mobilitas punya banyak bentuk. Ada yang disebut mobilitas vertikal, yakni perpindahan status sosial seseorang. Namun yang paling mudah terlihat dalam kehidupan sehari-hari adalah mobilitas horizontal, perpindahan secara geografis dari satu daerah ke daerah lain. Dalam mobilitas horizontal inilah terdapat dua arus besar: perpindahan permanen dan perpindahan non permanen.

Perpindahan permanen atau migrasi adalah bentuk mobilitas yang membuat seseorang benar-benar meninggalkan tempat asalnya, biasanya untuk menetap lebih dari satu tahun. Mereka mengganti alamat administrasi, mencari rumah baru, dan membangun hidup baru. Sementara itu, perpindahan non permanen terjadi dalam ritme harian atau musiman: pekerja komuter, mahasiswa yang bolak-balik kuliah, hingga pedagang yang mengikuti jalur panen. Mobilitas non permanen semakin berkembang seiring membaiknya infrastruktur,

kereta cepat, jalan tol, bandara, dan transportasi murah yang membuat seseorang bisa bekerja jauh dari rumah tanpa harus berpindah domisili.

Namun mengapa orang bergerak? Jawaban klasiknya sudah dikemukakan Everett S. Lee pada 1966: manusia berpindah karena ditarik oleh kesempatan baru dan didorong oleh tekanan di tempat asal. Tarikan itu bisa berupa lapangan kerja, kampus, fasilitas kesehatan, atau kota yang lebih hidup. Dorongan bisa berupa kemiskinan, konflik, keterbatasan lahan, atau sekadar stagnasi.

Di Indonesia, teori itu sangat terasa. Pertumbuhan industri dan jasa di perkotaan membuat arus migrasi dari desa ke kota tak pernah berhenti. Model migrasi Todaro sejak tahun 1969 juga semakin relevan: orang pindah karena berharap pendapatan yang lebih baik, meski kenyataannya tak selalu sesuai gambaran ideal. Perpindahan ini paling banyak dilakukan penduduk usia produktif, mereka yang paling peka terhadap peluang baru dan paling siap mengambil risiko.

Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa perubahan iklim, abrasi pesisir, banjir rob, kekeringan, dan bencana hidrometeorologi, mulai memaksa kelompok-kelompok tertentu pindah permanen.

Akibatnya, distribusi penduduk pun terus bergeser. Lebih dari separuh penduduk Indonesia kini tinggal di perkotaan. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung tak hanya menampung penduduk asli, tetapi juga menjadi rumah baru bagi jutaan migran internal. Konsentrasi penduduk ini memicu tekanan besar pada hunian, air bersih, sanitasi, transportasi, hingga ruang hijau. Di sisi lain, banyak wilayah pedesaan dan pulau-pulau terpencil mengalami penyusutan penduduk produktif sehingga ekonomi lokalnya bergerak lebih lambat.

Ketimpangan ini dapat dilihat melalui angka kepadatan penduduk. Pulau Jawa menduduki tingkat kepadatan tertinggi di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Banten, dan Jawa Barat berada di peringkat teratas. Sementara itu, sebagian besar provinsi di luar Jawa masih berpenduduk jarang, terutama wilayah-wilayah timur. Ketimpangan ini bukan sekadar angka, tetapi menggambarkan perbedaan akses terhadap layanan publik, peluang ekonomi, dan kualitas hidup.

Faktor lingkungan juga semakin menggerakkan manusia. Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa perubahan iklim, abrasi pesisir, banjir rob, kekeringan, dan bencana hidrometeorologi, mulai memaksa kelompok-kelompok tertentu pindah permanen. Migrasi karena iklim secara perlahan menjadi fenomena baru yang tidak bisa lagi diabaikan dalam perencanaan pembangunan.

Sementara itu, kebijakan negara turut membentuk arus mobilitas. Di masa lalu, pemerintah pernah aktif mengarahkan perpindahan melalui program transmigrasi, memindahkan keluarga dari Jawa ke wilayah-wilayah luar Jawa. Program ini

bertujuan pemerataan penduduk dan pembangunan regional. Kini, kebijakannya berubah: negara lebih memilih mendorong pusat-pusat pertumbuhan baru agar perpindahan penduduk mengikuti dinamika ekonomi yang lebih seimbang.

Namun mobilitas tidak selalu membawa manfaat otomatis. Daerah tujuan menghadapi tekanan infrastruktur, kemacetan, permintaan perumahan, dan kebutuhan layanan dasar. Daerah asal kehilangan sumber daya manusia produktif, membuat pengembangan ekonomi lokal semakin berat. Mobilitas yang tidak dikelola dengan baik justru memperlebar kesenjangan antarwilayah.

Di sisi lain, mobilitas juga dapat menjadi alat pemerataan pembangunan, jika diarahkan dengan tepat. Perpindahan tenaga kerja dapat memperkaya ekonomi lokal, mengalirkan keterampilan baru, dan membawa remitansi ke daerah asal. Banyak negara memanfaatkan mobilitas sebagai mesin penggerak ekonomi regional. Indonesia pun bisa ke arah itu: melalui pengembangan kawasan industri di luar Jawa, perbaikan transportasi antardaerah, peningkatan layanan dasar, dan kebijakan ekonomi yang memberi daya tarik bagi wilayah-wilayah tertinggal.

Kunci utamanya adalah kesadaran bahwa mobilitas penduduk bukan sekadar perpindahan manusia. Ia adalah indikator ketimpangan, cermin kesempatan hidup, sekaligus alat perubahan. Jika dikelola dengan visi jangka panjang, mobilitas bisa menjadi energi besar untuk menjaga keseimbangan Indonesia, bukan sekadar membuat kota semakin penuh dan desa semakin kosong.

**Banyak negara
memanfaatkan mobilitas
sebagai mesin penggerak
ekonomi regional.
Indonesia pun bisa
ke arah itu: melalui
pengembangan kawasan
industri di luar Jawa.**

Secara natural, manusia akan selalu bergerak. Yang perlu dibangun adalah arah perjalanan itu: agar setiap perpindahan membuka peluang, memperkuat wilayah, dan menciptakan Indonesia yang tumbuh lebih merata dari Sabang sampai Merauke.

Di tengah dunia yang berubah cepat, mobilitas penduduk akan terus menjadi salah satu kekuatan paling menentukan bagi masa depan Indonesia. Tantangannya bukan menghentikan arus tersebut, tetapi memastikan bahwa setiap perpindahan menghasilkan manfaat bagi individu, keluarga, dan wilayah. Ketika kebijakan mampu menyeimbangkan kebutuhan kota dan desa, menghubungkan pusat-pusat ekonomi baru, dan melindungi mereka yang rentan terhadap tekanan sosial maupun lingkungan, maka mobilitas bukan lagi sumber ketimpangan, melainkan jembatan kemajuan. Dari dinamika inilah Indonesia dapat membangun struktur sosial-ekonomi yang lebih tangguh untuk menghadapi dekade-dekade mendatang. ✨



Migrasi Permanen

Denyut yang Membentuk Masa Depan Indonesia.

Migrasi bukan sekadar proses berpindahnya seseorang dari satu titik ke titik lain di peta; ia adalah cerita tentang pilihan, tekanan, dan keberanian mengambil risiko. Di tengah transformasi ekonomi dan sosial Indonesia, perpindahan permanen menjadi jembatan yang menghubungkan impian pribadi dengan dinamika pembangunan nasional. Memahami migrasi berarti memahami apa yang sesungguhnya digerakkan dan diinginkan oleh masyarakat dalam sebuah negara yang berubah cepat.

Tidak ada yang benar-benar diam dalam sebuah negara yang terus tumbuh. Di balik hiruk pikuk pembangunan, Indonesia sesungguhnya digerakkan oleh jutaan langkah kecil yang meninggalkan satu tempat untuk memulai hidup di tempat lain. Langkah-langkah itu, yang acap kali sunyi dan personal, sesungguhnya menjadi denyut penting dalam perjalanan demografi bangsa: migrasi permanen.

Berbeda dari mobilitas musiman atau perpindahan harian, migrasi permanen adalah keputusan besar. Tidak semua orang berani meninggalkan kampung halaman sepenuhnya, memindahkan KTP, dan menetap di tanah baru. Tetapi bagi sebagian lainnya, itulah satu-satunya jalan ketika peluang ekonomi mengecil, ketika biaya hidup tak lagi tertahan, atau ketika harapan tumbuh di kejauhan.

Sebagian dorongan itu bersifat klasik. Para ahli sejak lama memetakan pola yang terus berulang: daerah yang miskin mendorong orang pergi, daerah yang makmur menarik orang datang. Namun teori tidak pernah cukup menjelaskan apa yang terjadi di lapangan. Di Indonesia, migrasi tidak hanya soal upah dan pekerjaan; ia memiliki wajah sosial, pendidikan, bahkan romantika. Ada yang berpindah karena diterima di universitas ternama, ada yang mengikuti pasangan setelah menikah, dan ada pula yang meninggalkan kampung karena merasa



Migrasi meningkat tajam dalam 50 tahun
Migran seumur hidup:
1971: 4,9% 2023: 9,8%

Sensus Penduduk 2020 mencatat hampir satu dari lima penduduk Indonesia kini hidup di tempat yang berbeda dari lokasi kelahirannya. Arus terbesar mengalir ke pusat ekonomi seperti Jakarta, Surabaya, Batam.

masa depannya tersendat bila tetap tinggal. Pada masa lalu, mobilitas permanen sempat diarahkan pemerintah melalui program transmigrasi. Ratusan ribu keluarga dipindahkan dari pulau yang padat ke wilayah yang jarang penduduk. Program itu membentuk desa-desa baru dan sejarah baru bagi banyak orang. Namun memasuki abad ini, arah perpindahan tidak lagi ditentukan negara, melainkan arus ekonomi dan dinamika sosial yang bergerak lebih cepat daripada kebijakan.

Sensus Penduduk 2020 mencatat hampir satu dari lima penduduk Indonesia kini hidup di tempat yang berbeda dari lokasi kelahirannya. Arus terbesar mengalir ke pusat ekonomi seperti Jakarta, Surabaya, Batam, dan kota-kota industri di Kalimantan. Namun keberhasilan suatu daerah menarik penduduk tidak selalu menjadi berkah. Ketika pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja, rumah terjangkau, transportasi layak, dan layanan publik memadai, urbanisasi justru melahirkan paradoks: kota semakin penuh, kesejahteraan tidak otomatis naik.

Di sisi lain, tidak semua daerah menjadi magnet perpindahan. Sebagian wilayah tampil sebagai “pelaku utama pengirim” penduduk. Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, provinsi-provinsi ini mencatat jumlah migrasi keluar yang besar. Alasan migrasinya beragam: tradisi sosial merantau, minimnya lapangan kerja, sampai pertumbuhan ekonomi lokal yang tidak secepat daerah lain. Ironisnya, banyak dari daerah ini memiliki modal sosial kuat, tetapi tidak cukup kuat untuk menahan generasi mudanya tetap tinggal.

Tren migrasi permanen juga mulai berubah bentuk. Setelah 2010, proporsinya justru menurun. Mobilitas masyarakat tidak berhenti, tetapi bergeser menjadi lebih cair. Orang bekerja di kota lain tetapi tetap tinggal di rumah lama karena moda transportasi semakin cepat dan murah. Mobilitas jenis ini tidak terekam sebagai migrasi permanen, tetapi dampaknya nyata: kota tujuan merasakan tekanan penduduk pada siang hari, sementara kota asal tetap padat pada malam hari. Inilah era

Dalam setiap angka migrasi, ada seseorang yang menutup pintu rumah masa kecilnya, menatap jauh ke tanah baru, dan berharap pilihan itu membuka masa depan yang lebih cerah. Tugas negara adalah memastikan harapan itu tidak padam.

mobilitas harian, yang diam-diam mengubah cara kita membaca statistik kependudukan.

Dan kini, ada babak baru yang tak kalah penting: migrasi lingkungan. Abrasi di pesisir, kenaikan muka laut, dan bencana hidrometeorologis mulai memaksa warga pindah secara permanen. Tidak dengan gegap gempita, melainkan lewat keputusan yang terpaksa, ketika rumah hilang, ketika tanah tak lagi aman, ketika laut memakan batas desa.

Berbagai data yang dirilis BPS menunjukkan gambaran yang berlapis. Ada provinsi yang menjadi magnet besar, seperti Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur. Ada daerah yang lebih banyak melepas penduduk daripada menerima. Ada pula provinsi yang mobilitasnya rendah karena letak geografis, minimnya jaringan migrasi, atau kuatnya keterikatan budaya. Semua ini memperlihatkan bahwa migrasi bukan fenomena tunggal; ia mosaik besar dengan motif berbeda.

Dampaknya pun tidak sama. Daerah tujuan membawa beban besar atas ledakan kebutuhan infrastruktur dan layanan publik. Daerah asal kehilangan sebagian tenaga kerja usia produktif. Ketika arus perpindahan tidak dikelola, ketimpangan justru melebar: kawasan maju bertambah padat, kawasan tertinggal semakin tertinggal.

Karena itu, migrasi permanen tidak boleh dianggap sebagai arus yang dibiarkan berjalan tanpa arah. Ia perlu dibaca sebagai indikator ketimpangan, sebagai tanda tekanan ekonomi, sebagai sinyal ketidakmerataan kualitas hidup. Jika dibaca dengan pemahaman dan dikelola dengan strategi, migrasi bisa menjadi alat pemerataan, bukan ancaman.

Dan pada saatnya nanti, semua kembali kepada cerita manusia. Dalam setiap angka migrasi, ada seseorang yang menutup pintu rumah masa kecilnya, menatap jauh ke tanah baru, dan berharap pilihan itu membuka masa depan yang lebih cerah. Tugas negara adalah memastikan harapan itu tidak padam, di manapun mereka akhirnya menetap.

Ke depan, peta migrasi Indonesia akan semakin ditentukan oleh interaksi antara ekonomi, infrastruktur, dan krisis lingkungan yang kian nyata. Bila kebijakan mampu menyiapkan kota-kota yang ramah penduduk, memperkuat peluang ekonomi di daerah asal, dan memberikan perlindungan bagi mereka yang terdorong berpindah karena bencana, maka migrasi permanen dapat berubah dari cermin ketimpangan menjadi motor pemerataan. Pada titik itulah langkah-langkah kecil jutaan orang Indonesia akan bergabung menjadi gerak besar yang menguatkan masa depan bersama. ✨



Era Baru Mobilitas

Indonesia Bergerak Tanpa Harus Berpindah.

Ada yang berubah dari cara orang Indonesia berpindah tempat tinggal. Jika puluhan tahun yang lalu perpindahan antarprovinsi berlangsung deras, anak muda meninggalkan kampung demi pendidikan, pekerjaan, atau sekadar mencoba peruntungan baru, kini arus itu melambat. Data terbaru menunjukkan bahwa mobilitas fisik masyarakat Indonesia menurun ke titik terendah dalam sejarah modernnya. Dan perubahan ini mengandung cerita penting tentang arah pembangunan, perubahan teknologi, serta cara baru orang Indonesia mencari peluang hidup.

Migrasi lima tahun terakhir atau migrasi risen adalah salah satu cara paling efektif untuk membaca denyut mobilitas masa kini. Indikator ini menghitung berapa banyak penduduk yang dalam lima tahun terakhir berpindah provinsi dan kini tinggal di tempat baru. Pada 2023, angkanya hanya 1 persen, setara satu dari setiap seratus penduduk Indonesia. Ini

penurunan drastis dibanding 1980, ketika migrasi risen mencapai 2,95 persen. Dalam empat dekade, perpindahan fisik penduduk berkurang lebih dari separuh.

Apa yang membuat orang Indonesia semakin jarang pindah? Sejumlah teori migrasi memberi petunjuk. Pada awal 1970-an, Zelinsky memperkenalkan Teori Transisi Mobilitas, yang menjelaskan bahwa masyarakat yang makin maju cenderung mengalami penurunan mobilitas fisik karena kebutuhan berpindah mulai digantikan oleh kemudahan teknologi. Kini teori itu terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari. Pekerjaan jarak jauh, sekolah daring, layanan digital, dan transportasi yang makin cepat membuat orang bisa tetap bekerja atau belajar tanpa harus pindah tempat tinggal. Sementara Teori Migrasi Baru menjelaskan bahwa rumah tangga yang ekonominya membaik tidak lagi menjadikan migrasi sebagai strategi bertahan

hidup. Kombinasi faktor ini membuat perpindahan antarprovinsi tidak lagi menjadi satu-satunya jalan untuk naik kelas ekonomi.

Meski demikian, penurunan migrasi risen tidak berarti pola perpindahan menjadi homogen. Ketika angkanya dirinci antarprovinsi, terlihat kontras yang mencolok. Beberapa wilayah justru menjadi magnet baru bagi pendatang. Kepulauan Riau mencatat angka migrasi risen tertinggi, 3,30 persen, didongkrak oleh kawasan industri, perdagangan, dan letaknya yang strategis di jalur internasional. Yogyakarta berada di posisi kedua dengan 2,70 persen, terutama berkat reputasinya sebagai pusat pendidikan nasional. Sementara Kalimantan Utara mencatat 2,10 persen, sejalan dengan pesatnya pembangunan kawasan perbatasan dan aktivitas ekonomi baru.

Namun, tak semua provinsi mengalami hal serupa. Aceh mencatat angka migrasi risen hanya 0,40 persen, sementara Jawa Timur dan Banten berada di kisaran 0,60 persen. Ini menandakan bahwa wilayah-wilayah tertentu tidak lagi menarik pendatang, atau justru lebih banyak penduduknya yang bertahan di tempat asal karena alasan ekonomi, sosial, maupun kultural.

Arus migrasi neto juga memberi gambaran lain. DKI Jakarta, misalnya, mencatat migrasi risen bersih negatif hingga -3,2 persen. Artinya lebih banyak orang yang keluar daripada masuk dalam lima tahun terakhir. Biaya hidup tinggi, kepadatan ekstrem, serta urbanisasi yang mulai jenuh menjadi alasan banyak warga memilih pindah ke kota-kota sekitar atau kembali ke daerah asal. Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur juga menunjukkan angka negatif,

Yogyakarta berada di posisi kedua dengan 2,70 persen, terutama berkat reputasinya sebagai pusat pendidikan nasional. Sementara Kalimantan Utara mencatat 2,10 persen, sejalan dengan pesatnya pembangunan kawasan perbatasan.

yang dapat mengindikasikan adanya tantangan pembangunan yang membuat penduduk mencari peluang di wilayah lain.

Sebaliknya, wilayah seperti DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kepulauan Riau mencatat migrasi neto positif. Empat wilayah ini tampaknya berada dalam fase kebangkitan masing-masing, yang berpotensi dipicu oleh faktor pendidikan, pariwisata, pengembangan industri, atau meningkatnya infrastruktur. Pergeseran pusat mobilitas ini menjadi sinyal penting: pusat-pusat pertumbuhan Indonesia tidak lagi terpusat di kota-kota besar Jawa saja.

Siapa sebenarnya para migran risen ini? Data Susenas menunjukkan bahwa mayoritas adalah anak-anak muda usia produktif. Kelompok umur 20–29 tahun menyumbang 32 persen dari seluruh migran risen, sementara usia 30–34 tahun menyumbang seperempatnya. Ini konsisten dengan pola global bahwa migrasi adalah keputusan yang paling banyak

dilakukan pada rentang usia ketika seseorang sedang mencari pekerjaan, melanjutkan pendidikan, atau membangun keluarga. Migran juga cenderung memiliki pendidikan lebih tinggi dibanding non-migran, sebuah tanda bahwa mobilitas geografis kerap berjalan seiring dengan mobilitas sosial. Sebagian besar sudah menikah, yang menunjukkan bahwa keputusan pindah sering diambil sebagai strategi keluarga, bukan lagi keputusan individu semata.

Di tengah semua itu, perubahan paling besar justru datang dari cara masyarakat memaknai perpindahan. Kini, mobilitas tidak selalu berarti meninggalkan kampung halaman. Banyak orang bekerja di kota lain tetapi tinggal di daerah asal, mengandalkan kereta cepat, jalan tol, pesawat murah, atau sistem kerja hybrid. Mobilitas pun berubah dari “perpindahan tempat tinggal” menjadi “perpindahan aktivitas”, fenomena yang tak tercatat dalam statistik migrasi risen, tetapi nyata terasa dalam kehidupan sehari-hari.

Kini, mobilitas tidak selalu berarti meninggalkan kampung halaman. Banyak orang bekerja di kota lain tetapi tinggal di daerah asal, mengandalkan kereta cepat, jalan tol, pesawat murah, atau sistem kerja hybrid.

Penurunan migrasi risen bukan kabar baik atau buruk. Ia adalah tanda perubahan zaman. Tanda bahwa struktur ekonomi nasional berubah, teknologi memperluas pilihan hidup, dan masyarakat tidak lagi hidup dalam pola migrasi tradisional yang sama seperti generasi sebelumnya. Yang perlu dilakukan adalah memahami arah perubahan ini, agar kebijakan pembangunan tidak hanya menyesuaikan diri, tetapi juga mampu mengarahkan mobilitas ke arah yang lebih merata dan lebih adil.

Pergerakan manusia mungkin melambat, tetapi peta sosial ekonomi Indonesia sedang bergerak cepat. Memahami migrasi risen berarti memahami bagaimana masa depan Indonesia sedang terbentuk dari pilihan-pilihan kecil jutaan warganya dalam lima tahun terakhir.

Masa depan mobilitas penduduk Indonesia akan bergantung pada kemampuan negara membaca sinyal-sinyal baru ini: bahwa perpindahan tidak lagi hanya mengalir dari desa ke kota, atau dari timur ke barat, tetapi mengikuti logika kesempatan yang semakin beragam. Jika kebijakan mampu memperkuat konektivitas, menyeimbangkan pusat-pusat pertumbuhan, dan memastikan kota maupun daerah asal sama-sama layak ditinggali, maka menurunnya migrasi fisik justru dapat menjadi peluang untuk membangun kualitas hidup yang lebih setara. Dari transformasi inilah Indonesia dapat memasuki babak baru pembangunan yang tidak hanya berfokus pada jumlah orang yang bergerak, tetapi pada meningkatnya kualitas tempat di mana mereka memilih untuk tinggal dan berkembang. ✨



Pergerakan Non Permanen

Arah Baru Kehidupan Urban Indonesia.

Tidak ada lagi garis tegas antara rumah, kota, dan tempat bekerja dalam kehidupan masyarakat Indonesia modern. Kemajuan transportasi, teknologi komunikasi, dan perubahan pola kerja membuat orang berpindah dengan ritme baru, lebih cepat, lebih sering, namun tanpa benar-benar meninggalkan tempat tinggal. Di tengah perubahan ini, mobilitas non permanen muncul sebagai wajah baru pergerakan penduduk Indonesia, menggeser peran migrasi permanen dan melahirkan lanskap sosial-ekonomi yang sama sekali berbeda dari satu dekade lalu.

Di kota-kota besar Indonesia, ritme kehidupan masyarakat tidak lagi ditentukan oleh tempat tinggal, melainkan oleh jarak yang ditempuh setiap hari. Masyarakat Indonesia hidup dalam pergerakan: berangkat pagi sebelum matahari terbit, pulang ketika hari sudah gelap, berpindah dalam hitungan jam, bukan tahun. Inilah era ketika mobilitas non

permanen, komuter dan migrasi sirkuler, menggeser pentingnya migrasi permanen dalam membentuk lanskap sosial-ekonomi Indonesia.

Fenomena ini tampak jelas dalam angka-angka. Di Jawa Barat, 26,5 persen pekerjaannya tercatat sebagai komuter, angka terbesar di Indonesia. Disusul Jawa Timur (13,8 persen), DKI Jakarta (11,4 persen), dan Jawa Tengah (11,4 persen). Sementara di wilayah timur Indonesia, seperti Papua, Papua Barat, dan Maluku Utara, persentasenya hanya 0,1 persen. Perbedaan ini mencerminkan dua realitas yang sangat berbeda: kawasan barat Indonesia yang terhubung erat oleh jalur transportasi massal, dan kawasan timur yang masih bergantung pada mobilitas jangka menengah berupa migrasi sirkuler.

Namun, mobilitas non permanen tidak hanya terlihat dari arus komuter harian. Ada juga pola mobilitas sirkuler, pekerja yang tinggal di kota tujuan selama beberapa minggu atau bulan sebelum kembali

ke kampung halaman. Pola ini didominasi oleh pekerja dari Jawa Barat (27,5 persen), Jawa Tengah (21,5 persen), dan Jawa Timur (12,6 persen). Angka ini menunjukkan bahwa tiga provinsi dengan penduduk terpadat Indonesia kini menjadi pemasok utama tenaga kerja sirkuler ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

Pergeseran ini menjelaskan mengapa angka migrasi risen hanya 1 persen pada 2023, penurunan drastis dari 2,95 persen pada 1980. Mobilitas fisik jangka panjang makin jarang dilakukan, seiring munculnya pilihan mobilitas yang lebih fleksibel: komuter harian, kerja jarak jauh, hingga mobilitas sirkuler berbasis proyek. Transformasi teknologi, transportasi, dan organisasi kerja membuat perpindahan permanen tidak lagi menjadi satu-satunya jalan untuk naik kelas sosial atau mencari peluang ekonomi.

Perubahan ini terasa dalam kehidupan keluarga. Di kawasan metropolitan seperti Jabodetabek, jutaan keluarga beroperasi dalam jadwal yang diregangkan oleh jarak. Ayah yang bekerja di Jakarta tetapi tinggal di Bekasi, atau ibu bekerja yang berangkat dari Bogor

sebelum subuh, kini menjadi gambaran umum rumah tangga urban. Jarak bukan lagi soal geografi, melainkan ritme hidup: kapan sarapan dilakukan, kapan anak berangkat sekolah, kapan orang tua pulang, bahkan kapan keluarga sempat berinteraksi.

Di wilayah timur Indonesia, mobilitas sirkuler menciptakan pola keluarga yang berbeda. Banyak pekerja tinggal berbulan-bulan di lokasi proyek pertambangan, perkebunan, atau konstruksi, lalu kembali ke rumah hanya pada masa jeda kerja. Keluarga harus menyesuaikan dengan ritme kehadiran dan ketidakhadiran yang panjang. Mobilitas non permanen dalam bentuk sirkuler ini menjadi strategi ekonomi, tetapi dengan harga sosial yang tidak kecil: dari relasi keluarga yang terputus sementara, hingga tekanan emosional pada anak dan pasangan.

Mobilitas harian dan sirkuler ini juga melahirkan gaya hidup urban-suburban yang khas. Wilayah penyangga kota besar tumbuh pesat sebagai tempat tinggal penduduk yang bekerja di pusat kota, menciptakan fenomena “tinggal murah, bekerja jauh.” Infrastruktur transportasi menjadi tulang

Mobilitas non permanen dalam bentuk sirkuler ini menjadi strategi ekonomi, tetapi dengan harga sosial yang tidak kecil: dari relasi keluarga yang terputus sementara, hingga tekanan emosional pada anak dan pasangan.

punggung kehidupan sehari-hari. Data menunjukkan bahwa jumlah komuter nasional yang pada 2015 mencapai 3,17 juta orang (dari total 7,37 juta penduduk survei) turun menjadi 2,24 juta pada 2022. Penurunan ini bukan berarti mobilitas berkurang, melainkan bentuk mobilitas yang berubah: sebagian kebutuhan perjalanan harian tergantikan oleh kerja jarak jauh dan penyebaran pusat ekonomi yang tidak lagi terpusat di satu kota.

Di balik angka-angka itu, ada cerita tentang tekanan kehidupan urban modern. Masyarakat menghadapi kemacetan, biaya transportasi yang tinggi, serta waktu hidup yang tergerus perjalanan. Namun pada saat yang sama, mobilitas non permanen juga membuka peluang sosial baru: fleksibilitas kerja, peluang ekonomi lintas wilayah, dan integrasi ekonomi antar kota yang semakin kuat. Kota besar mendapatkan tenaga kerja tanpa harus menampung mereka sebagai penduduk permanen, sementara kota penyangga mendapatkan pasar baru untuk perumahan dan layanan dasar.

Fenomena ini juga memperlihatkan kesenjangan antarwilayah. Jawa, dengan jaringan transportasi dan konsentrasi ekonomi, menjadi pusat mobilitas harian terbesar. Sebaliknya, Papua, Maluku, dan sebagian Nusa Tenggara menunjukkan tingginya proporsi mobilitas sirkuler dibanding komuter karena keterbatasan transportasi harian dan jarak antar pusat ekonomi yang terlalu jauh untuk dijangkau dalam sehari.

Di tengah transformasi ini, satu hal menjadi jelas: mobilitas non permanen telah menata ulang cara masyarakat Indonesia bekerja, tinggal, membangun

Masa depan mobilitas bukan hanya tentang berapa banyak orang berpindah, melainkan bagaimana perpindahan itu mengubah cara kita menjalani hidup setiap hari.

keluarga, dan merajut kehidupan sosial. Mobilitas harian bukan lagi sekadar aktivitas rutin, tetapi sebuah gaya hidup baru yang membentuk identitas masyarakat urban Indonesia modern.

Untuk Indonesia, memahami pola baru ini adalah kunci merancang masa depan kota, sistem transportasi, dan kebijakan pembangunan wilayah. Masa depan mobilitas bukan hanya tentang berapa banyak orang berpindah, melainkan bagaimana perpindahan itu mengubah cara kita menjalani hidup setiap hari.

Ke depan, pola mobilitas non permanen ini berpotensi menjadi kekuatan besar yang membentuk daya saing dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Jika pemerintah mampu memperkuat transportasi publik, mendorong pemerataan pusat ekonomi, dan memfasilitasi kerja fleksibel secara inklusif, maka ritme perjalanan harian masyarakat tidak lagi menjadi beban, melainkan peluang. Dari sinilah masa depan Indonesia dapat dibangun. Bukan hanya dengan memindahkan orang, tetapi dengan memperpendek jarak kesempatan. ✨





Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN



Bagian 3

ARAH KEBIJAKAN: MENATA STRATEGI MENUJU INDONESIA 2045

Bonus demografi tidak datang dua kali. Dalam rentang singkat ini, kebijakan negara harus presisi—mengatur kelahiran, menyiapkan tenaga kerja, memperkuat perempuan, memperbaiki tata ruang, dan memodernisasi administrasi kependudukan. Indonesia butuh kebijakan yang berani dan adaptif, karena masa depan bergerak jauh lebih cepat daripada perencanaan konvensional.



Photo by: Gede Sühendra / Unsplash

Menata Masa Depan

Jalan Emas Indonesia Menuju 2045.

Di tengah berbagai perubahan global yang cepat, Indonesia melangkah ke masa depan dengan satu keyakinan penting: penduduk adalah kekuatan utama pembangunan. Arah kebijakan kependudukan yang dituangkan dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 dirancang untuk memastikan setiap warga, dari bayi yang baru lahir hingga lansia, tumbuh dalam lingkungan yang sehat, produktif, dan sejahtera.

Visi besar Indonesia Emas 2045, menjadi negara maju yang berdaulat, adil, dan makmur, menempatkan kualitas manusia sebagai poros pembangunan. Kekuatan modal dasar Indonesia, mulai dari demografi, sosial budaya, kekayaan alam, hingga potensi maritim, dipadukan dengan kesiapan menghadapi megatrend global dan capaian pembangunan sebelumnya. Hasil yang diharapkan bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi meningkatnya kesejahteraan rakyat di seluruh

Nusantara, termasuk kelompok rentan dan wilayah tertinggal.

Dalam RPJPN, misi besar “Pembangunan Manusia yang Unggul serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi” menjadi napas kebijakan kependudukan. Penduduk tidak lagi dipandang dari sisi jumlah semata, tetapi dari kualitas dan pemerataannya. Pemerintah memperkuat layanan keluarga berencana untuk memastikan pertumbuhan penduduk tetap terkendali sembari meningkatkan kesehatan dan ketahanan keluarga. Di sisi lain, peluang bonus demografi dikelola melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja, pendidikan vokasi, dan penciptaan kesempatan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri modern.

Kualitas data menjadi pilar yang menentukan keberhasilan kebijakan. Integrasi data kependudukan, digitalisasi basis data keluarga, dan pemanfaatan *big data analytics* membuat perencanaan semakin

Urbanisasi

58,7%



58,7% penduduk Indonesia tinggal di kota pada 2024

akurat dan responsif. *Dashboard*, sistem GIS, hingga pelacakan indikator secara *real time* membantu pemerintah membaca dinamika kependudukan, memprediksi kebutuhan layanan, dan memastikan program tepat sasaran.

Perhatian besar juga diberikan pada pemerataan penduduk. Urbanisasi yang cepat telah memusatkan kegiatan ekonomi di kota-kota besar, menimbulkan tekanan pada transportasi, pemukiman, dan layanan publik. Untuk mengatasinya, RPJMN mengarahkan strategi pembangunan wilayah tertinggal, transmigrasi modern, dan desentralisasi yang memperkuat otonomi daerah. Transmigrasi tidak lagi hanya soal perpindahan penduduk, tetapi membangun pusat pertumbuhan berbasis potensi lokal dengan dukungan teknologi dan jaringan antarwilayah. Dengan pengembangan kota-kota menengah dan desa yang lebih mandiri, pemerataan pembangunan menjadi semakin mungkin diwujudkan.

Pendekatan siklus hidup juga menjadi landasan RPJPN dan RPJMN. Kebijakan memastikan penduduk mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan di setiap fase kehidupan, kesehatan ibu dan anak, pendidikan dan informasi reproduksi bagi remaja, keterampilan bagi usia produktif, hingga perlindungan bagi lanjut usia. Pendekatan ini memperkuat kualitas hidup penduduk secara menyeluruh dan jangka panjang.

Isu kelanjutusiaan diatur lebih rinci melalui Perpres Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan. Pemerintah menata layanan kesehatan ramah lansia, memperkuat jaminan sosial, memperluas pemberdayaan lansia melalui komunitas produktif, dan mendorong pembangunan kota serta fasilitas umum yang lebih inklusif. Kebijakan ini turut membuka ruang bagi berkembangnya *silver economy*, sektor ekonomi yang memanfaatkan peluang dari meningkatnya populasi lansia melalui

Transmigrasi tidak lagi hanya soal perpindahan penduduk, tetapi membangun pusat pertumbuhan berbasis potensi lokal dengan dukungan teknologi dan jaringan antarwilayah.

inovasi teknologi, hunian ramah lansia, dan layanan perawatan modern.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas utama. Revitalisasi pendidikan vokasi dilakukan melalui kemitraan antara sekolah kejuruan, perguruan tinggi vokasi, dan industri. Program pemagangan, sertifikasi kompetensi, dan *link and match* memperkuat daya saing generasi muda. Program Kartu Prakerja, BLK modern, dan BLK Komunitas melengkapi upaya ini dengan pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja era digital.

Seluruh kebijakan ini selaras dengan komitmen Indonesia pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dalam SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), pemerintah memperkuat layanan kesehatan dasar, mempercepat penurunan *stunting*, menurunkan kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan akses layanan kesehatan reproduksi. Program promotif dan preventif diperkuat di seluruh siklus kehidupan untuk meningkatkan umur harapan hidup dan produktivitas.

Di bawah SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), kebijakan diarahkan untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah melalui pemerataan akses pendidikan yang inklusif, penguatan tenaga pendidik, serta transformasi digital pendidikan. Dengan begitu, generasi muda memiliki keterampilan yang relevan dengan ekonomi masa depan dan pembangunan berkelanjutan. Untuk SDG 5 (Kesetaraan Gender), arah kebijakan menekankan peningkatan peran perempuan dalam pendidikan, ekonomi, dan kepemimpinan publik. Perlindungan dari kekerasan berbasis gender diperkuat, dan kesempatan kerja serta akses ekonomi bagi perempuan diperluas.

Sementara Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (SDG 8) menjadi dasar bagi pengembangan sumber daya manusia kompeten serta penciptaan lapangan kerja produktif. Pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan masa depan, dan dukungan kewirausahaan menjadi strategi untuk memanfaatkan bonus demografi secara optimal dan menekan pengangguran terbuka.

Sinergi lintas sektor, antara kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesetaraan gender, menjadi kunci agar seluruh penduduk memperoleh manfaat pembangunan secara merata. Pendekatan berbasis wilayah dan siklus hidup memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga inklusif. Keseluruhan kebijakan ini dibangun di atas paradigma *People-Centered Development*, yang menempatkan penduduk sebagai pusat pembangunan. Dengan arah kebijakan yang komprehensif, data yang kuat, kolaborasi pemerintah dan masyarakat, serta fokus pada kualitas manusia, Indonesia berada pada jalur yang kuat untuk memanfaatkan momentum demografi dan bergerak menuju status negara maju pada 2045.

Penduduk yang unggul, sejahtera, dan merata adalah fondasi Indonesia Emas. Dan fondasi itu sedang dibangun hari ini secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Momentum transformasi kependudukan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki fondasi kuat untuk melompat lebih jauh. Dengan kebijakan yang berpihak pada kualitas manusia, pemerataan wilayah, serta pemanfaatan teknologi dan data yang semakin presisi, setiap program dapat diarahkan secara lebih efektif dan inklusif. 🌟



Keluarga Berencana

Fakta di Balik Turunnya Kelahiran di Indonesia.

Di tengah laju pertumbuhan penduduk yang terus melambat, satu program tetap menjadi penopang utama kebijakan kependudukan Indonesia: Keluarga Berencana. Sejak dulu KB identik dengan pengendalian jumlah penduduk, namun kini perannya jauh lebih strategis. Program ini bukan lagi sekadar distribusi alat kontrasepsi, tetapi bagian integral dari bagaimana negara memastikan bahwa setiap keluarga dapat merencanakan masa depan dengan lebih baik.

Perubahan paling jelas terlihat pada tingkat penggunaan kontrasepsi atau *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR). Angkanya terus bergerak naik sejak 2021, ketika CPR berada pada level 44 persen. Hanya dalam tiga tahun, penggunaan kontrasepsi melonjak menjadi 63,4 persen pada 2024. Kenaikan hampir 20 persen dalam waktu singkat ini merupakan salah satu indikasi terkuat bahwa layanan KB semakin menjangkau lebih banyak pasangan usia subur.

Di saat yang sama, *Total Fertility Rate* (TFR, angka rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan, turun dari 2,24 menjadi 2,11. Penurunan ini mungkin terlihat kecil, namun arah trennya jelas: keluarga Indonesia semakin terencana. Hubungan keduanya sangat kuat. Analisis korelasi menunjukkan koefisien sebesar $-0,997$, angka yang hampir sempurna untuk menggambarkan bahwa setiap peningkatan penggunaan kontrasepsi beriringan dengan penurunan angka kelahiran.

Pemerintah menaruh perhatian besar pada kontrasepsi modern, bukan tanpa alasan. Metode-metode seperti IUD, implan, suntik, pil, dan operasi kontrasepsi memberikan perlindungan yang lebih efektif dan lebih stabil dibandingkan metode tradisional. Pada 2021, penggunaan kontrasepsi modern mencapai 92,2 persen di antara pasangan usia subur yang ber-KB. Tiga tahun kemudian, angkanya melonjak hampir menyentuh universal:

98,8 persen. Namun di balik keberhasilan itu, data menunjukkan cerita yang lebih kompleks.

Kesenjangan penggunaan kontrasepsi modern antarprovinsi masih sangat lebar. Kalimantan Selatan mencatat capaian tertinggi, mencapai 71,8 persen, sementara Papua hanya 22,4 persen. Ada lima provinsi yang penggunaannya masih di bawah 50 persen, termasuk DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua Barat. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa akses dan preferensi masyarakat terhadap alat kontrasepsi masih dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial, budaya, dan ketersediaan layanan.

Kondisi tersebut menuntut strategi berbeda. Daerah dengan penggunaan kontrasepsi modern yang sudah tinggi perlu menjaga kesinambungan layanan dan memastikan jenis kontrasepsi sesuai dengan tujuan keluarga. Misalnya, pasangan yang ingin membatasi kelahiran seharusnya diprioritaskan untuk metode jangka panjang seperti IUD, implan, atau operasi. Sementara untuk yang

hanya ingin menjarangkan kehamilan, metode jangka pendek seperti suntik atau pil bisa menjadi pilihan. Kesesuaian metode dengan tujuan ber-KB berpengaruh langsung pada keberhasilan program dan menekan risiko kehamilan yang tidak direncanakan.

Sebaliknya, provinsi dengan capaian rendah membutuhkan intervensi yang lebih intensif, baik melalui edukasi, peningkatan akses layanan kesehatan, maupun ketersediaan alat kontrasepsi. Kebijakan berbasis hak tetap menjadi prinsip utama: setiap pasangan usia subur harus bebas menentukan metode KB yang paling sesuai dengan kondisi kesehatannya.

Di balik angka-angka penggunaan kontrasepsi tersebut, terdapat satu indikator lain yang menjadi perhatian: *unmet need*. Ini adalah kelompok pasangan usia subur yang ingin menunda atau membatasi kelahiran, tetapi belum menggunakan kontrasepsi. Pada 2021 angkanya masih 18 persen, lalu turun menjadi 11,1 persen pada 2024. Meski capaian ini menunjukkan kemajuan, angkanya belum mencapai target RPJMN 2020–2024 yang menetapkan target 7,4 persen. Di tingkat provinsi, kesenjangannya lebih mencolok. Papua mencatat *unmet need* tertinggi, mencapai 30,8 persen, sementara Nusa Tenggara Barat berada di posisi terendah dengan 5,9 persen. Hanya dua provinsi yang telah mencapai target nasional, yaitu Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Selatan.

Masalah lain yang sering kali luput dari perhatian publik adalah putus pakai kontrasepsi atau *Discontinuation Contraceptive Rate* (DCR). Ini mengukur berapa banyak pengguna KB yang berhenti

Di balik angka-angka penggunaan kontrasepsi tersebut, terdapat satu indikator lain yang menjadi perhatian: *unmet need*. Ini adalah kelompok pasangan usia subur yang ingin menunda atau membatasi kelahiran, tetapi belum menggunakan kontrasepsi.

menggunakan kontrasepsi dalam 12 bulan pertama. Tingkat putus pakai nasional pada 2024 berada di angka 20,2 persen, sedikit di atas target 20 persen. Lebih dari sepertiga pengguna pil menghentikan pemakaian dalam tahun pertama. Kondisi serupa terlihat pada pengguna kondom dengan tingkat putus pakai 28,8 persen dan suntik 27,5 persen. Dominasi metode jangka pendek menjadi salah satu penyebab angka ini sulit ditekan, karena metode ini menuntut kedisiplinan dan konsistensi tinggi.

Kontrasepsi jangka panjang memberikan gambaran berbeda. Metode seperti IUD, implan, MOW, atau MOP memiliki tingkat putus pakai jauh lebih rendah dan perlindungan lebih stabil. Pemerintah terus mendorong peningkatan penggunaannya, terutama pada pasangan yang membutuhkan pembatasan jumlah anak. Namun keberhasilan kebijakan ini tetap bergantung pada edukasi, keterampilan tenaga kesehatan, dan kenyamanan pengguna dalam memilih metode yang sesuai.

Peta provinsi kembali menunjukkan variasi besar. DKI Jakarta mencatat tingkat putus pakai tertinggi, mencapai 46,2 persen, sementara Kalimantan Tengah mencatat angka terendah, hanya 16,7 persen. Perbedaan ini menggarisbawahi bahwa akses layanan kesehatan, preferensi masyarakat, dan intensitas program di tingkat lokal memainkan peran besar dalam keberhasilan KB.

Di tengah perubahan struktur umur penduduk dan peluang bonus demografi, program KB bukan lagi sekadar alat pengendali jumlah penduduk. Ia menjadi strategi jangka panjang yang memastikan kualitas hidup keluarga Indonesia tetap terjaga.

Tingkat putus pakai nasional pada 2024 berada di angka 20,2 persen, sedikit di atas target 20 persen. Lebih dari sepertiga pengguna pil menghentikan pemakaian dalam tahun pertama. Kondisi serupa terlihat pada pengguna kondom dengan tingkat putus pakai 28,8 persen dan suntik 27,5 persen.

Dengan mengurangi kehamilan tidak direncanakan, meningkatkan akses layanan reproduksi, dan memperkuat kapasitas tenaga kesehatan, KB berkontribusi langsung pada ketahanan keluarga dan kualitas penduduk.

Indonesia mungkin telah menurunkan laju pertumbuhan penduduk, namun tantangan baru selalu hadir. Perbedaan antarwilayah, kebutuhan pengguna, kualitas layanan, dan dinamika usia subur menuntut kebijakan yang adaptif. Di sinilah program KB menemukan bentuk barunya: bukan hanya kampanye nasional, tetapi upaya yang terus disesuaikan dengan kondisi setiap provinsi, setiap keluarga, dan setiap pasangan usia subur yang ingin merencanakan masa depannya dengan lebih baik. ✨



Photo by: Fauzan / Unsplash

Angkatan Kerja

Tenaga Kerja Menguat, Ketimpangan Menyempit.

Indonesia memasuki 2024 dengan lanskap ketenagakerjaan yang menunjukkan arah yang semakin menjanjikan. Di tengah dinamika ekonomi global yang bergejolak, laporan Badan Pusat Statistik memperlihatkan geliat positif: Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 4,91 persen. Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi cerminan transformasi struktur ekonomi yang mulai menyerap tenaga kerja lebih luas dan lebih beragam. Tren penurunan pengangguran ini konsisten berlangsung selama satu dekade terakhir, sekaligus menandai bahwa upaya memperluas lapangan kerja mulai menunjukkan hasil nyata.

Meski begitu, penurunan pengangguran tidak selalu merata. Daerah-daerah industri seperti Jawa Barat, Banten, dan Papua Barat Daya justru mencatat pengangguran yang lebih tinggi. Fenomena ini muncul karena wilayah industri menjadi magnet bagi pencari kerja dari berbagai daerah, sehingga tekanan

pasar kerja lebih besar dibandingkan wilayah agraris. Di sisi lain, daerah berbasis pertanian cenderung menyerap tenaga kerja lebih mudah, bahkan bagi penduduk dengan pendidikan dan keterampilan terbatas. Gambaran ini menegaskan bahwa angka pengangguran tidak selalu mencerminkan kualitas tenaga kerja, melainkan dinamika pasar kerja yang berbeda antardaerah.

Kekuatan tenaga kerja Indonesia juga terlihat dari meningkatnya jumlah angkatan kerja yang pada Agustus 2024 mencapai 152,11 juta orang, bertambah 4,40 juta dibanding setahun sebelumnya. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ikut meningkat menjadi 70,63 persen. Naiknya partisipasi ini memberi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk usia kerja yang terhubung dengan kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Sementara itu, jumlah penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja, seperti mereka yang masih

bersekolah atau mengurus rumah tangga, masih cukup besar, menunjukkan adanya ruang lebar bagi peningkatan kualitas dan produktivitas penduduk melalui pendidikan serta pemberdayaan ekonomi keluarga.

Dalam konteks persebaran wilayah, provinsi seperti Papua Pegunungan, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat menunjukkan partisipasi angkatan kerja yang sangat tinggi. Besarnya pasokan tenaga kerja di provinsi-provinsi tersebut membuka peluang bagi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, asalkan diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai dan peningkatan keterampilan kerja masyarakat.

Namun, tantangan penting masih hadir di sektor informal. Meski telah menurun dari tahun ke tahun, 57,95 persen pekerja Indonesia pada 2024 masih bekerja di sektor informal. Angka ini mencerminkan bahwa lebih dari separuh pekerja belum mendapatkan perlindungan sosial, kepastian pendapatan, atau jaminan ketenagakerjaan yang layak. Pekerja sektor informal umumnya berpendidikan rendah, berupah kecil, dan berisiko tinggi terhadap guncangan ekonomi. Pola ini paling banyak terlihat di Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Penurunan proporsi pekerja informal tetap menjadi salah satu pekerjaan rumah besar dalam pembangunan ketenagakerjaan.

Sementara itu, kesetaraan gender dalam pembangunan manusia mencatat perkembangan menggembirakan. Indeks Pembangunan Gender Indonesia berada dalam kategori tinggi, menandakan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan semakin

Tenaga Kerja Indonesia Dominan Sektor Informal (2024)

57,95%



mengecil dalam kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Meski demikian, masih terdapat 11 provinsi dengan nilai IPG di bawah 90. Di wilayah-wilayah tersebut, perempuan masih lebih tertinggal dalam hal pendidikan, kesempatan kerja, dan akses terhadap layanan dasar. Namun perbaikan terus berlangsung. Indeks Ketimpangan Gender menunjukkan penurunan setiap tahun, menandakan perbaikan serentak di tiga aspek: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan akses pasar kerja.

Di bidang kesehatan reproduksi, jumlah perempuan muda yang melahirkan di bawah usia 20 tahun semakin kecil, dan mayoritas perempuan kini melahirkan di fasilitas kesehatan. Pada aspek pemberdayaan, memang masih ada ketimpangan besar, hanya 22,46 persen anggota legislatif yang perempuan. Namun tren kenaikan tetap terlihat, seiring kebijakan kuota 30 persen perempuan dalam politik yang terus didorong pemerintah.

Kemiskinan Nasional 8,47%

8,47% penduduk hidup dalam kemiskinan pada 2024



Pada dimensi pasar kerja, TPAK perempuan kini mencapai 56,42 persen, menunjukkan semakin banyak perempuan memasuki dunia kerja, seiring meningkatnya pendidikan mereka.

Sementara itu, upaya pengurangan kemiskinan menunjukkan capaian besar pada 2025. Persentase penduduk miskin menurun menjadi 8,47 persen, menjadi salah satu tingkat kemiskinan terendah dalam sejarah Indonesia. Penurunan ini tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga di pedesaan. Meski demikian, sejumlah provinsi seperti Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Timur masih mencatat angka kemiskinan yang tinggi. Sebaliknya, Bali, Kalimantan Selatan, dan DKI Jakarta menjadi daerah dengan persentase penduduk miskin terendah. Ketimpangan wilayah masih menjadi tantangan klasik, namun tren penurunan di seluruh pulau memperlihatkan arah yang semakin merata.

Gambaran serupa muncul pada kemiskinan ekstrem. Angkanya menurun dari 2,04 persen pada 2022 menjadi 1,74 persen pada 2023. Meskipun provinsi seperti Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur masih memiliki angka cukup tinggi, capaian nasional menunjukkan bahwa Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk menekan kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan.

Sementara itu, ketimpangan pendapatan, yang diukur dengan rasio Gini, turun kembali menjadi 0,381 setelah sempat meningkat pada 2023. Ketimpangan tertinggi masih berada di DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Jawa Barat, sementara ketimpangan terendah tercatat di Bangka Belitung. Penurunan ini menjadi indikator penting bahwa pemerataan pendapatan mulai bergerak ke arah yang lebih baik, didorong oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, dan perluasan akses pelayanan sosial.

Dengan berbagai capaian tersebut, 2024 menjadi potret energi baru pembangunan Indonesia. Penurunan pengangguran, membaiknya partisipasi ekonomi warga, menurunnya kemiskinan ekstrem, serta peningkatan kesetaraan gender menjadi fondasi kuat menuju transformasi Indonesia yang lebih inklusif. Tantangan masih banyak, terutama terkait pekerja informal, ketimpangan wilayah, dan kualitas pendidikan tenaga kerja. Namun tren positif dalam hampir semua indikator memberi alasan bagi optimisme: Indonesia bergerak menuju struktur masyarakat yang semakin produktif, lebih setara, dan makin tangguh menghadapi perubahan ekonomi global. ✨



Dari Desa ke Kota

Membaca Masa Depan Urbanisasi Indonesia.

Di banyak wilayah Indonesia, perubahan besar sering kali tidak datang dalam bentuk gedung-gedung pencakar langit atau pusat perbelanjaan megah. Ia bergerak lebih halus: jalan-jalan baru yang menghubungkan desa ke kota, kios-kios kecil yang tumbuh di pinggir pasar kecamatan, dan anak-anak muda yang mulai berangkat kuliah atau bekerja ke kota terdekat. Semua dinamika itu adalah bagian dari proses besar bernama urbanisasi, pergeseran kehidupan dari karakter pedesaan ke perkotaan yang kini menentukan arah pembangunan Indonesia.

Urbanisasi tidak sekadar menghitung berapa banyak orang yang pindah ke kota. Ia mengukur transformasi cara hidup: dari mata pencaharian yang dulu sangat bergantung pada pertanian menjadi ke sektor jasa dan industri, dari mobilitas berbasis jarak dekat menjadi mobilitas harian yang padat, hingga perubahan gaya hidup, pola konsumsi, dan ekspektasi

terhadap layanan publik. Ketika BPS mencatat tingkat urbanisasi, yang dihitung adalah berapa persen warga Indonesia tinggal di wilayah yang memenuhi tiga kriteria utama, kepadatan penduduk, rendahnya ketergantungan pada sektor pertanian, dan akses fasilitas dasar, maka sesungguhnya kita sedang membaca peta masa depan.

Data 2024 menunjukkan kontras yang begitu lebar antarwilayah. Di satu ujung spektrum, provinsi-provinsi seperti Papua Pegunungan yang tingkat urbanisasinya hanya sekitar 7,04 persen, Sulawesi Barat 20,27 persen, Papua Tengah 24,41 persen, Nusa Tenggara Timur 26,52 persen, dan Maluku Utara 29,10 persen masih didominasi kehidupan pedesaan. Angkanya bukan sekadar statistik; ia mencerminkan realitas pembangunan yang tertahan. Di banyak tempat, jalan rusak, konektivitas digital belum memadai, dan pusat-pusat ekonomi modern belum tumbuh. Penduduk sulit berpindah karena transportasi minim,

sementara pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi. Dalam situasi seperti itu, dorongan untuk bermigrasi ke kota tidak sekuat seperti di wilayah yang infrastrukturnya lebih siap.

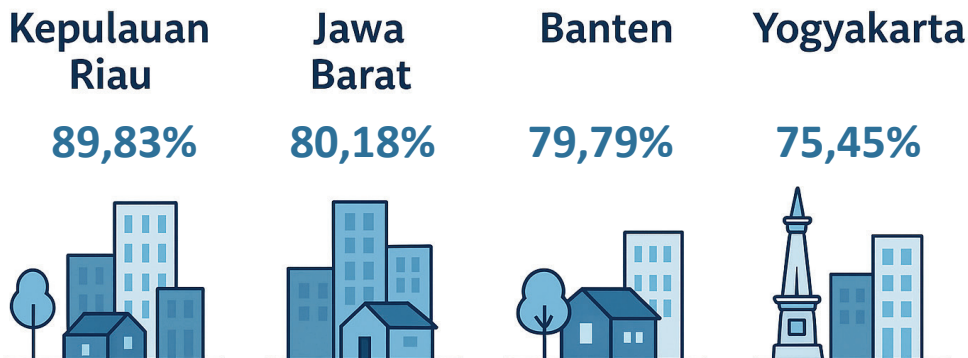
Sebaliknya, wilayah seperti DKI Jakarta telah mencapai 100 persen urban. Di sana, pemisahan antara desa dan kota sudah tidak relevan. Jakarta adalah magnet besar yang menarik penduduk dari seluruh Indonesia, didorong oleh peluang ekonomi yang tidak tertandingi: sektor industri, perdagangan, layanan modern, dan fasilitas pendidikan unggulan. Provinsi lain mengikuti jejak yang sama, Kepulauan Riau dengan tingkat urbanisasi 88,56 persen, Jawa Barat 79,47 persen, Banten 77,66 persen, dan DI Yogyakarta 75 persen. Daerah-daerah ini tumbuh pesat karena dukungan infrastruktur kuat: jalan tol antarwilayah, bandara, pelabuhan, kereta, transportasi publik modern, dan akses fasilitas yang lebih lengkap.

Dari dua gambaran ekstrem tersebut, terlihat satu pola besar: keberhasilan urbanisasi selalu bertumpu

pada akses, konektivitas, dan kesempatan ekonomi. Tempat-tempat yang jauh dari pusat kegiatan ekonomi nasional, yang bergantung pada pertanian dan memiliki kondisi geografis menantang, mengalami urbanisasi yang lambat. Sementara wilayah dengan industri yang berkembang dan layanan publik yang lebih siap mengalami urbanisasi yang cepat, kadang terlalu cepat sehingga menimbulkan tantangan baru seperti kemacetan, polusi, hunian yang tidak terjangkau, serta kesenjangan sosial yang semakin terasa.

Tantangan terbesar Indonesia adalah bagaimana mengelola dua arus yang bergerak berbeda ini. Di provinsi yang tingkat urbanisasinya rendah, penduduk masih menghadapi masalah dasar: layanan publik yang terbatas, akses kesehatan yang jauh, sekolah yang tidak merata mutunya, dan kesempatan ekonomi yang tidak berkembang. Tanpa intervensi pemerintah, daerah-daerah ini akan terus tertinggal. Butuh investasi besar di sektor non-pertanian, pembangunan infrastruktur jalan dan internet, serta

Tingkat Urbanisasi



penyiapan kawasan industri kecil atau jasa yang bisa menciptakan ekonomi lokal baru. Ketika peluang ekonomi mulai tumbuh, penduduk akan lebih terdorong untuk bergerak ke kota-kota kecil atau kawasan pusat pertumbuhan baru, bukan hanya ke kota-kota besar.

Namun, di wilayah yang tingkat urbanisasinya tinggi seperti Jakarta, Jawa Barat, atau Banten, persoalannya sangat berbeda. Kemacetan yang panjang, polusi udara, tekanan terhadap ruang kota, dan ketimpangan antara penduduk lama dan pendatang menjadi isu sehari-hari. Di banyak kota besar, pembangunan berjalan lebih cepat daripada kapasitas pemerintah menyediakan layanan publik. Akibatnya, kualitas hidup tidak otomatis meningkat meski urbanisasi tinggi. Kota-kota besar membutuhkan pendekatan berbeda: pemerataan pusat pertumbuhan, pengembangan kota satelit, penguatan konektivitas antarkota, serta pengurangan beban pusat kota.

Kesenjangan antarwilayah, antara kota maju dan desa tertinggal, antara Jawa dan luar Jawa, antara pusat dan pinggiran, tidak dapat diatasi jika

kebijakan pembangunan hanya berfokus pada kota-kota besar. Urbanisasi yang sehat adalah urbanisasi yang merata: kota-kota kecil yang tumbuh, kawasan industri baru yang muncul di luar Jawa, dan daerah pedesaan yang berkembang menjadi pusat ekonomi lokal. Ketika pertumbuhan terdistribusi, tekanan pada kota besar dapat berkurang, dan kesempatan ekonomi menyebar lebih luas.

Pemerintah perlu memandang urbanisasi bukan sebagai persoalan kota semata, tetapi sebagai strategi nasional. Provinsi dengan urbanisasi rendah membutuhkan prioritas pengembangan ekonomi baru berbasis potensi lokal, mulai dari pariwisata, industri pengolahan berbasis sumber daya alam, hingga pertanian modern berbasis teknologi. Sementara provinsi urban harus memperkuat kualitas hidup melalui perbaikan layanan publik, pengendalian polusi, dan perencanaan ruang yang lebih berkelanjutan.

Urbanisasi, pada akhirnya, adalah cerita tentang mobilitas masyarakat dalam mencari kehidupan yang lebih baik. Ini adalah refleksi harapan jutaan orang yang ingin akses lebih dekat terhadap pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan masa depan yang lebih cerah. Namun tanpa perencanaan yang tepat, urbanisasi dapat memperlebar jurang antara yang maju dan tertinggal. Dengan strategi pembangunan yang lebih merata, Indonesia dapat memastikan bahwa transformasi dari desa menuju kota bukan sekadar perubahan tempat tinggal, tetapi juga peningkatan kualitas hidup bagi semua, baik mereka yang tinggal di pusat kota maupun mereka yang hidup di pedesaan. ✨

Provinsi dengan urbanisasi rendah membutuhkan prioritas pengembangan ekonomi baru berbasis potensi lokal—mulai dari pariwisata, industri pengolahan berbasis sumber daya alam, hingga pertanian modern berbasis teknologi.



Di Simpang Demografi

Strategi Indonesia Menuju 2025–2045.

Tahun 2024 menjadi penanda berakhirnya RPJMN 2020–2024, sebuah periode pembangunan yang diwarnai pandemi, percepatan digitalisasi, tekanan ekonomi global, dan perubahan sosial yang begitu cepat. Namun lebih dari itu, tahun ini juga menjadi titik evaluasi penting: apakah Indonesia telah cukup siap menapaki fase demografi berikutnya, puncak bonus demografi pertama, yang segera diikuti oleh realitas struktur penduduk menua.

Lima tahun ke depan akan menjadi fase krusial. Penduduk usia produktif masih mendominasi, tetapi jendelanya semakin sempit. Di saat bersamaan, jumlah lansia tumbuh lebih cepat dari perkiraan. Bila tidak dikelola dengan tepat, bonus demografi bisa hilang tanpa jejak, dan Indonesia akan memasuki era *aging population* tanpa fondasi yang kokoh. Karena itu, arah kebijakan kependudukan perlu digeser: bukan hanya fokus pada jumlah, tetapi pada kualitas, distribusi, dan daya saing manusia Indonesia dalam lanskap global yang berubah cepat.

Tantangan yang dihadapi tidak kecil. Perubahan iklim memengaruhi pola hunian dan mata pencaharian. Transformasi digital membuka peluang baru sekaligus memperlebar jurang keterampilan. Urbanisasi meningkat, tetapi tidak selalu diikuti kesiapan kota. Di tengah dinamika geopolitik, ketahanan nasional makin bertumpu pada kualitas penduduknya. Seluruh tekanan itu menuntut Indonesia memiliki strategi demografi yang jauh lebih adaptif dan inklusif.

Laporan Kependudukan Indonesia Tahun 2025 disusun untuk membaca perubahan besar ini. Ia menjadi cermin untuk melihat capaian RPJMN sebelumnya, sekaligus kompas bagi kebijakan lima tahun mendatang. Dengan merujuk pada lima pilar Grand Design Pembangunan Kependudukan, laporan ini menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan dan menegaskan bahwa keberhasilan menuju Indonesia Emas 2045 akan sangat ditentukan oleh kualitas penduduk saat ini.

Keluarga menjadi perhatian besar dalam periode berikutnya. Data menunjukkan masih tingginya perceraian, pernikahan usia anak, kesenjangan layanan dasar, dan kerentanan ekonomi rumah tangga.

Pada aspek pengendalian kuantitas penduduk, isu fertilitas kembali mencuat. Indonesia perlu menjaga tingkat kelahiran ideal pada level penggantian (TFR 2,1), namun dengan pendekatan yang berbeda di setiap wilayah. Ada provinsi yang angka kelahirannya sudah rendah dan membutuhkan dukungan ekosistem keluarga ramah anak agar tidak turun terlalu jauh. Ada pula yang masih mencatat tingkat kelahiran tinggi dan memerlukan penguatan layanan kesehatan reproduksi, peningkatan akses KB, dan penyediaan tenaga kesehatan di wilayah terpencil. Di tengah perubahan nilai dan meningkatnya fenomena *childfree*, kebijakan fertilitas tidak lagi dapat mengandalkan pendekatan tunggal: ia harus menyeimbangkan hak individu, kebutuhan ekonomi keluarga, dan arah pembangunan nasional.

Di bidang kualitas penduduk, agenda utamanya adalah memastikan setiap warga tumbuh sehat, terdidik, produktif, dan adaptif terhadap perubahan.

Masalah-masalah lama seperti *stunting*, disparitas pendidikan antardaerah, dan kesenjangan layanan kesehatan masih memerlukan intervensi serius. Di saat yang sama, tuntutan baru muncul: keterampilan digital, literasi hijau, hingga kesiapan memasuki ekonomi cerdas (*smart economy*). Pendidikan vokasi perlu direvitalisasi agar bersambung langsung ke dunia kerja. Program kesehatan masyarakat harus lebih bersifat promotif dan preventif. Dan perempuan, yang partisipasi ekonominya masih tertahan oleh beban pengasuhan dan akses kerja yang timpang, perlu diberikan dukungan sistematis agar bisa mengambil peran lebih besar di pasar tenaga kerja.

Keluarga menjadi perhatian besar dalam periode berikutnya. Data menunjukkan masih tingginya perceraian, pernikahan usia anak, kesenjangan layanan dasar, dan kerentanan ekonomi rumah tangga. Di banyak wilayah, literasi pengasuhan, kesehatan, dan keuangan masih rendah. Padahal, keluarga adalah unit paling awal yang menentukan kualitas generasi mendatang. Penguatan keluarga berarti memperkuat karakter, nilai kebangsaan, ketahanan ekonomi, kesehatan mental, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi. Tantangannya semakin kompleks, terutama ketika pola pengasuhan berubah, hubungan sosial bergeser ke ruang digital, dan tekanan hidup meningkat. Pembangunan keluarga tidak lagi bisa dilakukan dengan pendekatan konvensional.

Keberimbangan persebaran penduduk juga menjadi agenda strategis. Jawa dan Sumatera semakin padat, sementara wilayah Indonesia Timur

sebagian besar masih berpenduduk jarang. Urbanisasi terus meningkat, tetapi tidak selalu sejalan dengan kesiapan tata ruang dan layanan dasar. Kota-kota besar menghadapi tekanan mobilitas harian, biaya hidup, hingga penurunan kualitas lingkungan. Tanpa penataan mobilitas dan persebaran penduduk yang terarah, kesenjangan wilayah akan semakin melebar. Karena itu, pengembangan pusat pertumbuhan baru, penguatan konektivitas, dan integrasi kebijakan demografi dengan tata ruang menjadi langkah yang tidak dapat ditunda.

Di sisi administrasi kependudukan, arah kebijakannya semakin jelas: setiap penduduk harus memiliki identitas hukum tunggal yang aman dan terintegrasi. NIK menjadi fondasi utama bagi layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga keamanan digital. Modernisasi sistem administrasi kependudukan berbasis teknologi bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal keadilan: data yang akurat dan mutakhir memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari sistem pelayanan negara.

Indonesia sedang berada di persimpangan demografi yang menentukan. Jika potensi penduduk usia kerja dimaksimalkan, Indonesia bisa melonjak menjadi kekuatan ekonomi besar.

Integrasi lintas sektor, perlindungan data pribadi, dan pembaruan data *real-time* menjadi bagian dari arsitektur kependudukan masa depan. Dengan sistem yang terhubung dari pusat hingga daerah, kebijakan pembangunan dapat dibuat lebih presisi dan efektif.

Semua perubahan ini mengarah pada satu hal: Indonesia sedang berada di persimpangan demografi yang menentukan. Jika potensi penduduk usia kerja dimaksimalkan, Indonesia bisa melonjak menjadi kekuatan ekonomi besar. Namun jika dilewatkan, negara akan memasuki era penduduk menua dalam keadaan belum siap, beban kesehatan meningkat, produktivitas menurun, dan ketimpangan membesar.

RPJMN berikutnya harus menjawab tantangan itu. Butuh kebijakan demografi yang visioner, berbasis data, dan berpihak pada pembangunan manusia. Butuh kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat sipil. Dan yang paling penting, butuh keberanian untuk menyesuaikan strategi dengan perubahan zaman yang bergerak jauh lebih cepat daripada periode-periode sebelumnya.

Bila seluruh upaya ini dijalankan secara konsisten, Indonesia tidak hanya siap menghadapi puncak bonus demografi, tetapi juga mampu memasuki era penduduk menua dengan percaya diri. Pada akhirnya, pembangunan kependudukan bukan sekadar mengelola angka, tetapi memastikan setiap warga dapat tumbuh, berkembang, dan berkontribusi bagi masa depan bangsa, sebuah syarat mutlak menuju visi Indonesia Emas 2045. ✨





Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN



Bagian 4

STRUKTUR SOSIAL, KERENTANAN, DAN IDENTITAS WARGA

Tidak semua penduduk memiliki suara yang sama. Ada yang tidak punya akta, ada yang hidup dengan disabilitas, ada yang mengalami kekerasan dalam diam, ada yang tertinggal dari pendidikan dan layanan dasar. Bagian ini mendekatkan kita pada sisi gelap pembangunan: mereka yang “tidak tercatat” atau “tak terjangkau negara”, padahal merekalah yang paling membutuhkan perhatian.



Pembangunan Manusia

Kualitas Manusia Indonesia Sedang Bergerak Naik.

Indonesia terus bergerak menuju kualitas hidup yang lebih baik, dan perjalanan itu tergambar jelas dalam data pembangunan manusia beberapa tahun terakhir. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu cermin yang menggambarkan bagaimana masyarakat Indonesia berkembang. Bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari segi kesehatan, pendidikan, dan kesempatan hidup layak. IPM pertama kali diperkenalkan dunia pada tahun 1990, dan bagi Indonesia, ukuran ini kini bukan sekadar angka, melainkan kompas untuk melihat apakah kebijakan negara benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pada tahun 2024, IPM Indonesia mencapai 75,02 dan menempatkan negara ini dalam kategori tinggi. Angka itu naik dari 74,39 pada tahun sebelumnya, melanjutkan tren peningkatan konsisten sejak 2020. Peningkatan sebesar 0,63 poin dalam setahun mungkin tampak kecil, tetapi

dalam ukuran pembangunan manusia, lompatan seperti ini menandakan perubahan nyata dalam kualitas hidup masyarakat. Selama empat tahun terakhir, IPM Indonesia tumbuh rata-rata 0,75 persen per tahun, sebuah indikasi bahwa sejumlah program pendidikan, kesehatan, dan ekonomi telah menyentuh sasaran. Bila laju ini bertahan, peluang Indonesia untuk memasuki kategori IPM sangat tinggi, level negara-negara maju, bukan lagi sekadar harapan jangka panjang.

Peningkatan IPM nasional juga mencerminkan keberhasilan banyak provinsi bergerak ke arah yang sama. Sebagian besar daerah berada di kategori tinggi, sementara dua provinsi bahkan sudah melesat ke kategori sangat tinggi: DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Namun, gambaran ini belum sepenuhnya merata. Kawasan timur Indonesia masih berjuang mengejar ketertinggalan, terutama dalam akses pendidikan dan pelayanan kesehatan,

yang pada akhirnya berdampak pada daya beli dan kualitas hidup keluarga. Peta pembangunan nasional menunjukkan bahwa percepatan di wilayah-wilayah ini menjadi kunci untuk menyamakan kualitas hidup lintas daerah.

Pendidikan memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu indikatornya adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yang pada 2024 mencapai 9,22 tahun secara nasional, setara tamat SLTP. Peningkatan tahunannya memang kecil, namun tetap progresif. Yang menarik adalah pola ketimpangan yang tampak di sejumlah wilayah. Beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Maluku, dan Kalimantan Timur mencatat RLS lebih dari 10 tahun, menandakan masyarakatnya sudah menikmati akses pendidikan menengah atas secara luas. Sebaliknya, provinsi-provinsi seperti Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Kalimantan Barat masih berada di bawah 8 tahun. Ketimpangan ini berarti sebagian besar orang dewasa di wilayah tersebut belum menamatkan pendidikan setingkat SLTP, sebuah tantangan yang menghambat peningkatan kualitas hidup dalam jangka panjang.

Meskipun begitu, partisipasi sekolah menunjukkan perkembangan yang patut diapresiasi. Hampir semua anak usia sekolah dasar dan menengah pertama bersekolah, dengan angka partisipasi di atas 96 persen. Tantangan mulai muncul pada jenjang usia SMA, di mana sekitar seperempat anak usia 16–18 tahun tidak bersekolah. Ketimpangan antarprovinsi kembali terlihat: Di Yogyakarta mencatat angka partisipasi lebih dari 90 persen untuk kelompok

usia SMA, sementara Papua Tengah dan Papua Pegunungan masih berada di bawah 60 persen. Kondisi geografis, kemiskinan, dan keterbatasan sekolah menjadi faktor utama yang menjelaskan jurang antarwilayah ini.

Di sisi lain, pendidikan tinggi juga menunjukkan tren menggembirakan. Proporsi lulusan SLTA dan perguruan tinggi meningkat signifikan sejak 2010. Pada 2024, hampir 31 persen penduduk dewasa telah menamatkan SLTA, sementara lulusan pendidikan tinggi meningkat menjadi 10,20 persen. Dua angka ini menggambarkan arah yang lebih cerah bagi masa depan kualitas tenaga kerja Indonesia, sekaligus menunjukkan keberhasilan berbagai program beasiswa, wajib belajar, serta pembangunan sarana pendidikan dalam membuka kesempatan belajar bagi lebih banyak orang.

Kesehatan menjadi dimensi penting lainnya dalam pembangunan manusia. Umur Harapan Hidup (UHH) nasional pada 2024 mencapai 72,39 tahun. Meskipun masih berada di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, tren peningkatannya konsisten. Perempuan di Indonesia memiliki UHH hampir empat tahun lebih panjang dibanding laki-laki, mencerminkan perbedaan faktor biologis dan perilaku kesehatan. Meskipun di tingkat nasional peningkatannya stabil, provinsi-provinsi di timur Indonesia masih menunjukkan angka yang relatif lebih rendah dan membutuhkan perhatian khusus dalam perluasan layanan kesehatan dasar, perbaikan gizi, dan peningkatan fasilitas kesehatan masyarakat.



Tren Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2024

Indikator kesehatan ibu dan bayi juga memperlihatkan perkembangan positif sekaligus tantangan besar. Angka Kematian Ibu (AKI) berdasarkan Long Form SP2020 tercatat sebesar 189 per 100.000 kelahiran hidup, turun hampir setengah dari lebih dari satu dekade terakhir. Penurunan ini tidak lepas dari kampanye pencegahan kehamilan berisiko dan meningkatnya kualitas layanan antenatal dan postnatal. Namun, angka ini masih jauh di atas target SDGs sebesar 70, dan disparitas antarprovinsi sangat mencolok. Provinsi Papua, misalnya, mencatat AKI hingga 565, berbanding sangat jauh dengan DKI Jakarta yang hanya 48. Jurang ini menunjukkan bahwa kualitas layanan kesehatan ibu masih sangat tergantung lokasi geografis dan ketersediaan tenaga medis.

Perbaikan juga tampak dalam angka kematian bayi dan balita. Angka Kematian Bayi (AKB) turun dari 26 per 1.000 kelahiran pada 2010 menjadi 16,85 pada 2020, sementara Angka Kematian Balita menjadi 3 per 1.000 balita. Namun ketimpangan wilayah kembali muncul, terutama di Papua dan Papua Barat yang masih mencatat angka kematian balita mendekati 50 per 1.000. Salah satu penjelasan utamanya adalah masih rendahnya cakupan imunisasi. Data Susenas 2024 menyebutkan baru sekitar 63,69 persen anak usia 12–23 bulan menerima imunisasi dasar lengkap, dengan wilayah pedesaan mencatat cakupan lebih rendah dibanding perkotaan.

Banyak daerah terpencil masih mengandalkan fasilitas kesehatan dasar dengan sumber daya yang terbatas. Akses transportasi yang sulit membuat penanganan darurat ibu dan bayi kerap terlambat. Sementara itu, kesenjangan literasi kesehatan juga memperbesar risiko bagi kelompok rentan.

Perjalanan pembangunan manusia Indonesia memperlihatkan bahwa kemajuan nasional tidak terlepas dari tantangan pemerataan. Kemajuan secara agregat menegaskan kemampuan negara mendorong perubahan kualitas hidup, tetapi jurang antarmasyarakat mengingatkan bahwa upaya harus lebih terarah. Dengan penguatan layanan kesehatan primer, perluasan akses pendidikan, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, serta penguatan ekonomi keluarga, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah, sekaligus mempersiapkan generasi masa depan yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih produktif. ✨



Yang Tak Terlihat

Disabilitas, Kekerasan, dan Tantangan Inklusivitas dalam Keluarga.

Di banyak keluarga Indonesia, ada anggota yang hadir setiap hari tetapi sering luput dari perhatian kebijakan dan percakapan publik: mereka yang hidup dengan disabilitas, mereka yang pernah menjadi korban kekerasan, dan mereka yang tinggal dalam kondisi fisik yang membuat mereka lebih rentan daripada yang terlihat di permukaan. Potret ini muncul kuat ketika kita membaca ulang berbagai survei nasional: dari pengalaman hidup perempuan hingga laporan kondisi anak dan data disabilitas. Gambaran yang tersaji bukan hanya statistik, tetapi refleksi ketidakterjangkauan layanan, minimnya perlindungan, serta belum meratanya inklusivitas di dalam keluarga dan komunitas.

Temuan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional tahun 2024 menunjukkan satu kenyataan yang penting: sekitar satu dari empat perempuan berusia 15–64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sepanjang hidupnya. Meski

angka ini lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, skalanya tetap besar. Itu berarti jutaan perempuan menjalani hidup dengan pengalaman traumatis yang berpotensi memengaruhi kesehatan mental, relasi sosial, hingga kemampuan ekonomi mereka. Kekerasan terhadap perempuan, baik yang terjadi di ruang publik maupun dalam rumah sendiri, bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan struktur sosial dan budaya, tentang bagaimana perempuan diposisikan, bagaimana relasi kuasa dibentuk, dan bagaimana norma gender dijalankan.

Kondisi serupa terlihat pada temuan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024. Sekitar 11,5 juta anak Indonesia berusia 13–17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan, fisik, emosional, atau seksual. Kasus yang paling banyak dialami adalah kekerasan emosional, yang hampir separuh anak pernah

merasakannya. Di balik angka itu ada situasi yang sulit: anak-anak yang tumbuh dengan takut bersuara, sulit membangun kepercayaan diri, atau mengembangkan perilaku agresif sebagai mekanisme bertahan hidup. Dampaknya tak berhenti pada masa remaja; mereka bisa terbawa hingga dewasa, memengaruhi kualitas hubungan dan kemampuan mereka berpartisipasi secara produktif dalam masyarakat.

Di sisi lain, kelompok penyandang disabilitas berada dalam posisi yang tak kalah rentan. Data Long Form SP2020 menunjukkan prevalensi disabilitas tipe 1 mencapai 6,42 persen penduduk usia lima tahun ke atas. Artinya, dalam setiap 100 orang, terdapat enam hingga tujuh individu dengan keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Angka ini lebih tinggi untuk perempuan (7,09 persen) dibanding laki-laki (5,77 persen), memperlihatkan tumpang tindih antara kerentanan berbasis gender dan disabilitas. Lebih dari itu, disparitas antarprovinsi sangat lebar: Gorontalo mencatat prevalensi tertinggi 8,66 persen, sedangkan Papua hanya 4,58 persen. Perbedaan ini mengisyaratkan faktor struktural seperti layanan kesehatan, akses pendidikan, umur penduduk, dan kondisi sosial ekonomi yang memengaruhi tingkat disabilitas.

Situasi pendidikan penyandang disabilitas juga memperlihatkan kesenjangan besar. Hampir 70 persen penyandang disabilitas tipe 1 hanya tamat SD atau bahkan tidak pernah sekolah. Kondisi ini tidak hanya membatasi peluang kerja mereka di masa depan, tetapi juga memperkuat lingkaran kemiskinan. Tanpa pendidikan yang inklusif, ramah disabilitas, dan didukung fasilitas fisik maupun

pelatihan yang memadai, potensi mereka sulit berkembang. Padahal sektor-sektor pekerjaan mulai membuka ruang bagi pekerja disabilitas, meski sebagian besar masih terkonsentrasi di pertanian dan jasa yang tak selalu menawarkan perlindungan sosial yang kuat.

Isu kekerasan dan disabilitas sesungguhnya bertemu pada satu titik yang sama: kebutuhan akan perlindungan dan sistem layanan yang inklusif. Anak-anak penyandang disabilitas, misalnya, menghadapi risiko lebih tinggi terhadap kekerasan karena keterbatasan komunikasi, akses pendidikan, atau minimnya pengawasan. Sementara itu, perempuan penyandang disabilitas kerap menghadapi hambatan berlapis ketika mengalami kekerasan, mulai dari kesulitan melapor hingga stigma yang membuat mereka dianggap “tidak kredibel.”

Hampir 70 persen penyandang disabilitas tipe 1 hanya tamat SD atau bahkan tidak pernah sekolah. Kondisi ini tidak hanya membatasi peluang kerja mereka di masa depan, tetapi juga memperkuat lingkaran kemiskinan.

Dalam konteks pembangunan keluarga, tantangan ini menuntut pendekatan inklusif yang lebih kuat. Arah kebijakan keluarga yang selaras dengan tujuan SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) dan SDG 5 (Kesetaraan Gender) mengharuskan negara memastikan setiap anggota keluarga, termasuk penyandang disabilitas, memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Pendekatan keluarga berperspektif gender, misalnya, menekankan pentingnya pembagian peran yang setara, pengambilan keputusan bersama, dan hilangnya diskriminasi baik berbasis gender maupun usia. Prinsip ini juga harus mencakup mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau kognitif.

Selain kerangka hukum, strategi untuk memperkuat inklusivitas juga harus menyentuh ranah domestik: bagaimana keluarga menerima anggota yang hidup dengan disabilitas, bagaimana mereka mengelola konflik tanpa kekerasan, dan bagaimana mereka membangun rumah tangga sebagai ruang yang aman. Di tingkat masyarakat, dibutuhkan lebih banyak ruang pendidikan dan layanan publik yang ramah disabilitas, mulai dari transportasi, fasilitas kesehatan, hingga lapangan pekerjaan. Sementara itu, program perlindungan sosial perlu diperkuat untuk memastikan perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas tidak jatuh dalam kerentanan ekonomi yang membuat mereka semakin sulit melindungi diri.

Indonesia memiliki modal besar untuk bergerak ke arah ini. Penurunan prevalensi kekerasan, peningkatan kepemilikan jaminan kesehatan, serta semakin

**Di tingkat masyarakat,
dibutuhkan lebih banyak ruang
pendidikan dan layanan publik
yang ramah disabilitas, mulai
dari transportasi, fasilitas
kesehatan, hingga lapangan
pekerjaan.**

banyaknya provinsi yang mengembangkan kebijakan keluarga ramah disabilitas menunjukkan langkah awal yang signifikan. Namun perjalanan menuju inklusivitas penuh masih panjang. Menghapus kekerasan dan memperkuat hak bagi penyandang disabilitas bukan hanya agenda sektoral, tetapi prasyarat untuk membangun keluarga Indonesia yang sehat, kuat, dan berdaya.

Akhirnya, mereka yang sering tak terlihat dalam statistik ini harus ditempatkan kembali di pusat perhatian. Keluarga yang inklusif adalah fondasi masyarakat yang berkeadilan. Ketika perempuan aman, anak terlindungi, dan penyandang disabilitas diberi ruang untuk tumbuh, maka pembangunan keluarga tidak hanya berjalan, ia benar-benar berpihak pada semua.

Membangun bangsa yang inklusif berarti memastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal di balik batas kemampuan, usia, atau kondisi sosialnya. Ke depan, Indonesia membutuhkan keberanian untuk memperluas cakupan perlindungan dan memperdalam layanan yang benar-benar responsif terhadap kerentanan. ✨



Di Balik Setiap Nama

Lika-Liku Negara Membangun Identitas Warga.

Administrasi kependudukan mungkin terdengar seperti urusan kantor kelurahan yang penuh formulir dan antrean. Namun di balik proses yang tampak rutin itu, ada salah satu fondasi terpenting bagi berjalannya negara modern: pengakuan resmi terhadap identitas setiap warganya. Nomor Induk Kependudukan, akta kelahiran, buku nikah, hingga akta kematian, semuanya bukan sekadar dokumen, melainkan tiket untuk mengakses hak-hak dasar sebagai warga negara.

Selama empat tahun terakhir, Indonesia mencatat kemajuan besar dalam pendaftaran identitas dasar. Sejak 2021 hingga 2024, cakupan NIK bagi balita 0–4 tahun dan kelompok usia 17 tahun ke atas mencapai 100 persen. Artinya, sejak lahir hingga memasuki usia dewasa, hampir semua warga telah tercatat secara resmi dalam sistem negara. Bagi anak-anak, pencatatan ini memastikan akses pada imunisasi, jaminan kesehatan, dan sekolah. Bagi orang dewasa,

NIK adalah syarat utama untuk bekerja, membuka rekening bank, mengikuti pemilu, dan menikmati layanan negara lainnya. Data terbaru menunjukkan lebih dari 266 juta penduduk usia 5 tahun ke atas telah memiliki NIK, bersama 207,6 juta warga usia 17 tahun ke atas, dan hampir 19 juta balita. Di atas kertas, angka ini mencerminkan upaya besar pemerintah memperluas jangkauan layanan. Namun ketika menelusuri dokumen penting lainnya, cerita yang muncul tidak sesederhana itu.

Akta kelahiran misalnya, meski cakupannya naik di semua kelompok usia, masih dihantui kesenjangan yang besar. Untuk anak usia 0–4 tahun, rata-rata nasional telah mencapai 95,4 persen. Bahkan di Jakarta, Yogyakarta, dan Gorontalo angkanya mendekati 100 persen. Namun situasinya sangat berbeda di Papua Pegunungan yang baru mencapai 41,8 persen, jauh tertinggal dari wilayah lain. Ketimpangan serupa terjadi pada kelompok usia lebih tua. Untuk usia 5



61,9%

Secara nasional, 61,9 persen peristiwa perceraian pada 2024 tercatat secara resmi, naik dari 49,6 persen pada 2021.



91%

Lebih dari 91 persen kematian tercatat sebagai akibat sakit atau faktor usia, tetapi 6,6 persen tidak memiliki penyebab.

tahun ke atas, cakupan nasional hanya 48,4 persen, dan untuk usia 17 tahun ke atas malah jatuh ke angka 34,9 persen. Di beberapa provinsi seperti Papua Pegunungan, hanya 6,5 persen penduduk dewasa yang pernah memiliki akta kelahiran seumur hidupnya, kesenjangan historis yang kini terasa akibat minimnya pencatatan di masa lalu.

Perbedaan akses makin nyata ketika menengok dokumen perkawinan. Meski ada kemajuan, dari 43 persen pasangan yang punya akta perkawinan pada 2021 menjadi 62,9 persen pada 2024, ketimpangan antarwilayah tetap mencolok. Yogyakarta mencatat cakupan 88 persen, sementara Papua Pegunungan hanya 3 persen. Dokumen cerai pun memperlihatkan pola yang sama. Secara nasional, 61,9 persen peristiwa

perceraian pada 2024 tercatat secara resmi, naik dari 49,6 persen pada 2021, tetapi banyak provinsi masih tertinggal. Di Papua Pegunungan, hanya 5 persen dari pasangan yang bercerai memiliki akta perceraian, sementara Yogyakarta mencapai 86 persen.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa proses pencatatan kependudukan di Indonesia bukan hanya soal administrasi, tetapi juga soal geografi, infrastruktur, literasi, dan bahkan budaya. Di banyak wilayah timur Indonesia, akses layanan masih sulit karena jarak tempuh yang jauh, keterbatasan SDM, dan minimnya teknologi. Sebagian masyarakat belum melihat pentingnya pencatatan peristiwa sipil. Di wilayah perkotaan, kendalanya berbeda: tingginya mobilitas, antrian panjang, dan kesulitan birokrasi.

Pencatatan kematian pun menggambarkan persoalan lain. Pada 2024, lebih dari 91 persen kematian tercatat sebagai akibat sakit atau faktor usia, tetapi 6,6 persen tidak memiliki penyebab yang teridentifikasi. Angka ini setara dengan lebih dari 144 ribu kematian tanpa data penyebab yang jelas, suatu celah besar dalam kualitas statistik hayati yang seharusnya menjadi dasar perencanaan kesehatan publik.

Di tengah tantangan itu, pemerintah terus memperbaiki mekanisme pencatatan melalui SIAK Terpusat dan sistem digital lainnya. Namun integrasi data antarinstansi masih jauh dari mulus. BPJS, BPS, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, hingga lembaga perbankan memerlukan data kependudukan yang konsisten, tetapi harmonisasi data masih kerap tersandung oleh perbedaan sistem, kapasitas teknis, dan kesiapan daerah. Transformasi digital juga menuntut kesiapan regulasi yang memadai, dari identitas digital hingga perlindungan data pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2022 menjadi pijakan baru, tetapi implementasinya masih membutuhkan banyak peraturan turunan.

Isu administrasi kependudukan menjadi semakin kompleks ketika menyentuh kelompok rentan: masyarakat adat di wilayah terpencil, penyandang disabilitas, lansia yang hidup sendiri, pengungsi domestik akibat konflik atau bencana, hingga WNA pemegang izin tinggal tetap. Bagi mereka, layanan administrasi kependudukan bukan hanya soal ketertiban data, tetapi syarat untuk bisa mengakses layanan dasar, sering kali layanan yang menjadi penentu kualitas hidup.

Upaya memperbaiki semua ini memerlukan strategi yang bukan hanya teknis, tetapi juga sosial. Layanan jemput bola, mobil keliling, digitalisasi prosedur, edukasi masyarakat, hingga penguatan kapasitas aparatur desa menjadi bagian dari solusi. Namun pekerjaan terbesar terletak pada pemerataan: memastikan warga di pelosok Papua memiliki akses pencatatan yang sama dengan warga Jakarta; memastikan setiap peristiwa hidup—lahir, menikah, bercerai, meninggal—diakui negara secara setara.

Administrasi kependudukan bukan sekadar catat-an. Ia adalah identitas, akses, perlindungan, dan pengakuan. Selama masih ada warga yang lahir tanpa akta, menikah tanpa pencatatan, bercerai tanpa dokumen, atau meninggal tanpa identitas jelas, negara belum sepenuhnya hadir. Dan selama kesenjangan antar-wilayah tetap selebar hari ini, pekerjaan rumah administrasi kependudukan masih jauh dari selesai. Namun kemajuan yang tercatat dalam empat tahun terakhir menunjukkan satu hal yang pasti: fondasi itu sedang dibangun. Pelan, tetapi bergerak. Dan dari fondasi itulah, masa depan pelayanan publik yang adil, berbasis data, dan inklusif akan ditentukan.

Ke depan, keberhasilan administrasi kependudukan tidak hanya diukur dari capaian persentase dokumen, tetapi dari seberapa jauh layanan ini mampu menjangkau setiap warga tanpa kecuali. Ketika integrasi data berjalan mulus, ketika pencatatan menjadi mudah diakses dari kota hingga pelosok, dan ketika identitas hukum benar-benar menjadi pintu masuk bagi layanan negara yang lebih adil, maka administrasi kependudukan tidak lagi dipandang sebagai urusan teknis, tetapi sebagai fondasi keadilan sosial. ✨



Membaca IPBK 2024

Keberlanjutan Melesat, Inklusivitas Tertinggal.

Indonesia mencatat satu langkah maju dalam pembangunan berwawasan kependudukan. Nilai Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) nasional tahun 2024 naik menjadi 61,8, meningkat 1,7 poin dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini tampak menggembirakan, namun ketika lima dimensi penyusunnya dilihat lebih dekat, kita menemukan cerita yang jauh lebih kompleks, bahkan kontras.

Dimensi Keberlanjutan menjadi penyumbang tertinggi dengan skor 72,0, sedikit mengungguli Dimensi Partisipasi yang berada di angka 71,9. Dua capaian ini mencerminkan bahwa arah pembangunan Indonesia relatif selaras dengan prinsip keberlanjutan dan bahwa masyarakat sudah terlibat cukup aktif dalam proses pembangunan. Dimensi Kesenjangan menyusul dengan nilai 64,7, cukup baik di atas kertas, meskipun masih banyak tantangan yang menahan laju kesetaraan itu sendiri. Ketimpangan pendapatan

antara rumah tangga kaya dan miskin masih lebar, dan jumlah perempuan di posisi manajerial formal belum menunjukkan kemajuan signifikan.

Cerita berbeda muncul pada dua dimensi terendah: Holistik Integratif dan Inklusivitas. Keduanya punya nilai jauh di bawah harapan. Holistik Integratif di angka 53,3 dan Inklusivitas bahkan lebih rendah lagi, hanya 50,4. Padahal dua dimensi ini adalah fondasi penting untuk memastikan pembangunan benar-benar menyentuh seluruh penduduk tanpa kecuali. Angka-angka itu menunjukkan bahwa persoalan seperti *stunting*, akses terhadap informasi, transportasi publik, perkawinan usia dini, hingga kepemilikan akta kelahiran balita masih menjadi pekerjaan rumah negara. Sementara rendahnya skor Inklusivitas mengindikasikan bahwa kelompok rentan, yaitu penduduk miskin, disabilitas, lansia—belum terlibat sepenuhnya dalam arus pembangunan.

Meski semua dimensi mengalami kenaikan dibanding tahun 2023, peningkatan tersebut berjalan tidak merata. Dimensi Keberlanjutan melonjak paling tinggi. Naik 2,4 poin, hingga mengambil alih posisi puncak dari Dimensi Partisipasi. Dimensi Holistik Integratif juga memperlihatkan peningkatan cukup signifikan, naik 1,9 poin. Sementara peningkatan terkecil terjadi pada Dimensi Inklusivitas, hanya bertambah 1,1 poin. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa kemajuan tidak bergerak bersamaan, padahal filosofi IPBK menekankan bahwa lima dimensi tersebut harus tumbuh serentak agar pembangunan berwawasan kependudukan benar-benar kokoh.

IPBK tidak berhenti pada angka. Indeks ini digunakan untuk menilai kondisi pembangunan berwawasan kependudukan di tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Pemerintah daerah diminta memanfaatkan hasil IPBK untuk memetakan

masalah, merumuskan kebijakan, dan menentukan prioritas pembangunan. Masyarakat luas pada akhirnya akan menjadi penerima manfaat, mulai dari akses pendidikan, kesehatan, layanan sosial, hingga kesempatan ekonomi yang lebih baik.

Tahun ini, LKI membawa fokus tematik baru: lansia. Indonesia telah resmi memasuki era *aging population* sejak 2021, ketika proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas melewati angka 10 persen. Pada 2045, jumlah itu diperkirakan melonjak sehingga satu dari lima penduduk Indonesia adalah lansia. Pergeseran demografis ini membuat indikator “Lansia Mandiri” menjadi semakin penting dalam IPBK.

Indikator ini menggambarkan persentase lansia yang sehat, aktif bekerja, dan memiliki kondisi fisik normal. Capaian nasional tahun 2024 berada di angka 34,55 persen, naik dari 31,80 persen pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan perbaikan, meski tidak merata antarwilayah. Provinsi Papua Pegunungan tampil mengejutkan sebagai yang tertinggi dengan 67,74 persen, hampir dua dari tiga lansia di wilayah ini masih aktif dan mandiri. Dua provinsi lain di Papua mengikuti di belakang. Sebaliknya, Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi dengan capaian terendah hanya 27,96 persen, diikuti DKI Jakarta dan Kepulauan Riau. Ironisnya, provinsi dengan proporsi lansia terbesar seperti DI Yogyakarta dan Jawa Timur hanya berada di posisi tengah.

Temuan ini memperlihatkan dua hal penting. Pertama, tingginya Lansia Mandiri di provinsi-provinsi Papua bukan karena jumlah lansianya

Tahun ini, LKI membawa fokus tematik baru: lansia. Indonesia telah resmi memasuki era *aging population* sejak 2021, ketika proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas melewati angka 10 persen.

banyak, melainkan karena mereka yang masuk kategori lansia masih tetap bekerja dan relatif lebih aktif secara fisik. Kedua, daerah dengan porsi lansia besar justru menunjukkan tantangan yang lebih besar dalam menjaga kemandirian warganya yang berusia lanjut.

Indonesia kini berada pada titik penting: jumlah lansia terus naik, tetapi belum semua wilayah mampu memastikan mereka tetap berdaya. Banyak lansia yang masih bekerja bukan hanya karena ingin produktif, tetapi karena tuntutan ekonomi dan belum meratanya perlindungan hari tua. Meski begitu, keberadaan lansia aktif seharusnya tidak dilihat sebagai beban, melainkan aset yang membawa pengalaman dan pengetahuan berharga bagi pembangunan.

IPBK 2024 memperlihatkan bahwa Indonesia bergerak ke arah yang lebih baik, tetapi masih ada kesenjangan besar yang perlu diseberangi. Angka-angka yang naik memang layak diapresiasi, namun yang lebih penting adalah memastikan kenaikan itu dirasakan oleh seluruh penduduk.

Ke depan, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dalam menghadapi era populasi menua. Kesehatan, jaminan sosial, peluang kerja yang ramah lansia, dan lingkungan hidup yang mendukung kemandirian menjadi aspek penting yang tidak boleh terlewat. Di saat bersamaan, kualitas pembangunan berwawasan kependudukan mesti ditingkatkan secara merata lintas dimensi agar tidak ada satu pun kelompok yang tertinggal.

IPBK 2024 memperlihatkan bahwa Indonesia bergerak ke arah yang lebih baik, tetapi masih ada kesenjangan besar yang perlu diseberangi. Angka-angka yang naik memang layak diapresiasi, namun yang lebih penting adalah memastikan kenaikan itu dirasakan oleh seluruh penduduk. Dari kota hingga pelosok, dari bayi hingga lansia. Sebab, pada akhirnya pembangunan manusia adalah tujuan akhir dari segala pembangunan.

Perjalanan menuju pembangunan berwawasan kependudukan yang matang masih panjang, tetapi arah perubahannya sudah terlihat jelas. Jika seluruh dimensi IPBK terus ditingkatkan secara menyeluruh, bukan hanya keberlanjutan dan partisipasi, tetapi juga inklusivitas serta integrasi layanan, Indonesia dapat memastikan bahwa setiap fase kehidupan penduduk, termasuk masa lansia, dijalani dengan martabat dan peluang yang setara.

Dengan komitmen kebijakan yang konsisten, data yang akurat, dan keberpihakan pada kelompok yang paling rentan, pembangunan manusia tidak lagi menjadi janji, melainkan kenyataan yang dirasakan di seluruh penjuru negeri. ❀



Kesadaran Kependudukan

Antara Harapan Baru dan Kesenjangan Lama.

Di tengah perubahan sosial yang cepat, ada satu tren yang jarang dibahas namun diam-diam menentukan masa depan Indonesia: meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap isu kependudukan. Kesadaran ini bukan muncul begitu saja. Ia lahir dari meningkatnya akses informasi, pengalaman hidup sehari-hari, dan interaksi masyarakat dengan berbagai program pembangunan. Ketika warga memahami bagaimana pertumbuhan penduduk, arus migrasi, urbanisasi, dan distribusi sumber daya memengaruhi hidup mereka, maka lahirlah sikap baru yang lebih reflektif dalam merespons tantangan demografis.

Pengetahuan tentang kependudukan ternyata membentuk cara masyarakat mengambil keputusan. Mereka mulai lebih berhati-hati merencanakan keluarga, lebih sadar pentingnya kesehatan reproduksi, dan mulai memahami bahwa perubahan demografi, dari bonus demografi sampai penuaan

penduduk, bukan abstraksi statistik, melainkan bagian dari strategi bertahan hidup. Karena itu, pendidikan kependudukan tidak lagi dipandang sebagai kewajiban birokrasi, tetapi sebagai fondasi literasi masa depan.

BKKBN sejak 2013 mencoba mengukur denyut pemahaman publik lewat sebuah alat ukur sederhana. Namun perjalanan waktu menghadirkan kebutuhan yang lebih kompleks. Masyarakat tidak cukup hanya paham; mereka harus peduli, bersikap, dan bertindak. Dari sinilah lahir Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK), sebuah indikator baru yang menilai pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap isu-isu demografis melalui empat dimensi besar: Kuantitas, Kualitas, Mobilitas, dan Lingkungan. Jika pengetahuan adalah langkah pertama, maka sikap dan perilaku adalah bukti bahwa kesadaran itu bekerja. IKIK menjadi alat penting untuk melihat gambaran besar sekaligus memeriksa detail

di setiap daerah. Melalui indeks ini, pemerintah bisa mengetahui daerah mana yang partisipasi publiknya kuat, mana yang perlu dorongan, dan mengapa hasilnya berbeda. Sebab kesadaran demografis tidak pernah berdiri di ruang hampa; ia dipengaruhi budaya, akses pendidikan, kondisi ekonomi, hingga geografi. Daerah yang tertinggal secara informasi mungkin memerlukan sosialisasi dan edukasi lebih intensif, sementara daerah yang sudah sadar membutuhkan program yang mampu mengubah kesadaran menjadi aksi nyata.

Hasil IKIK nasional 2024 memperlihatkan sinyal optimistis. Nilai nasional mencapai 53,68, sedikit melampaui target 2024 sebesar 53,40, dengan status nasional berada pada kategori Sedang. Meskipun bukan angka spektakuler, capaian ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami pentingnya isu kependudukan dalam kehidupan sehari-hari. Data ini disusun berdasarkan berbagai indikator BPS, mulai dari Susenas hingga Sakernas, sehingga cerminan yang dihasilkan cukup kokoh.

Di balik capaian tersebut, terdapat cerita ketimpangan. Nilai IKIK provinsi bervariasi sangat lebar: Kalimantan Timur memimpin dengan 67,11, sedangkan Papua berada di titik terendah dengan 26,24. Daerah yang berada di papan atas umumnya memiliki akses informasi lebih baik, tingkat pendidikan lebih tinggi, dan program edukasi yang lebih intensif. Sebaliknya, daerah dengan IKIK rendah biasanya bergulat dengan tantangan geografis, minim literasi, dan sosialisasi program yang belum merata. Hanya 13 provinsi yang berada di atas rata-rata nasional, sementara 15 provinsi justru berada pada kategori

Rendah. Ketika ditelusuri lebih dalam, variasi tersebut muncul karena kinerja dimensi IKIK yang berbeda-beda. Dimensi Kuantitas mencatat nilai tertinggi (56,74), disusul Lingkungan (56,12) dan Kualitas (55,18). Namun Dimensi Mobilitas tertinggal jauh di belakang dengan nilai 47,25. Rendahnya nilai ini berkaitan dengan turunnya mobilitas fisik penduduk, perubahan pola kerja, dan melambatnya arus urbanisasi. Kondisi ini juga sejalan dengan semakin banyaknya masyarakat yang bekerja jarak jauh atau memilih tidak berpindah karena faktor ekonomi dan sosial yang berubah.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, peningkatan IKIK 2024 memang hanya 0,22 poin, tetapi peningkatan kecil ini penting karena dicapai di tengah situasi sosial-ekonomi yang penuh dinamika. Dimensi Kualitas dan Lingkungan meningkat,

**Hasil IKIK nasional 2024
memperlihatkan sinyal
optimistis. Nilai nasional
mencapai 53,68, sedikit
melampaui target 2024 sebesar
53,40, dengan status nasional
berada pada kategori Sedang.**

Masyarakat Indonesia sedang bergerak menuju tahap literasi demografis yang lebih matang. Tahap ketika keputusan keluarga, perilaku kesehatan, hingga kepedulian lingkungan dibangun atas dasar pemahaman yang lebih baik.

menunjukkan perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan akses air bersih. Namun dua dimensi lainnya justru menurun, terutama Dimensi Kuantitas yang turun dari 58,16 ke 56,74. Penurunan ini diperkirakan terkait turunnya penggunaan kontrasepsi, meningkatnya perkawinan usia muda, dan perubahan pola keluarga.

Penurunan Dimensi Mobilitas juga menjadi tanda bahwa kesempatan mobilitas sosial dan geografis masyarakat belum pulih sepenuhnya. Di beberapa wilayah, keterbatasan lapangan kerja, tekanan biaya hidup kota, hingga perlambatan urbanisasi membuat masyarakat cenderung tetap berada di daerah asal. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kepedulian tidak berjalan seiring dengan peningkatan kesempatan. Dari semua temuan itu, satu pesan

besar mengemuka: untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap isu kependudukan, intervensi tidak boleh dilakukan secara seragam. Setiap daerah perlu kebijakan yang disesuaikan dengan konteks lokal, mulai dari literasi, perilaku, hingga struktur ekonomi. Pendekatan berbasis kebutuhan inilah yang akan membuat IKIK benar-benar relevan sebagai alat navigasi pembangunan.

Dengan meningkatnya nilai IKIK, meski perlahan, ada harapan baru bahwa isu kependudukan mulai mendapat tempat lebih penting dalam kesadaran publik. Masyarakat Indonesia sedang bergerak menuju tahap literasi demografis yang lebih matang. Tahap ketika keputusan keluarga, perilaku kesehatan, hingga kepedulian lingkungan dibangun atas dasar pemahaman yang lebih baik. Jika tren ini berlanjut, maka Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk menghadapi tantangan demografi dengan kepala tegak, mulai dari bonus demografi hingga penuaan penduduk.

Langkah berikutnya adalah memastikan bahwa kepedulian ini bertransformasi menjadi gerakan kolektif. Ketika pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan berjalan searah, menjadikan isu kependudukan sebagai bagian dari percakapan sehari-hari, keputusan keluarga, dan kebijakan publik, maka IKIK bukan hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi fondasi budaya baru: budaya yang sadar data, sadar risiko, dan sadar masa depan. Dari kesadaran itulah Indonesia dapat menavigasi perubahan demografis yang semakin kompleks dengan lebih percaya diri dan lebih siap menghadapi dekade-dekade mendatang. ✨





Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN



Bagian 5

KELUARGA: INTI DARI SEGALA PEMBANGUNAN INDONESIA

Setelah menelusuri peta besar demografi dan arah kebijakan, perjalanan ini tiba pada inti dari semua isu: keluarga. Di sinilah kualitas generasi ditentukan—mulai dari *stunting*, pendidikan, pernikahan anak, hingga lingkungan fisik rumah. Indonesia akan sekuat keluarga-keluarganya.



Keluarga Indonesia

Mengukur Lompatan Baru Pembangunan Keluarga.

Di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang cepat, arah pembangunan Indonesia kembali menegaskan satu prinsip dasar: keluarga adalah pusatnya. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 menempatkan pembangunan keluarga sebagai mandat besar yang sejajar pentingnya dengan pembangunan kependudukan. Karena pada akhirnya, kualitas penduduk Indonesia tidak dimulai di sekolah, pasar tenaga kerja, atau pusat layanan kesehatan, melainkan di dalam rumah, di lingkungan keluarga tempat nilai, kesehatan, dan ketahanan dirawat sejak awal kehidupan.

Kesadaran ini semakin relevan ketika melihat struktur penduduk Indonesia yang kini didominasi kelompok usia produktif. Kondisi tersebut merupakan buah dari keberhasilan program kependudukan dan keluarga berencana beberapa dekade terakhir. Namun peluang tersebut hanya dapat diubah menjadi daya saing apabila keluarga Indonesia

memiliki ketahanan yang kuat, mampu bertahan menghadapi tekanan ekonomi, perubahan sosial, hingga dinamika hubungan antaranggota keluarga. Di sinilah pembangunan keluarga mendapat tempat strategis.

Salah satu indikator penting yang menggambarkan kondisi tersebut adalah Indeks Pembangunan Keluarga atau iBangga. Indeks ini dikembangkan BKKBN sebagai alat ukur kualitas keluarga melalui tiga dimensi: ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Rentang skornya 0–100, dengan tiga kategori: rentan (di bawah 40), berkembang (40–70), dan tangguh (di atas 70). Indeks inilah yang membantu pemerintah menilai apakah upaya penguatan keluarga benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Sejak pertama kali diluncurkan pada 2021, skor nasional iBangga terus menunjukkan perbaikan. Pada tahun 2024, nilai nasional mencapai 62,4, meningkat satu poin dari tahun 2023. Dengan

Dimensi kebahagiaan menjadi penyumbang skor tertinggi dengan nilai 72,3, menggambarkan bahwa mayoritas keluarga Indonesia merasa cukup puas dan nyaman dengan kehidupan rumah tangganya.

capaian ini, keluarga Indonesia berada pada kategori berkembang, sebuah kemajuan konsisten yang menandakan bahwa berbagai program penguatan keluarga mulai membuahkan hasil. Dimensi kebahagiaan menjadi penyumbang skor tertinggi dengan nilai 72,3, menggambarkan bahwa mayoritas keluarga Indonesia merasa cukup puas dan nyaman dengan kehidupan rumah tangganya. Dimensi ketenteraman berada di posisi berikutnya dengan skor 61,6, sementara dimensi kemandirian berada di angka 53,3, sedikit turun dari tahun sebelumnya.

Penurunan kecil pada aspek kemandirian menjadi pengingat bahwa masih banyak keluarga yang menghadapi kerentanan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap kesempatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan jangka panjang. Data pendukung menunjukkan bahwa tantangan tersebut nyata. Susenas mencatat persentase

penduduk miskin pada 2025 berada di angka 8,47 persen, artinya jutaan keluarga masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Di sisi lain, data perceraian dari Mahkamah Agung menunjukkan 476.671 kasus pada 2024, dengan dua penyebab terbesar adalah perselisihan berkepanjangan dan tekanan ekonomi. Kedua data ini memperlihatkan pentingnya intervensi pembangunan keluarga yang lebih menyentuh aspek ketahanan mental, relasi, dan ekonomi rumah tangga.

Meskipun begitu, capaian nasional memberi banyak alasan untuk optimistis. Sebanyak 94,29 persen provinsi berhasil memenuhi target nasional iBangga tahun 2024, meningkat tajam dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 88,23 persen. Tren ini menandakan bahwa pembangunan keluarga bergerak ke arah yang benar dan meluas ke sebagian besar wilayah. Namun masih ada daerah yang tertinggal, terutama Papua dan Nusa Tenggara Timur, yang belum mencapai target. Disparitas ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih intensif dan kontekstual di wilayah-wilayah dengan tantangan geografis, ekonomi, dan sosial yang lebih berat.

Pemetaan skor iBangga juga memperlihatkan gambaran menarik. Di banyak provinsi, dimensi kebahagiaan hampir selalu berada pada posisi tertinggi. Kepulauan Riau mencatat skor kebahagiaan hingga 78, menjadikannya salah satu daerah dengan keluarga paling bahagia di Indonesia. DKI Jakarta mencatat skor tertinggi untuk dimensi ketenteraman dengan nilai 68,1, menunjukkan bahwa stabilitas sosial-ekonomi di kota besar dapat berkontribusi pada suasana rumah tangga yang lebih tenteram.

Namun untuk dimensi kemandirian, banyak provinsi masih berada di bawah skor nasional. Provinsi di kawasan timur seperti Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur masih mencatat nilai di bawah 60, memperlihatkan tantangan yang lebih besar dalam penguatan ekonomi keluarga, kualitas pendidikan, dan akses layanan.

Perbedaan antardaerah ini sekaligus menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan keluarga tidak hanya dipengaruhi oleh budaya dan nilai sosial, tetapi juga oleh ketimpangan akses ekonomi, pendidikan, dan layanan publik. Wilayah yang lebih maju cenderung memiliki skor lebih tinggi, sementara daerah dengan tingkat kemiskinan dan kerentanan sosial lebih besar menunjukkan nilai yang lebih rendah. Karena itu, strategi pembangunan keluarga tidak dapat bersifat satu model untuk semua, tetapi harus menyesuaikan karakteristik setiap wilayah.

Namun di balik berbagai variasi itu, sinyal paling penting tetaplah positif: keluarga Indonesia secara keseluruhan bergerak maju. Pembangunan keluarga semakin dipahami bukan sebagai program tambahan, tetapi sebagai fondasi strategis menuju Indonesia Emas 2045. Penguatan keluarga berarti memastikan generasi mendatang tumbuh dalam situasi yang sehat, stabil, dan penuh dukungan. Dengan demikian, pembangunan manusia dapat dimulai dari tempat yang paling menentukan: di rumah, di dalam keluarga.

Ketika kebijakan diarahkan pada peningkatan ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, Indonesia sesungguhnya sedang membangun pondasi jangka panjang untuk ketahanan bangsa. Dan

Keluarga Indonesia secara keseluruhan bergerak maju. Pembangunan keluarga semakin dipahami bukan sebagai program tambahan, tetapi sebagai fondasi strategis menuju Indonesia Emas 2045.

selama keluarga Indonesia makin kuat, peluang Indonesia untuk melangkah menuju masa depan yang lebih sejahtera dan berdaya saing akan semakin terbuka.

Langkah ke depan menuntut agar kebijakan penguatan keluarga tidak hanya mengatasi gejala, tetapi menyentuh akar tantangan yang dihadapi rumah tangga Indonesia. Itu berarti memperkuat ekosistem yang melingkupi keluarga; dari akses pendidikan dan kesehatan, peluang ekonomi, hingga lingkungan sosial yang aman dan inklusif. Bila dukungan ini terus diperluas dan dijalankan secara konsisten di seluruh wilayah, keluarga Indonesia tidak hanya akan berkembang, tetapi tumbuh menjadi pilar ketahanan bangsa yang sesungguhnya; sebuah fondasi yang memungkinkannya Indonesia melangkah percaya diri menuju visi 2045. ❀



Menuju Generasi Emas

Lomba Besar Indonesia yang Mulai Membuahkan Hasil.

Di balik setiap statistik tentang anak Indonesia, selalu ada cerita tentang masa depan. Karena itu, ketika angka *stunting* turun dari tahun ke tahun, kabar ini bukan sekadar perbaikan data, tetapi tanda bahwa investasi bangsa terhadap generasi mudanya mulai menunjukkan hasil nyata. *Stunting*, atau gangguan pertumbuhan yang membuat anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang, lama menjadi tantangan besar Indonesia. Masalah ini dapat muncul sejak masa 1000 Hari Pertama Kehidupan, bahkan sejak sebelum kehamilan ketika status gizi ibu belum optimal. Dampaknya tidak hanya pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif, imunitas, hingga risiko munculnya penyakit degeneratif ketika anak dewasa. Karena anak-anak adalah penopang pembangunan jangka panjang, isu *stunting* adalah isu masa depan Indonesia.

Jika melihat kembali satu dekade lalu, prevalensi *stunting* nasional berada di angka 37,2 persen pada 2013, lebih dari sepertiga anak Indonesia. Angka tersebut jauh di atas ambang 20 persen yang direkomendasikan WHO. Namun Indonesia bergerak cepat. Dalam lima tahun, Riskesdas 2018 mencatat penurunan menjadi 30,8 persen. Setahun kemudian, SSGBI 2019 menunjukkan kemajuan signifikan ke 27,7 persen. Pada 2021 angkanya turun lagi menjadi 24,4 persen, dan 21,6 persen pada 2022. Data terbaru dari Survei Status Gizi Indonesia 2024 menempatkan prevalensi *stunting* di angka 19,8 persen. Untuk pertama kalinya, Indonesia masuk ke bawah angka 20 persen. Ini adalah pencapaian penting yang dicapai melalui kolaborasi banyak sektor, mulai dari penyuluh keluarga berencana hingga pemerintah daerah, dari puskesmas hingga kader-kader kesehatan di kampung-kampung.

Meski tren penurunannya kuat, tantangan masih nyata. Target nasional menurunkan prevalensi menjadi 14 persen belum tercapai, dan masih perlu upaya besar sampai 2030. Ketimpangan antarwilayah masih lebar. Beberapa provinsi mencatat prevalensi di atas 30 persen, seperti Nusa Tenggara Timur (37 persen), Sulawesi Barat (35,4 persen), dan Papua Barat Daya (30,5 persen). Angka ini lima kali lipat lebih tinggi dibandingkan Bali yang mencatat prevalensi terendah Indonesia, 8,7 persen. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa persoalan akses dan layanan gizi belum merata. Banyak wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) masih terbentur persoalan dasar: tenaga kesehatan kurang, akses air minum layak terbatas, sanitasi belum memadai, serta ekonomi rumah tangga yang belum stabil.

Konteks ini penting, apalagi ketika Susenas 2024 memperlihatkan kesenjangan akses air bersih yang sangat lebar. Di Papua Pegunungan, hanya sekitar 30 persen keluarga yang memiliki akses air minum layak, dan sanitasi layak bahkan kurang dari 13 persen. Kondisi ini sangat erat kaitannya dengan tingginya risiko *stunting*, karena infeksi berulang pada anak semakin mudah terjadi dalam lingkungan yang tidak higienis. Faktor-faktor keluarga juga punya peran besar. Riset Halimatunnisa (2020) menunjukkan *stunting* sering berhubungan dengan rendahnya pendidikan orang tua, rendahnya kesejahteraan rumah tangga, kurang optimalnya gizi ibu saat kehamilan, serta pola pengasuhan yang belum memadai. Bahkan, kebiasaan merokok ayah turut meningkatkan risiko *stunting* pada anak. Kompleksitas inilah yang membuat penanganan *stunting* harus lintas sektor.

Untuk menjawab tantangan tersebut, strategi nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 digerakkan melalui lima pilar utama, mulai dari memperkuat komitmen pemerintah, memastikan komunikasi perubahan perilaku, meningkatkan konvergensi program, memperkuat ketahanan gizi, hingga membangun sistem data dan inovasi yang akurat. Selain intervensi spesifik, seperti pemberian tablet tambah darah dan pemantauan tumbuh kembang, pendekatan sensitif juga diintensifkan melalui perbaikan sanitasi, edukasi gizi keluarga, dan peningkatan ketahanan pangan rumah tangga.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menambah satu langkah besar: program nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto. Program ini menargetkan lebih dari 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari

Di Papua Pegunungan, hanya sekitar 30 persen keluarga yang memiliki akses air minum layak, dan sanitasi layak bahkan kurang dari 13 persen. Kondisi ini sangat erat kaitannya dengan tingginya risiko *stunting*, karena infeksi berulang pada anak semakin mudah terjadi dalam lingkungan yang tidak higienis.

Gerakan pencegahan *stunting* makin diperkuat dengan pelibatan keluarga secara langsung. Melalui program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*), keluarga-keluarga dengan balita berisiko mendapat pendampingan dan dukungan yang lebih intensif.

anak sekolah, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui. Dengan pendekatan masif ini, kualitas gizi diharapkan meningkat secara merata, terutama bagi keluarga rentan. Badan Gizi Nasional menjadi koordinator utama, sementara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN mengerahkan penyuluh KB, PLKB, dan kader IMP untuk memastikan distribusi dan pendampingan berjalan efektif hingga tingkat desa. Program Dapur Sehat Atasi *Stunting* (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas juga diperkuat untuk memastikan pemanfaatan makanan bergizi berjalan tepat sasaran.

Gerakan pencegahan *stunting* makin diperkuat dengan pelibatan keluarga secara langsung. Melalui program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*), keluarga-keluarga dengan balita berisiko mendapat pendampingan dan dukungan yang lebih intensif. Di saat yang sama, Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) mendorong peran ayah dalam

pengasuhan dan kesehatan keluarga agar tidak lagi dianggap tugas satu pihak saja. Pendekatan ini lahir dari bukti bahwa perubahan perilaku keluarga adalah fondasi paling penting dari pencegahan *stunting* yang berkelanjutan.

Dengan berbagai upaya terintegrasi ini, keyakinan bahwa Indonesia bisa mencapai target prevalensi 13,5 persen pada 2030 bukanlah optimisme kosong. Tren penurunan yang konsisten, kebijakan yang semakin konkret, dan kerja sama lintas sektor yang semakin kuat menunjukkan bahwa arah perjalanan sudah benar. Tantangannya tinggal memastikan bahwa setiap anak, di kota maupun di pedalaman, mendapatkan kesempatan tumbuh sehat dan kuat. Karena pada akhirnya, keberhasilan mengatasi *stunting* bukan sekadar persoalan kesehatan anak, ini adalah kerja besar untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia yang menjadi harapan pada 2045.

Keberhasilan menurunkan *stunting* pada dasarnya adalah keberhasilan menata masa depan bangsa, sebuah investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, kerja tidak berhenti pada turunnya persentase, tetapi pada memastikan bahwa setiap keluarga memiliki pengetahuan, akses, dan dukungan untuk menjaga tumbuh kembang anak secara optimal. Bila konsistensi kebijakan dijaga, kolaborasi terus diperluas, dan inovasi layanan diperkuat hingga ke pelosok terakhir, maka Indonesia bukan hanya akan menurunkan angka *stunting*, tetapi juga melahirkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan siap membawa Indonesia Emas 2045 dari cita-cita menjadi kenyataan. ✨



Photo by: Firman Fatthul / Unsplash

Usia Kawin Pertama

Apa Artinya bagi Bonus Demografi Indonesia?

Keputusan untuk menikah sering dianggap sebagai urusan pribadi semata. Namun, data menunjukkan bahwa usia ketika seseorang menikah untuk pertama kalinya diam-diam mengubah banyak hal: bagaimana ia menyelesaikan pendidikan, peluang pekerjaannya, risiko kesehatannya, hingga jumlah anak yang mungkin ia lahirkan. Di tingkat nasional, kumpulan keputusan itu membentuk pola pertumbuhan penduduk, kemampuan bangsa memanfaatkan bonus demografi, dan bahkan masa depan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, Median Umur Kawin Pertama (MUKP) bukan lagi sekadar angka statistik, ia adalah salah satu indikator penting untuk membaca arah perubahan sosial Indonesia.

Jika kita melihat peta global, perbedaan usia kawin pertama memengaruhi laju kelahiran di banyak negara. Kawasan Afrika Sub-Sahara seperti Nigeria

dan Ethiopia, dengan usia kawin pertama rata-rata di bawah 20 tahun, mencatat angka fertilitas total (TFR) yang sangat tinggi, lebih dari empat hingga lima anak per perempuan. Sebaliknya, negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan memiliki MUKP di atas 30 tahun dan TFR yang sangat rendah, bahkan mendekati satu. Ada pula negara seperti Swedia yang memiliki MUKP tinggi namun TFR sedikit lebih baik karena kebijakan pro-keluarga yang kuat: cuti melahirkan panjang, dukungan pengasuhan anak, dan layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses. Pola ini menunjukkan bahwa usia kawin pertama sangat berkaitan dengan fertilitas, namun konteks sosial dan kebijakan publik juga berperan besar.

Indonesia berada di tengah dua ekstrem tersebut. Dengan MUKP sekitar 22 tahun dan TFR sekitar 2,1, Indonesia masih menunjukkan pola negara

berkembang, dimana usia kawin relatif muda berkontribusi pada angka kelahiran yang moderat. Namun tren beberapa tahun terakhir memberi harapan. Setelah sempat turun dari 21,8 tahun pada 2017 ke angka terendah 20,7 tahun pada 2021, median usia kawin pertama kembali naik dan stabil di 22,3 tahun pada 2023 dan 2024. Kenaikan ini tidak terjadi begitu saja. Kampanye pendewasaan usia perkawinan, yaitu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki yang dijalankan BKKBN secara masif tampaknya mulai menunjukkan hasil.

Namun, gambaran nasional ini menyembunyikan ketimpangan besar antarwilayah. Di satu sisi, provinsi seperti DKI Jakarta, Papua Barat, Maluku, dan Papua menunjukkan MUKP yang lebih tinggi. Di daerah-daerah ini, perubahan sosial berlangsung cepat:

MUKP yang rendah seringkali berkaitan dengan risiko jangka panjang yang tidak kecil: kehamilan remaja, angka putus sekolah yang tinggi, kemiskinan antargenerasi, dan kerentanan kesehatan ibu maupun bayi.

akses pendidikan membaik, urbanisasi menciptakan peluang kerja baru, dan perempuan semakin aktif di ruang publik. Menunda pernikahan menjadi pilihan yang lebih wajar dan lebih mungkin dilakukan. Di sisi lain, provinsi seperti Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Barat tetap mencatat usia kawin yang rendah, sekitar 20,9 tahun. Di wilayah ini, norma budaya yang kuat, kondisi ekonomi yang menekan, serta terbatasnya akses pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi masih mendorong pernikahan dini.

Karena itu, MUKP tidak hanya berbicara tentang kapan seseorang menikah. Ia mencerminkan denyut sosial sebuah daerah: kualitas pendidikan, kesetaraan gender, pemahaman kesehatan reproduksi, hingga tekanan ekonomi keluarga. MUKP yang rendah seringkali berkaitan dengan risiko jangka panjang yang tidak kecil: kehamilan remaja, angka putus sekolah yang tinggi, kemiskinan antargenerasi, dan kerentanan kesehatan ibu maupun bayi. Bahkan, berbagai studi menunjukkan bahwa daerah dengan pernikahan dini cenderung memiliki angka *stunting* lebih tinggi. Dengan kata lain, keputusan menikah terlalu cepat dapat memengaruhi kualitas generasi yang akan lahir.

Itulah sebabnya, menunda usia kawin menjadi strategi penting dalam kebijakan kependudukan. Ketika usia kawin naik, peluang kehamilan di rentang usia reproduksi berkurang, sehingga angka fertilitas cenderung menurun. Dalam jangka panjang, hal ini membantu Indonesia mempertahankan pertumbuhan penduduk yang seimbang. Pada saat yang sama, generasi muda memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan lebih tinggi,

Data Kunci Demografi



TFR nasional mendekati
replacement

TFR Indonesia: 2,18



Ketimpangan fertilitas
antarwilayah sangat tajam

DKI Jakarta: 1,75
NTT: 2,79

Usia kawin pertama bukan sekadar keputusan pribadi yang diambil oleh pasangan muda. Ia memiliki implikasi jauh melampaui batas rumah tangga, menyangkut kualitas generasi mendatang, kesehatan ibu dan anak, dinamika penduduk, hingga daya saing bangsa dalam jangka panjang.

mendapatkan pekerjaan lebih baik, dan berkontribusi maksimal pada bonus demografi yang sedang kita alami.

Untuk memperkuat tren positif ini, beberapa langkah strategis perlu diperluas. Edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja harus diberikan sejak dini dan secara komprehensif. Konseling pranikah perlu diperbarui agar tidak hanya menekankan kesiapan administratif dan mental, tetapi juga aspek kesehatan, ekonomi, dan rencana kehidupan

jangka panjang. Di banyak daerah, tokoh agama, tokoh adat, sekolah, dan media memiliki pengaruh besar dalam membentuk norma sosial. Keterlibatan mereka menjadi kunci untuk mengurangi tekanan lingkungan yang selama ini mendorong anak muda menikah sebelum waktunya.

Usia kawin pertama bukan sekadar keputusan pribadi yang diambil oleh pasangan muda. Ia memiliki implikasi jauh melampaui batas rumah tangga, menyangkut kualitas generasi mendatang, kesehatan ibu dan anak, dinamika penduduk, hingga daya saing bangsa dalam jangka panjang. Ketika jutaan anak muda Indonesia membuat keputusan hidup yang lebih matang, sesungguhnya mereka sedang berkontribusi pada masa depan negara. Dari satu keputusan yang tampak sederhana, arah baru pembangunan bisa dimulai.

Karena itu, memastikan setiap remaja memiliki ruang, waktu, dan dukungan untuk mengambil keputusan hidup secara matang adalah investasi yang nilainya jauh melampaui statistik MUKP. Ketika akses pendidikan diperluas, kesetaraan gender diperkuat, dan keluarga maupun komunitas memberi kesempatan bagi anak muda untuk tumbuh sebelum membangun rumah tangga, Indonesia sedang membentuk fondasi kualitas manusia yang lebih kokoh. Dan bila tren usia kawin pertama yang meningkat ini terus dijaga melalui kebijakan yang sensitif terhadap konteks lokal, maka keputusan-keputusan pribadi jutaan warga muda hari ini akan menjadi modal besar bagi Indonesia menuju 2045 yang lebih sehat, lebih mandiri, dan lebih siap bersaing di dunia yang terus berubah. ✨



Pernikahan Dini

Mengurai Akar Masalah dan Jalan Keluar.

Di banyak daerah Indonesia, terutama di wilayah 3T, angka pernikahan anak tidak lagi datang sebagai kejutan, melainkan sebagai pola yang terus berulang dari tahun ke tahun. Data nasional menunjukkan tren penurunan, tetapi cerita yang muncul dari lapangan menunjukkan kenyataan yang lebih kompleks. Di desa-desa yang jauh dari pusat layanan, keputusan menikahkan anak sering kali bukan karena pilihan, melainkan keterpaksaan. Di banyak tempat, pernikahan anak masih dianggap jalan keluar dari tekanan ekonomi, konflik keluarga, atau sekadar mengikuti norma sosial yang telah berlangsung turun-temurun. Inilah alasan mengapa pernikahan anak bukan hanya isu keluarga, melainkan persoalan pembangunan manusia yang berdampak panjang.

Skala masalahnya pun tidak kecil. Secara global, UNICEF mencatat bahwa 12 juta anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun setiap tahunnya.

Indonesia memang menunjukkan penurunan angka pernikahan anak dalam lima tahun terakhir, tetapi kesenjangan antarwilayah masih sangat lebar. Ada provinsi yang berhasil menekan angka hingga di bawah 1 persen seperti DI Yogyakarta, sementara di provinsi lain seperti Nusa Tenggara Barat, Papua Selatan, dan Sulawesi Barat, angkanya masih menyentuh 10–15 persen. Gambaran ini menunjukkan bahwa penurunan secara nasional belum tentu mencerminkan keberhasilan di semua daerah.

Untuk memahami persoalan ini, kita perlu menelusuri mengapa pernikahan anak masih terjadi. Pada tingkat individu, rendahnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dan minimnya literasi kesehatan menjadi pemicu utama. Banyak remaja perempuan bahkan tidak mengetahui risiko medis dari kehamilan dini, apalagi konsekuensi psikologis dan sosialnya. Pada tingkat keluarga, tekanan ekonomi sering membuat pernikahan dini dianggap sebagai solusi

cepat: satu mulut lebih sedikit untuk diberi makan, satu tanggung jawab yang dialihkan kepada suami. Di lingkungan tertentu, praktik ini juga diperkuat oleh pola asuh yang konservatif dan kurangnya dukungan terhadap pendidikan anak perempuan.

Di sisi sosial, peran gender tradisional masih kuat membentuk keputusan keluarga. Dalam banyak budaya lokal, perempuan dianggap sudah “layak” menikah begitu mencapai pubertas, terlepas dari kesiapan emosional atau pendidikan yang belum tuntas. Secara struktural, akses pendidikan yang terbatas, layanan kesehatan yang jauh dari jangkauan, dan lemahnya perlindungan hukum membuat remaja semakin rentan. Ketika anak tidak dapat melanjutkan sekolah, tidak ada ruang aman untuk belajar, dan tidak ada layanan konseling yang tersedia, maka pernikahan menjadi satu-satunya jalan yang dianggap wajar.

Dampaknya dapat berlangsung sepanjang hidup. Remaja yang menikah cenderung putus sekolah, kehilangan peluang ekonomi, dan berisiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Secara kesehatan, tubuh mereka belum siap menghadapi kehamilan dini, sehingga risiko komplikasi meningkat. Efeknya tidak berhenti pada sang ibu; anak yang lahir dari ibu usia remaja lebih rentan mengalami gizi buruk, *stunting*, dan masalah perkembangan lainnya. Inilah lingkaran yang membuat kemiskinan dan kerentanan terus menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahkan anak laki-laki yang menikah di usia dini tidak luput dari dampak: mereka dipaksa memikul peran sebagai kepala keluarga ketika belum matang secara mental maupun finansial, sering kali berujung pada konflik rumah tangga yang tak terhindarkan.

Secara global, UNICEF mencatat bahwa 12 juta anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun setiap tahunnya. Indonesia memang menunjukkan penurunan angka pernikahan anak dalam lima tahun terakhir, tetapi kesenjangan antarwilayah masih sangat lebar. Ada provinsi yang berhasil menekan angka hingga di bawah 1 persen seperti DI Yogyakarta, sementara di provinsi lain seperti Nusa Tenggara Barat, Papua Selatan, dan Sulawesi Barat, angkanya masih menyentuh 10–15 persen.

Kesenjangan antarprovinsi memperlihatkan peta yang lebih jelas. Provinsi dengan angka pernikahan anak tertinggi, seperti Nusa Tenggara Barat, Papua Selatan, dan Sulawesi Barat, umumnya memiliki akses pendidikan yang terbatas, kondisi ekonomi yang berat, serta wilayah yang didominasi area rural. Di sisi lain, DIY dan DKI Jakarta mencatatkan angka terendah karena akses pendidikan lebih baik, layanan kesehatan lebih dekat, dan norma sosialnya lebih mendukung remaja untuk menyelesaikan sekolah terlebih dahulu. Pola ini menegaskan bahwa pernikahan anak sangat dipengaruhi oleh faktor struktural yang tidak merata di seluruh Indonesia.

Pendidikan menjadi titik balik paling menentukan. Data UNICEF menunjukkan bahwa remaja perempuan dengan pendidikan hanya sampai tingkat dasar memiliki prevalensi pernikahan anak paling tinggi. Bahkan, prevalensinya lebih tinggi daripada kelompok yang sama sekali tidak bersekolah, yang menunjukkan bahwa keberadaan sekolah saja belum cukup. Yang dibutuhkan adalah pendidikan yang benar-benar membekali pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, mimpi masa depan, dan keterampilan hidup. Sebuah sekolah yang aman, membuat remaja merasa dihargai, dan memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang dapat mendorong keputusan untuk menunda pernikahan.

Beberapa program strategis kini sedang berjalan untuk mengatasi persoalan ini. Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) hadir untuk mengintegrasikan isu kependudukan, kesehatan reproduksi, dan pembangunan keluarga ke dalam

proses pembelajaran. SuperApps Keluarga Indonesia dirancang sebagai sumber informasi yang mudah diakses keluarga untuk memahami persoalan kependudukan, termasuk konsekuensi menikah dini. Di lapangan, berbagai pihak juga memperkuat norma sosial melalui peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk membangun budaya baru yang lebih melindungi remaja.

Namun semua intervensi ini tetap harus bersifat asimetris. Daerah 3T tentu membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan wilayah Jawa atau kota besar. Di banyak wilayah, akses layanan dasar harus dibangun terlebih dahulu sebelum perubahan perilaku dapat terjadi. Karena itu, solusi untuk menurunkan angka pernikahan anak harus melibatkan berbagai sektor: pendidikan, agama, kesehatan, perlindungan anak, hingga pemerintah daerah. Pendekatan berbasis komunitas menjadi kunci agar perubahan tidak berhenti pada program, tetapi tertanam sebagai norma sosial baru.

Pada akhirnya, upaya menghapus pernikahan anak bukan sekadar memenuhi target statistik, melainkan syarat mendasar untuk membangun generasi yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih produktif. Menunda pernikahan berarti memberi kesempatan bagi anak untuk bermimpi lebih jauh, bersekolah lebih tinggi, dan berkontribusi lebih besar bagi bangsa. Jika Indonesia ingin mencapai visi Indonesia Emas, maka memastikan tidak ada anak yang kehilangan masa depannya karena menikah terlalu cepat harus menjadi salah satu prioritas utama. ✨



Rumah Masa Depan

Menuju Rumah Indonesia yang Lebih Sehat dan Aman.

Di sejumlah daerah Indonesia, kualitas hidup sebuah keluarga sering kali ditentukan oleh hal-hal yang tampak sepele: lantai yang kering, air yang mengalir lancar, atau kamar mandi yang aman dan bersih. Namun di balik keseharian itu, lingkungan fisik keluarga menyimpan pengaruh besar terhadap kesehatan, produktivitas, bahkan masa depan generasi berikutnya. Bukan hanya soal kenyamanan, melainkan fondasi kualitas hidup yang menentukan apakah sebuah keluarga dapat tumbuh kuat atau justru rentan terhadap berbagai risiko.

Rumah, dalam konteks pembangunan keluarga, bukan sekadar bangunan tempat berteduh. Ia adalah ruang pertama tempat anak belajar merangkak, tempat orang tua merencanakan masa depan, dan tempat seluruh anggota keluarga memulihkan tenaga setelah bekerja keras. Karena itu, kelayakan rumah memiliki implikasi langsung pada kesehatan fisik dan mental penghuninya. Rumah yang sempit, gelap,

lembab, atau konstruksinya tidak kokoh bukan hanya menurunkan kualitas hidup, tetapi juga meningkatkan risiko penyakit infeksi, kecelakaan, hingga stres psikologis. Konsep rumah layak huni yang dirumuskan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menekankan empat aspek penting: luas tempat tinggal yang memadai, akses air minum layak, sanitasi layak, dan ketahanan bangunan. Keempat aspek ini menjadi standar minimum kualitas hidup modern, sekaligus indikator penting untuk menilai kesejahteraan keluarga.

Meski demikian, capaian Indonesia masih punya pekerjaan rumah besar. Berdasarkan Susenas 2024, hanya 65,25 persen keluarga yang tinggal di rumah layak huni—angka yang masih di bawah target RPJMN 2020–2024 sebesar 70 persen. Lebih memprihatinkan lagi, disparitas antarprovinsi sangat lebar. Di Yogyakarta dan Bali sudah melampaui 80 persen, sementara DKI Jakarta, yang sering diasosiasikan

dengan pembangunan dan akses layanan, justru mencatat angka hanya 39 persen. Provinsi lain seperti Bangka Belitung (30,72 persen) dan Papua Tengah (26,79 persen) juga memperlihatkan bahwa banyak keluarga masih hidup dalam kondisi fisik rumah yang jauh dari layak.

Di sisi lain, akses terhadap air minum layak menunjukkan kemajuan yang lebih menggembirakan. Pada 2024, sekitar 92,64 persen rumah tangga telah memiliki akses air minum layak, naik dari tahun sebelumnya. Namun, capaian ini masih berada di bawah target 100 persen dalam RPJMN. Tantangan terbesar tampak di wilayah Papua Pegunungan, Papua Selatan, serta beberapa provinsi di Kalimantan dan Sumatra yang masih mencatat capaian di bawah 80 persen. Akses air bersih bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga benteng pertama pencegahan penyakit. Tanpa air minum yang aman, risiko diare, infeksi saluran cerna, hingga *stunting* meningkat tajam, dan dampaknya bisa bertahan sepanjang hidup seorang anak.

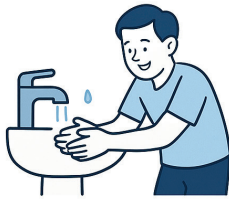
Sanitasi layak pun memperlihatkan pola yang sama: kemajuan ada, tetapi belum merata. Tahun 2024, akses sanitasi layak nasional berada di angka 83,6 persen. Delapan provinsi telah melampaui target 90 persen, seperti Sulawesi Tenggara, Kepulauan Riau, dan DKI Jakarta. Namun, provinsi lain masih tertinggal, terutama di wilayah pedesaan dan kawasan 3T. Sanitasi bukan hanya urusan teknis fasilitas mandi-cuci-kakus; ia berkaitan langsung dengan kesehatan publik. Lingkungan tanpa sanitasi aman meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan, menghambat tumbuh kembang anak, dan memperburuk kemiskinan.

Konsep rumah layak huni yang dirumuskan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menekankan empat aspek penting: luas tempat tinggal yang memadai, akses air minum layak, sanitasi layak, dan ketahanan bangunan.

Lingkungan fisik keluarga juga mencakup akses terhadap layanan kesehatan. Kepemilikan jaminan kesehatan menunjukkan tren positif: 75,48 persen penduduk Indonesia pada 2024 telah memiliki jaminan kesehatan. Namun, angka ini jauh dari target nasional yang menginginkan cakupan 98 persen. Akses terhadap jaminan kesehatan menjadi penentu penting apakah keluarga mampu mengatasi risiko penyakit tanpa terjerumus ke dalam kemiskinan baru. Tanpa jaminan kesehatan, biaya berobat dapat menjadi beban berat, menghambat produktivitas, bahkan mengancam kelangsungan pendidikan anak.

Di sisi lain, masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan bahwa lingkungan fisik bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kualitas hidup keluarga. Lingkungan sosial dalam rumah tangga ikut menentukan keamanan dan kesehatan mental anggota keluarga. Temuan SPHPN 2024

menyebutkan bahwa satu dari empat perempuan usia 15–64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual sepanjang hidupnya. Sementara itu, SNPHAR 2024 mencatat sekitar 11,5 juta anak usia 13–17 tahun pernah mengalami sedikitnya satu bentuk kekerasan; baik emosional, seksual, maupun fisik. Kekerasan, baik terhadap perempuan maupun anak, menunjukkan bahwa ketahanan keluarga tidak berhenti pada kualitas fisik rumah, tetapi juga pada kualitas hubungan antaranggota keluarga. Lingkungan sosial yang aman, suportif, dan penuh kasih adalah faktor tak kalah penting dalam membangun keluarga Indonesia yang sehat dan kuat.



83,6%

Akses sanitasi layak nasional berada di angka 83,6 persen (2024).



75,48%

75,48 persen penduduk Indonesia telah memiliki jaminan kesehatan (2024).

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah penyandang disabilitas. Long Form SP2020 mencatat bahwa 6,42 persen penduduk usia lima tahun ke atas mengalami disabilitas tipe 1. Disparitas antarprovinsi cukup besar, dengan Gorontalo mencatat angka tertinggi (8,66 persen) dan Papua sebagai yang terendah (4,58 persen). Data ini menunjukkan bahwa akses fasilitas dasar, pendidikan, dan pekerjaan bagi penyandang disabilitas belum merata. Kondisi fisik rumah dan lingkungan sekitar sering kali belum ramah disabilitas, sehingga menghambat partisipasi mereka dalam pendidikan dan dunia kerja. Dalam konteks ini, rumah layak huni harus mencakup konsep aksesibilitas, bukan sekadar ketahanan material bangunan.

Lingkungan fisik keluarga adalah pilar utama pembangunan manusia Indonesia. Rumah yang aman, air bersih yang mengalir, sanitasi yang layak, dan akses terhadap layanan kesehatan bukan hanya indikator teknis, melainkan cermin kualitas hidup dan ketahanan sebuah bangsa. Keluarga yang tinggal di lingkungan fisik yang sehat memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh produktif, merawat anggota keluarga dengan baik, serta menciptakan generasi kuat yang siap menghadapi tantangan masa depan.

Meningkatkan kualitas lingkungan fisik keluarga berarti meningkatkan kualitas hidup Indonesia. Inilah fondasi yang harus dibangun bersama: pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta agar setiap keluarga, di kota ataupun desa, dapat membuka pintu rumahnya dengan rasa aman dan keyakinan bahwa masa depan mereka terlindungi. Sebab, di balik tembok rumah yang kokoh, tersimpan kekuatan sejati sebuah bangsa. ✨



Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN







Buku ini mengajak pembaca menelusuri perubahan besar yang tengah membentuk kehidupan 284 juta jiwa: melambatnya kelahiran, cepatnya urbanisasi, mobilitas harian yang makin dinamis, hingga masyarakat yang menua lebih cepat dari perkiraan.

Berbekal data terbaru dan analisis yang tajam, buku ini mengungkap bagaimana keluarga, kota, pasar kerja, dan kebijakan publik sedang menjalani transformasi besar—sekaligus menawarkan arah baru agar bonus demografi tidak berubah menjadi beban.